



**STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN ADIWIYATA
DI KABUPATEN PASANGKAYU**

**DISERTASI
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR DOKTOR**

OLEH:

**ABIDIN
NIM : 167000100011009**

**PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**





DISERTASI
STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN
ADIWIYATA DI KABUPATEN PASANGKAYU

Oleh:

ABIDIN

NIM : 167000100011009

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal
dan dinyatakan memenuhi syarat

Tim Promotor

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, M.S.

Promotor

Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., Ph.D.

Ko-Promotor 1

Dr. Ir. Saida, MS.

Ko-Promotor 2

Malang, 2020

PASCASARJANA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Direktur,

Prof. Dr. Marjono, M.Phil.

NIP. 196211161988031004

IDENTITAS TIM PENGUJI DISERTASI

Judul Disertasi : Strategi dan Program Pengembangan Adiwiyata
di Kabupaten Pasangkayu

Nama : Abidin

NIM : 167000100011009

Program Studi : Pendidikan Doktor Ilmu Lingkungan

Komisi Promotor

Promotor : Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, M.S.

Ko-Promotor 1 : Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., Ph.D.

Ko-Promotor 2 : Dr. Ir. Saida, MS.

Tim Penguji

Pimpinan Sidang : Prof. Dr. Marjono, M.Phil

Penguji 1 : Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si

Penguji 2 : Dr. Bagyo Yanuwadi

Penguji 3 : Dr. Ir. Abdul Haris, MP

Penguji Eksternal : Prof. Dr. Juraid Abdul Latief, M.Hum

Tanggal Ujian : 04 Februari 2020

SK Penguji :

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang,
Yang Menyatakan

ABIDIN
NIM : 167000100011009

RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

1. Nama Lengkap	:	Abidin
2. Tempat Tanggal Lahir	:	Banta, 31 Desember 1968
3. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
4. Agama	:	Islam
5. Instansi Asal	:	BAPPEDA LITBANG Kab. Pasangkayu
6. Alamat Instansi	:	Jl. Soekarno
7. No. Telp Instansi	:	-
8. Alamat Rumah	:	Jl. I Gusti Ngurah Rai
9. No. Telp/HP Rumah	:	0812 4284 7076
10. Email	:	Abidin51056@gmail.com

PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	JURUSAN	TAHUN	TEMPAT
1	SD	-	1982	SD Negeri 1 Wora
2	SMP	-	1985	SMP Negeri Tawali
3	SMA	-	1988	SMA Muhammadiyah Bima
4	S-1	PMP/PKN	1993	Universitas Tadulako
5	S-2	Ilmu Administrasi	2011	STIAMI

PENGALAMAN PEKERJAAN

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TANGGAL SK	TMT
1	Kepala SMU Negeri 1 Pasangkayu	-	2003	2003
2	Kepala bidang DIKMENJURTI	III/b	2011	2011
3	Sekretaris BAPPEDA	III/a	2016	2016
4	Kepala BPKAD	II/b	2016	2019
5	Kepala BAPPEDA	II/b	2019	2019

PENGALAMAN SEMINAR/LOKAKARYA/PELATIHAN

NO	RINCIAN	TAHUN
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	2011
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	2017

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga disertasi dengan judul: “Strategi dan Program Pengembangan Adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penelitian dan penulisan disertasi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Doktor, pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya dan merupakan kesempatan berharga sekali untuk menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan dalam situasi dunia nyata. Tanpa kesempatan, bimbingan, masukan, serta dukungan semangat dari berbagai pihak, tentunya disertasi ini tidak akan terwujud sebagaimana bentuknya saat ini.

Sehubungan dengan selesainya penulisan disertasi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil, yaitu:

- (1) Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya;
- (2) Prof. Dr. Marjono, M.Phil., selaku Direktur Pascasarjana Multidisipliner Universitas Brawijaya;
- (3) Prof. Dr. Ir. Gatot Ciptadi, DESS., selaku ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya;
- (4) Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, M.S., selaku Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk perbaikan disertasi ini;
- (5) Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., Ph.D., selaku Ko-Promotor 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk perbaikan disertasi ini;
- (6) Dr. Ir. Saida, MS., selaku Ko-Promotor 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk perbaikan disertasi ini;
- (7) Para Tim Penguji Disertasi
- (8) Para dosen pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya;
- (9) Para Pegawai dan Staf Administrasi pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya;

(10) Bupati Kabupaten Pasangkayu beserta seluruh jajarannya;

(11) Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya.

Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu per-satu, juga penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga; karena dengan bantuan Bapak dan Ibu semuanya, maka disertasi ini dapat diselesaikan penulisannya dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian bagi kejayaan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin.

Malang, 2020
Penulis,

Abidin
NIM : 167000100011009



RINGKASAN

Abidin, Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya, Mei 2019. Strategi dan Pengembangan Adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu. Promotor: Suyadi.

Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan tempat pembelajaran nilai pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan upaya meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga tercipta kondisi belajar-mengajar yang lebih kondusif untuk siswa dalam menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan memahami betapa pentingnya memelihara lingkungan.

Kurangnya kebijakan yang mendukung dari masing-masing pemerintah daerah di Indonesia menyebabkan pelaksanaan program adiwiyata di setiap sekolah menjadi tidak maksimal. Untuk mewujudkan pencapaian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dapat menyusun strategi dan program pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu dalam bentuk dukungan terhadap lembaga pendidikan yakni sekolah melalui pengembangan empat komponen program dalam pelaksanaan program Adiwiyata. Ke empat komponen tersebut, yaitu kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis Gap pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mewujudkan program sekolah Adiwiyata sebagai upaya meningkatkan pelestarian lingkungan; 2) Untuk menganalisis pengaruh pengembangan kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup, Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif, Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Sekolah yang Ramah Lingkungan, dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu terhadap pengembangan kebijakan adiwiyata.

Jenis penelitian ini adalah *Mixed Methods Analysis* (Metode Analisis Kombinasi) yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam satu penelitian. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahap analisis, meliputi: 1) Uji Instrumen (Uji Validitas dan Uji Reabilitas); 2) Uji Asumsi Klasik; 3) Uji Analisis Regresi Berganda; dan 4) Uji Hipotesis. Sedangkan, untuk pendekatan kualitatif dilakukan dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Program adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu dapat terwujud melalui pengembangan kebijakan adiwiyata berbasis kearifan lokal yang diterapkan di seluruh lingkup pemerintahan dan juga lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang fokus kepada kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan; 2) Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Pengembangan Kurikulum Berbasis

Lingkungan Hidup, Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif, Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata; 3) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dapat menyusun program adiwiyata untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang disesuaikan dengan misi penyelamatan lingkungan bagi sekolah yang melaksanakan program atau menjadi sekolah Adiwiyata memiliki beberapa manfaat.

Kata Kunci: Adiwiyata, kearifan lokal, kebijakan, pelestarian lingkungan



SUMMARY

Abidin, Doctoral Program of Environmental Science, Postgraduate Brawijaya University Malang. Strategy and Development of Adiwiyata in Pasangkayu Regency. Promotor: Suyadi.

The Adiwiyata program aims to create a place of learning the value of environmental preservation and environmental management by efforts to improve environmental protection and management through pollution control activities, damage control, and preservation of environmental functions so as to create conditions for teaching and learning that are more conducive for students to foster environmental awareness. and understand how important it is to care for the environment.

The lack of supporting policies from each local government in Indonesia has caused the implementation of the adiwiyata program in every school to be less than optimal. To realize this achievement, the Pasangkayu Regency Government can develop adiwiyata development strategies and programs in Pasangkayu Regency in the form of support for educational institutions namely schools through the development of four program components in the implementation of the Adiwiyata program. The four components, namely environmentally friendly policies, implementation of an environment-based curriculum, environmentally based participatory activities, management of environmentally friendly supporting facilities.

The objectives in this study are to: 1) Analyze gaps in the Pasangkayu Regency Government policy in realizing the Adiwiyata school program as an effort to improve environmental preservation; 2) To analyze the influence of the development of Environmental Care and Cultivated School policies, Development of Environment-Based Curriculum, Development of Participatory-Based Environmental Activities, Development and Management of Environmentally Friendly School Facilities, and Policies of Pasangkayu District Government on the development of the adiwiyata model.

This type of research is Mixed Methods Analysis, which is to use quantitative and qualitative approaches simultaneously in one study. The quantitative approach in this study was carried out with the analysis phase, including: 1) Instrument Test (Test Validity and Reliability Test; 2) Classical Assumption Test; 3) Multiple Regression Analysis Test; and 4) Hypothesis Test. Meanwhile, the qualitative approach is carried out with descriptive analysis.

The results of this study indicate that: 1) Adiwiyata program in Pasangkayu Regency can be realized through the development of adiwiyata policies based on local wisdom that are applied throughout the scope of government and also educational institutions both elementary and junior high schools that focus on environmentally sound policies, the implementation of environment-based curriculum, participatory environmental based activities, management of environmentally friendly supporting facilities; 2) Environmental Care and Cultivated School Policy, Development of Environment-Based Curriculum, Development of Participatory-Based Environmental Activities,

Regional Government Policies of Kab. Pasangkayu has a significant influence on the Adiwiyata Model; 3) Pasangkayu Regency Government can compile an adiwiyata program to be realized in the form of policies that are tailored to the mission of saving the environment for schools that implement the program or become Adiwiyata schools that have several benefits.

Keywords: Adiwiyata, local wisdom, policy, environmental preservation



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga disertasi dengan judul “Strategi dan Program Pengembangan Adiwiyata Di Kabupaten Pasangkayu” ini dapat terselesaikan. Disertasi ini disusun sebagai satu di antara prasyarat untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Lingkungan pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.

Peningkatan pencapaian terhadap pelaksanaan program adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu dapat terwujud melalui pengembangan kebijakan adiwiyata berbasis kearifan lokal yang diterapkan di seluruh lingkup pemerintahan dan juga lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang fokus kepada kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

Peneliti sangat mengharapkan masukan, saran dan koreksi terhadap penyempurnaan proposal disertasi ini, sehingga analisisnya semakin fokus dan mendalam sebagai sebuah disertasi yang handal, serta hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses penyusunan strategi dan pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu.

Malang, 2020
Penulis,

ABIDIN
NIM : 167000100011009

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN

LEMBARAN PENGESAHAN

INDENTITAS TIM PENGUJI DISERTASI

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

HALAMAN PERSEMBAHAN

RIWAYAT HIDUP

UCAPAN TERIMA KASIH

RINGKASAN

SUMMARY

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

**BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL,
DAN HIPOTESIS**

2.1 Penelitian Terdahulu

2.2 Kajian Pustaka

2.3 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.2 Konsep dan Variabel Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel

i

ii

iii

iv

v

vi

viii

x

xii

xiii

xv

xvi

xvii

i

i

1

5

6

6

7

7

38

52

55

56

56

57

59

3.4 Teknik Pengumpulan Data 60

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 61

3.6 Lokasi Penelitian 62

3.7 Jadwal Penelitian 63

3.8 Teknik Analisis Data 63

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 65

4.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat 65

4.2 Gambaran Umum Kabupaten Pasangkayu 66

4.2.1 Letak Geografis Kabupaten Pasangkayu 69

4.3 Penduduk Kabupaten Pasangkayu 71

4.4 Visi dan Misi Kabupaten Pasangkayu 71

4.5 Daftar Sekolah Adiwiyata 76

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 79

5.1 Hasil Pengumpulan Data 79

5.2 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 92

5.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 100

5.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 103

5.5 Hasil Pengujian Hipotesis 111

5.6 Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Pasangkayu 114

5.7 Catatan Atas Kebaruan Disertasi 138

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 139

6.1 Kesimpulan 139

6.2 Saran 139

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

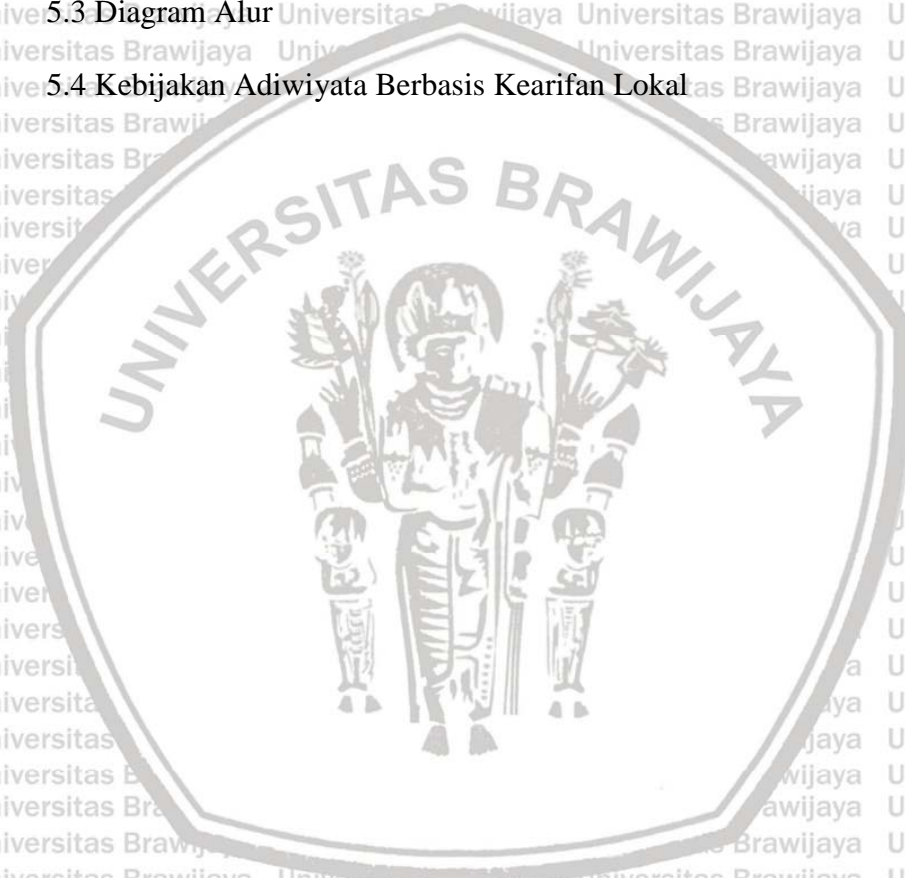
DAFTAR TABEL

2.1 Tabulasi Usulan Disertasi dan Rangkuman <i>Review</i> Jurnal	33
2.2 Kriteria Program Adiwiyata	43
3.1 Jadwal Penelitian	63
4.1 Matriks Sinkronisasi antara Visi dan Misi	73
4.2 Daftar Sekolah Dasar Kategori Adiwiyata	77
4.3 Daftar Sekolah Menengah Pertama Kategori Adiwiyata	78
5.1 Deskripsi Kuesioner	80
5.2 Demografi Responden	80
5.3 Tabulasi Frekuensi Responded (X_1)	82
5.4 Tabulasi Frekuensi Responded (X_2)	84
5.5 Tabulasi Frekuensi Responded (X_3)	86
5.6 Tabulasi Frekuensi Responded (X_4)	88
5.7 Tabulasi Frekuensi Responded (X_5)	90
5.8 Tabulasi Frekuensi Responded (Y)	91
5.9 Hasil Pengujian Validitas (X_1)	93
5.10 Hasil Pengujian Validitas (X_2)	94
5.11 Hasil Pengujian Validitas (X_3)	95
5.12 Hasil Pengujian Validitas (X_4)	95
5.13 Hasil Pengujian Validitas (X_5)	96
5.14 Hasil Pengujian Validitas (Y)	97
5.15 Hasil Pengujian Multikolinearitas	102
5.16 Hasil Perhitungan Regresi Berganda	103
5.17 Hasil analisis SWOT	129



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual	54
4.1 Peta Administratif Kabupaten Pasangkayu	70
5.1 Hasil Uji Normalitas	100
5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik Heterokedastisitas	101
5.3 Diagram Alur	105
5.4 Kebijakan Adiwiyata Berbasis Kearifan Lokal	137



DAFTAR SINGKATAN

KBM	: Kegiatan Belajar Mengajar
KNLH	: Kementerian Negara Lingkungan Hidup
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OSIS	: Organisasi Siswa Intra Sekolah
PLH	: Pendidikan Lingkungan Hidup
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA	: Penanaman Modal Asing
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri di seluruh dunia memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, meskipun industri dianggap sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat terhadap kerusakan lingkungan, karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan sumberdaya untuk mendukung hal tersebut sehingga akan memberikan dampak yang buruk terhadap stabilitas kondisi lingkungan. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya upaya yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan. Pemerintah memiliki peranan penting untuk merumuskan hal tersebut yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan yang dapat mendukung pelestarian lingkungan, sehingga ke depannya diharapkan bahwa pengembangan yang bersifat *sustainable* (berkelanjutan) dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan ke arah yang lebih baik (Afwan, 2013).

Aktivitas manusia adalah salah satu unsur yang menentukan kualitas lingkungan hidup. Banyaknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor antropogenik mendorong adanya upaya untuk melakukan perbaikan lingkungan. Pentingnya isu lingkungan dimulai dari abad ke-19 yang memunculkan berbagai aksi dari berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga menaruh perhatian dalam upaya pengelolaan lingkungan. Hal ini dibuktikan

dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, sampai pada pengawasan dan penegakkan hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi (Keraf, 2010).

Perilaku manusia adalah faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara global. Hal ini disebabkan oleh perilaku peduli lingkungan masih sangat minim, khususnya di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perilaku kepedulian lingkungan yaitu dengan mengadakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di dalam dunia pendidikan. Pendidikan lingkungan adalah salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan lingkungan di kalangan pelajar sekolah. Hal ini ditujukan dengan asumsi bahwa jika pengetahuan tentang lingkungan meningkat, maka perilaku peduli lingkungan juga meningkat dan akan mengurangi kerusakan lingkungan di masa yang akan datang. Konsep dasar dalam membentuk perilaku peduli lingkungan dibutuhkan tiga unsur, yaitu faktor institusional, strategi pendidikan, serta pengetahuan dan nilai. Ketiga faktor tersebut berkaitan satu dan yang lainnya. Faktor institusi berhubungan dengan kebijakan politik, ketersediaan dana dan fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Strategi pendidikan adalah salah satu hasil dari kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan

pengetahuan dan nilai yang nantinya akan mempengaruhi perilaku peduli lingkungan.

Pendidikan adalah salah satu variabel paling penting dalam membentuk perilaku peduli lingkungan, semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin peduli pada permasalahan lingkungan. Pendidikan lingkungan adalah suatu proses yang bertujuan membentuk perilaku, nilai, dan kebiasaan untuk menghargai lingkungan hidup. Salah satu strategi dalam pendidikan ini diaplikasikan dalam program Adiwiyata di lingkungan sekolah. Adiwiyata memuat empat komponen utama yang komprehensif untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan, tidak hanya dari segi fisik sekolah saja namun dari perilaku warga sekolahnya (Wirakusumah, 2010).

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Seperti yang sudah dijelaskan dalam undang-undang diatas bahwa lingkungan hidup membutuhkan pelestarian agar terhindar dari segala permasalahan lingkungan hidup. Hamzah (2013) menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan yang dilakukan dapat dikatakan efektif tergantung dari upaya mengadopsi etika yang baik dalam berperilaku. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang ramah dan peduli dengan keadaan lingkungan. Melihat persoalan pengelolaan lingkungan tersebut pemerintah berkomitmen dalam

menjaga lingkungan dari kerusakan melalui pendidikan. Untuk mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sekolah, maka Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan program pengelolaan lingkungan yang disebut program Adiwiyata.

Program Adiwiyata dalam lingkungan sekolah dapat mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Keuntungan dalam mengimplemtasikan program Adiwiyata bagi sekolah adalah sekolah dapat menciptakan tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan upaya meningkatkan upaya lima perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga tercipta kondisi belajar-mengajar yang lebih kondusif untuk siswa. Sementara manfaat program Adiwiyata bagi siswa adalah untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan memahami betapa pentingnya memelihara lingkungan yang baik.

Untuk mencapai tujuan Adiwiyata, sekolah telah mempersiapkan segala hal terkait empat komponen program dalam pelaksanaan program Adiwiyata.

Keempat komponen tersebut antara lain: 1) Kebijakan Berwawasan Lingkungan; 2) Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan; 3) Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif; dan 4) Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan.

Keempat komponen tersebut merupakan standar untuk mencapai tujuan dari

program Adiwiyata, sehingga sekolah harus mempersiapkan segala yang diperlukan untuk memenuhi standar tersebut. Adapun persiapan dalam melaksanakan program antara lain membentuk komite lingkungan sekolah, mengkaji lingkungan sekitar sekolah, dan mengembangkan rencana aksi.

Persiapan sekolah dalam komponen Kebijakan Berwawasan Lingkungan antara lain memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pengembangan kebijakan adiwiyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagai upaya meningkatkan pelestarian lingkungan?
2. Bagaimana pengaruh pengembangan kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup, Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif, Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Sekolah yang Ramah Lingkungan, dan Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu berbasis kearifan lokal terhadap kebijakan adiwiyata?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis strategi pengembangan kebijakan adiwiyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagai upaya meningkatkan pelestarian lingkungan;
2. Untuk menganalisis pengaruh pengembangan kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup, Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif, Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Sekolah yang Ramah Lingkungan, dan Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu berbasis kearifan lokal terhadap kebijakan adiwiyata;

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan adiwiyata yang berbasis kearifan lokal;
2. Memberikan rekomendasi kebijakan adiwiyata untuk mendukung pelestarian lingkungan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pasangkayu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dalam kajian ilmu lingkungan terkait pengelolaan lingkungan melalui kebijakan *sustainable development* untuk menciptakan kelestarian lingkungan sebagai upaya untuk melawan kerusakan lingkungan akibat berbagai jenis aktivitas. Fenomena tersebut menunjukkan begitu besarnya nilai kompleksitas permasalahan tentang ilmu lingkungan. Di satu sisi, beberapa penelitian telah dilakukan untuk melakukan analisis terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang baik melalui kebijakan pemerintah yang bersifat berkelanjutan..

Beberapa penelitian tersebut di antaranya adalah: 1) *Relationship Between Environment and Sustainable Economic Development: A Theoretical Approach to Environmental Problems*; 2) *Principle of Green Urbanism: The Absent Value in Cairo, Egypt*; 3) *The Classroom Teachers's Skills to Organize Contruktivist Learning Environment*; 4) *Investigation of the scope of intellectual services in the aspect of virtualization and information economy of modern Russia*; 5) *The Impact of Information and Communication Technologies on National Competitiveness: A Test of a Mediating Model in the European Union Countries Context*; 6) *Promoting Green Tourism: the Future of Environmental Awards*; 7) *Economic, Social, and Environmental Sustainability in Development Theory and Urban Planning Practice*; 8) *Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment*; 9) *Corporate Environmental Responsibility with special reference to Toyota Motor Corporation*; 10) *Pro-environmental Concern*

Influencing Green Buying: A Study on Indian Consumers; 11) *Evaluating the implementation of Green School (Adiwiyata) Program: Evidence In Indonesia*; 12)

The Implementation of the Environmental Education at "Adiwiyata" Schools in Pacitan Regency (An Analysis of the Implementation of Grindle Model Policy); 13

Waste Management Model-Based Design Character in Junior High School as a Tool of the Economic Empowerment. Serta beberapa penelitian lainnya yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Beberapa penelitian tersebut memiliki kajian-kajian tertentu dengan beberapa spesifikasi kajian penelitian dan pendekatan yang digunakan guna memberikan hasil analisis yang memberikan banyak manfaat sebagai rujukan dan perbandingan dengan penelitian ini, sehingga penelitian tersebut akan dijadikan sebagai literatur dalam mengembangkan penelitian ini. Hingga saat ini, berdasarkan pengamatan peneliti masih belum banyak terdapat literatur atau penelitian sebelumnya membahas mengenai permasalahan tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan sebagai referensi pada penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Abdul Ghafoor Awan (2013) menyatakan bahwa konsep mengenai lingkungan telah berkembang sejak menjadi isu global di awal Tahun 1970-an. Pada awalnya, isu lingkungan adalah sebuah pengakuan global bahwa ekosistem bumi sebenarnya telah rapuh, dan manusia telah memberikan banyak kontribusi kepada bumi meskipun dalam konteks yang negatif untuk kehancuran bumi tersebut. Pada saat ini, beberapa negara mulai berupaya untuk meningkatkan keseimbangan di antara peningkatan kualitas hidup

manusia dengan melakukan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang karena beberapa negara tersebut telah menyadari bahwa pentingnya pengelolaan lingkungan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan sosial dan ekonomi manusia sangat terkait dengan lingkungannya. Setiap perubahan di bidang sosio-ekonomi akan berdampak pada lingkungan dan sebaliknya, baik positif maupun negatif, sekarang atau nanti, dan dalam banyak kasus, hasil negatif tersebut tidak dapat diubah. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang membahas persoalan mengenai Bumi yang diadakan di Rio pada Tahun 1992 menyimpulkan bahwa masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat terkait dengan perkembangan dunia. Oleh karena itu, hasil KTT tersebut menyatakan akan berupaya untuk memberantas masalah lingkungan, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan semangat pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama global.

Dalam artikel tersebut peneliti berhasil mengangkat sebuah tema yang sangat menarik terkait dengan lingkungan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan untuk mengatasi mengenai permasalahan lingkungan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan meminimalisir dampak buruk terhadap eksploitasi lingkungan secara berlebihan dan tidak terkontrol. Selanjutnya, artikel tersebut menyusun sistematika penelitian dengan sangat baik, sehingga sangat membantuk para pembaca untuk memahami artikel tersebut dengan sangat mudah. Peneliti memaparkan secara jelas sistematika penelitian penelitian tersebut dalam abstrak yang lebih kompleks dari hasil penelitian sebagai bantuan kepada para pembaca untuk dapat mengerti lebih

awal mengenai isu yang diangkat dan dari penelitian tersebut. Artikel menggambarkan kondisi isu permasalahan yang diangkat dengan jelas dan menggunakan metode pendekatan yang telah sesuai untuk menganalisis dan menjabarkan hasil dari penelitian tersebut serta beberapa konten sebagai bagian dari artikel dijabarkan dengan sangat rinci. Di samping artikel tersebut juga menampilkan secara spesifik variabel data (tabel) yang digunakan untuk mempermudah para pembaca untuk dapat mengerti isi dari artikel tersebut, meskipun para pembaca bukan berasal dari latar belakang keilmuan ilmu lingkungan. Artikel tersebut juga berhasil memasukkan beberapa kutipan dari hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan untuk memberikan kekuatan analisa dalam artikel tersebut.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Usama Nassar (2013) melihat lebih jauh tentang pentingnya membangun sebuah Green Urbanism dalam perencanaan yang bersifat terpadu sehingga aspek kenyamanan, keamanan, dan keadilan itu tercapai di kota Kairo, Mesir. Dalam Jurnal ini menggunakan pendekatan yang bersifat holistik sehingga proses desainnya bersifat berkesinambungan dan kotinyu. Setelah saya membaca dan memahami jurnal ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang saya temukan adalah sebagai berikut: Pertama, Isi topik jurnal ini sangat relevan dengan membangun sebuah konsep green urbanisme yang berkelanjutan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membangun sebuah kota baru. Kedua, Pendekatan yang dilakukan dalam jurnal ini sangat bersifat terbaru, dimana manusia sebagai aktor yang bersifat

dinamis sedangkan kelemahan yang saya temukan dalam jurnal ini adalah kurang sistematisnya metodologi yang digunakannya.

Konsep *Green-Urbanism* merupakan suatu model tiga dimensi yang mempunyai bentuk, dan rupa yakni nol emisi (*zero emission*) serta nol limbah (*zero waste*), dimana ide-ide desain kreatif bagi pembaruan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan atau merekayasa ulang kota dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan pada kabupaten kota. Dalam jurnal ini mengasumsikan bahwa setiap pembangunan kota baru mengabaikan tiga aspek fokus dalam rencana pembangunan kota yakni *green-Urbanisme*, ruang publik, dan model berkelanjutan untuk tujuan jangka panjang. Setelah melihat dinamika sosial ekonomi yang terjadi pada perubahan kota baru, peneliti mengajukan sebuah pertanyaan bahwa apakah suatu perencanaan kota baru memberikan rasa keadilan dan kenyamanan terhadap kaum urban secara komprehensif, baik berupa keunikan identitas, nilai budaya, diversiti, dan karakter autentik dari setiap individu yang bersifat dinamis secara berkelanjutan. Grafis representasi dari model menunjukkan pelaku, skala dan analisis bidang, juga memetakan hirarki dari pengguna kepada pemerintah. Jurnal ini lebih menonjolkan model urban desain secara menyeluruh dengan melakukan pendekatan karakteristik yakni pelaku, skala, dan analisis urban desain.

Sejalan dengan itu, Martina Artmann yang merupakan peneliti dari Departemen Geografi and Geologi, Universitas Paris Lodron Salzburg, Hellbrunnerstraße, mengembangkan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengetahui peran politis pemerintah dan kaum urban terhadap penyegelan tanah

pada pengembangan kota baru. Dalam jurnalnya menggunakan analisis yang dilakukan di Jerman. Manajemen penyegelan tidak memiliki spasial strategis gambaran serta pertimbangan layanan yang diberikan oleh tanah subur. Tulisan ini menimbulkan pertanyaan (1) strategi apa yang dapat dianggap sehingga dapat mengefisienkan manajemen ekologis berkelanjutan terhadap penyegelan tanah perkotaan dan (2) siapa yang memiliki kompetensi dan harus bertanggung jawab untuk mengarahkan penyegelan tanah. Setelah mendalami jurnal Artmann, maka saya menemukan kelebihan dari metode dan temuan dari jurnal ini yakni pendekatan yang dilakukan sangat relevan dengan dinamika yang terjadi dalam proses perencanaan suatu kota. Metode yang digunakan juga sangat sistematis, dihubungkan dengan hal diatas, kelemahan dari jurnal yang dibangun oleh Artmann yakni tidak memberikan kejelasan akan asumsi yang dibangun berdasarkan hasil yang diperoleh. Seiring dengan dinamika pengembangan ilmu Barau et, al. Meneliti kota Kano yakni kota terbesar Nigeria utara dengan mengeksplorasi potensi CHANS framework. Peneliti menggambarkan adat perkotaan dan analisis dari abad ke-19, ke-20 dan, abad ke-21 sehingga menemukan perubahan signifikan kota tradisional yakni bangunan, gaya atap, bentuk jalan, distribusi kolam, dan ruang terbuka hijau. Penduduk pada lahan perkotaan juga menjadi kekuatan pendorong utama di balik perubahan. Salah satu hasil bencana dari perubahan ini yakni banjir bandang. Dalam menarik perhatian pelajaran yang lebih luas untuk rencana kota dalam konteks negara berkembang lainnya, peneliti menekankan kebutuhan untuk menganalisis acara spasial dan

non-spasial terkenal di kota-kota dalam kaitannya mengubah dinamika morfologi perkotaan.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Umran Sahin (2013) menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan pendapat, persepsi dan perilaku yang terjadi dalam diri seseorang yang mereka sendiri berinteraksi dengan lingkungan.

Namun, ada banyak pandangan yang berbeda tentang bagaimana perubahan ini terjadi. Hal ini dicoba untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran terjadi melalui

kognitif dan teori perilaku menurut teori kognitif, belajar adalah proses mental dan itu terjadi dengan memahami Informasi yang menjangkau pikiran.

Pemahaman ini berubah menurut pengalaman diri siswa, budaya yang mereka memiliki, interaksi alam di mana pembelajaran terjadi dan perannya dalam proses ini. Dalam beberapa tahun terakhir, teori pembelajaran konstruktivistik, yaitu tentang bagaimana pembelajaran terjadi, yang dikemukakan.

Pada dasarnya ada teori pembelajaran konstruktivis dimana informasi mengklaim dibangun dalam pikiran peserta didik. Teori dasar fundamental dinyatakan dalam lima tahap : pertama, belajar adalah suatu proses. Tahap kedua, bahwa pra-akumulasi pengetahuan mempengaruhi belajar. Tahap ketiga adalah tentang, belajar terjadi secara lebih sehat saat pengetahuan yang telah ada siswa terbukti salah atau tidak dalam tingkat memuaskan. Pada tahap keempat disebutkan bahwa belajar adalah suatu proses sosial dan perkembangan kognitif adalah dihasilkan dari interaksi sosial. Tahap terakhir menyebutkan bahwa belajar membutuhkan konsep tambahan dan baru aplikasi memungkinkan siswa untuk memperkuat pengetahuan mereka tentang pembelajaran konstruktivis. Teori

pembelajaran konstruktivis dimana informasi mengklaim dibangun dalam pikiran peserta didik. Teori dasar fundamental dinyatakan dalam lima tahap: 1) belajar adalah suatu proses; 2) bahwa pra-akumulasi pengetahuan mempengaruhi belajar; 3) belajar terjadi secara lebih sehat saat pengetahuan yang telah ada siswa terbukti salah atau tidak dalam tingkat memuaskan; 4) bahwa belajar adalah suatu proses sosial dan perkembangan kognitif adalah dihasilkan dari interaksi sosial.

Tahap terakhir menyebutkan bahwa belajar membutuhkan konsep tambahan dan baru aplikasi memungkinkan siswa untuk memperkuat pengetahuan mereka tentang pembelajaran konstruktivis.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Shkurkin, D., Novikov, V., Kobersy, I., Kobersy, I., Borisova, A (2015) menyatakan bahwa manusia dalam kehidupannya di dunia ini pasti tidak akan pernah lepas dari kehidupan berekonomi. Manusia membutuhkan makanan yang harus mereka konsumsi untuk bisa bertahan hidup, makanan yang manusia makan juga harus didistribusikan dari para produsen sehingga sampai pada konsumen yang membutuhkan. Produksi, distribusi dan konsumsi menjadi kegiatan inti dari ekonomi yang pasti dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhannya. Dalam mendukung lancarnya itu semua diperlukan sistem yang mengatur kegiatan ekonomi sehingga mampu menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tentu saja setiap masyarakat, negara dan bangsa mempunyai kultur atau latar belakang yang berbeda-beda sehingga dalam mengatur kegiatan ekonominya juga memiliki sistem yang berbeda-beda meskipun ada juga yang menggunakan sistem yang sama sesuai dengan keadaan lingkungan di mana sistem ini akan digunakan.

Dalam ekonomi internasional, terdapat berbagai macam sistem yang merupakan hasil dari kemampuan untuk menginterpretasikan yang berbeda-beda sesuai dengan kultur dan lingkungan yang mempengaruhi cara berpikir untuk menemukan sebuah sistem. Kehidupan berekonomi juga tak lepas dari berbagai masalah yang terus mengahantui seperti pengentasan kemiskinan, menyediakan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan penghasilan.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Anastasios V. Katos (2015) menyatakan bahwa di bawah krisis keuangan internasional saat ini konsep daya saing telah muncul sebagai salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi yang paling berpengaruh. 'Daya Saing' menangkap kewaspadaan baik pembatasan dan tantangan yang ditimbulkan oleh persaingan di pasar domestik dan internasional. Daya saing nasional sepuluh tahun yang lalu salah satu tujuan yang ditetapkan oleh kepala negara Eropa di Dewan Eropa di Lisbon, Portugal, pada Tahun 2000. Secara khusus, tujuan ini adalah untuk meningkatkan daya saing negara-negara Anggota Uni Eropa melalui berbagai inisiatif kebijakan, mengacu pada teknologi informasi dan komunikasi (masyarakat informasi, inovasi dan litbang dan industri jaringan) dan lingkungan ekonomi (liberalisasi pasar, layanan keuangan, perusahaan Lingkungan, inklusi sosial dan pembangunan berkelanjutan) (Blanke dan Thierry, 2008). Namun, beberapa peneliti mempertanyakan apakah paradoks produktif Solow (1987) masih berlaku. Solow (1987, hal.36) mengatakan dua puluh tahun yang lalu bahwa "Anda dapat melihat usia komputer di mana-mana namun dalam statistik produktivitas". Dengan mengkuantifikasi paradoks ini, mungkin akan dipertanyakan apakah pengenalan teknologi informasi dan

komunikasi akan (atau tidak) tercermin dalam statistik produktivitas (Adams, 2004), atau apakah pengenalan teknologi Katos baru ini akan benar-benar melemahkan beberapa ekonomi karena persaingan Mengintensifkan (Kraemer & Dedrick, 2007).

Lebih jauh lagi, walaupun dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran yang semakin meningkat dalam pertumbuhan, investasi modal, dan aspek ekonomi lainnya, pengaruh sebenarnya dari peran ini masih dalam penyelidikan empiris karena masalah metodologi dan pengukuran mendasar yang mendasarinya belum Telah diselesaikan (Brynjolfsson & Kahin, 2002). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan secara empiris menyelidiki apakah lingkungan ekonomi atau teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh tertinggi dalam memprediksi daya saing nasional global di Uni Eropa. Hasil studi ini mendukung bahwa faktor lingkungan ekonomi berpengaruh positif terhadap daya saing nasional global. Secara khusus, hubungan antara liberalisasi, membuat efisiensi dan mengintegrasikan jasa keuangan, meningkatkan lingkungan perusahaan, meningkatkan penyertaan social dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan dimediasi melalui penciptakan perkumpulan informasi untuk semua, mengembangkan area untuk inovasi, penelitian dan pembangunan industry jaringan di telekomunikasi, utilitas dan transportasi. Secara khusus, terlihat bahwa liberalisasi positif mempengaruhi industri jaringan, yang pada gilirannya positif mempengaruhi daya saing nasional global. Selain itu, didukung bahwa pengaruh teknologi informasi dan komunikasi lebih tinggi dari pengaruh

ekonomi lingkungan dalam memprediksi daya saing nasional global dalam Uni Eropa.

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Xavier Font, John Tribe. *Promoting Green Tourism: the Future of Environmental Awards*. Pada saat ini, fokus terhadap sektor lingkungan telah meningkat secara cepat karena para ahli atau penggiat lingkungan menganggap bahwa tren perkembangan zaman (globalisasi) akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan. Perkembangan industri salah satunya akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan ekosistem terhadap makhluk hidup akibat eksploitasi lahan yang digunakan sebagai bahan baku industri tertentu. Para ahli di bidang lingkungan bersepakat bahwa diperlukan adanya upaya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut dengan menyuarakan semangat pro-peningkatan kualitas kehidupan melalui kebijakan *green eco-tourism*. Kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu upaya yang sesuai untuk diterapkan, terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan yang akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut dikembangkan oleh para ahli yang fokus terhadap masalah tersebut dengan membentuk beberapa organisasi yang memiliki peran dalam mengeluarkan beberapa bentuk dan jenis piagam penghargaan (*awards*) khususnya dalam bidang lingkungan.

Pada dasarnya bentuk penghargaan (*awards*) khususnya dalam bidang lingkungan secara otomatis akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dalam sektor pariwisata. Pada saat ini, terdapat berbagai macam jenis bentuk penghargaan yang berkembang secara khusus kepada suatu daerah

(wilayah), organisasi (swasta atau pemerintah), dan perseorangan. Penghargaan tersebut dikembangkan sebagai dasar yang ditetapkan dan ditujukan sebagai landasan kepada masing-masing pihak dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta agar dapat memberikan kontribusi yang positif untuk mendukung peningkatan kapasitas lingkungan yang lebih baik.

Tanpa adanya upaya tersebut, para ahli baik pemerhati dan penggiat di bidang lingkungan menganggap bahwa pihak-pihak yang secara langsung terkait dalam memberikan dampak buruk terhadap lingkungan akan bersikap tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan secara langsung terhadap kesejahteraan makhluk hidup. Sehingga, dengan adanya penghargaan di bidang lingkungan maka secara otomatis akan memberikan perubahan terhadap mekanisme pengelolaan lingkungan baik kepada pihak pemerintah atau swasta karena pihak tersebut akan melakukan penyesuaian dalam penerapan kebijakannya. Penghargaan dalam bidang lingkungan akan menjadi sebuah standar dalam pengelolaan yang menjadi rujukan bagi setiap pihak yang terlibat untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Artikel ini menggarisbawahi bahwa tren perkembangan terhadap penghargaan di bidang lingkungan telah berkembang secara pesat dengan model dan bentuk yang berbeda-beda, salah satu contohnya adalah penghargaan untuk *green eco-tourism*. Telah banyak organisasi di dunia yang mengembangkan berbagai macam model dan bentuk penghargaan di bidang lingkungan, sehingga artikel ini menyatakan dibutuhkan adanya konsep dasar dalam menyusun penghargaan di bidang lingkungan yang harus diseragamkan untuk mendukung

secara penuh upaya peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan yang lebih baik maka penelitian ini merumuskan isu mengenai unsur apa saja yang harus dipenuhi dalam penghargaan di bidang lingkungan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan yang lebih baik dengan menggunakan metode analisis komparatif (*comparative analysis*).

Ketujuh, A. D. Basiago. *Economic, Social, and Environmental Sustainability in Development Theory and Urban Planning Practice*. Penelitian

ini menggarisbawahi bahwa dalam kurun sepuluh tahun ke depan, lebih dari setengah populasi dunia akan memenuhi daerah perkotaan. *United Nations* (UN) menyatakan bahwa permasalahan tersebut akan memberikan ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat khususnya di daerah perkotaan karena akan menimbulkan beberapa kasus seperti konflik sosial dan degradasi lingkungan (penurunan kualitas lingkungan) yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang terlalu *massive*. Selanjutnya, penelitian ini menyatakan dibutuhkan adanya upaya untuk mengantisipasi hal tersebut dengan merumuskan beberapa kebijakan yang dianggap dapat meminimalisir dampak yang akan didapatkan dari permasalahan tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan kebijakan berupa *urban planning* (planning pengembangan perkotaan) yang fokus terhadap isu mengenai permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perencanaan kebijakan tersebut harus memiliki formulasi terkait dengan pengembangan yang bersifat berkelanjutan, sehingga dapat mengakomodir dan meminimalisir berbagai macam dampak yang akan

ditimbulkan yang diakibatkan oleh perubahan struktur tatanan di masyarakat dalam kurun beberapa tahun ke depan.

Istilah *sustainable development* (pembangunan yang berkelanjutan), pertama kali muncul dalam *World Conservation Strategy* yang dirancang oleh

United Nations Environment Programme (UNEP) dan *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN) pada Tahun 1980. Istilah tersebut kemudian terus

digunakan sebagai sebuah melalui upaya konservasi yang didefinisikan sebagai skema kebijakan yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan (sumber daya)

bagi masyarakat digenerasi sekarang, akan tetapi dengan tetap mempertahankan potensi sumber daya tersebut untuk digunakan dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat pada generasi selanjutnya. Pengembangan teori dan konsep dalam *urban planning* sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak buruk

terhadap permasalahan mengenai pengelolaan tata kota dalam menghadapi eksploitasi sumberdaya oleh masyarakat dengan jumlah yang semakin tidak dapat

dibendung, sehingga pada akhirnya upaya tersebut melalui skema kebijakan akan memberikan manfaat terhadap pengelolaan sumberdaya yang lebih baik. Dampak

ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan dampak yang paling krusial terkait dengan permasalahan tersebut khususnya dampak lingkungan karena apabila

suatu kebijakan tidak memperhatikan permasalahan lingkungan dengan maksimal, maka berbagai macam konflik akan timbul yang dapat mengakibatkan

pengurangan kesejahteraan masyarakat dalam sistem berkehidupan. Beberapa negara di dunia pada saat ini, harus mengupayakan hal tersebut untuk

menghindari berbagai macam bentuk ancaman yang dapat terjadi terkait dengan permasalahan tersebut.

Kedelapan, Penelitian yang ditulis oleh Shah Md. Atiqul Haq (2012).

Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment.

Penelitian ini membahas mengenai manfaat dan tantangan ruang hijau perkotaan berdasarkan diskusi kritis hasil studi dari berbagai studi di berbagai kota. Peran penting yang dimainkan oleh ruang hijau adalah aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan. Ruang hijau perkotaan dapat menjadi alat yang komprehensif untuk perlindungan jangka panjang kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas hidup dan kualitas udara, meningkatkan nilai properti karena kemudahan dan karakteristik estetika mereka, dan mengurangi biaya energi untuk bangunan pendingin. Ruang hijau perkotaan juga dapat menyediakan layanan ekosistem dimana fasilitas rekreasi dan relaksasi tersedia bagi penduduk perkotaan dan wisatawan juga. Untuk mengkonfirmasi beberapa peran yang dimainkan oleh ruang hijau, tingkat perbaikan kualitatif dan distribusi ruang hijau tertentu di dalam wilayah perkotaan harus dipertimbangkan dan dimasukkan secara efektif ke dalam agenda keberlanjutan lingkungan. Untuk melakukan ini, pendekatan terpadu mengenai perencanaan, pemantauan, perancangan dan pemeliharaan ruang hijau perkotaan diperlukan untuk memperbaiki kelestarian lingkungan di kota-kota di berbagai negara.

Kesembilan, B. Lavanya Dr. M.Anbalagan (2012). *Corporate*

Environmental Responsibility with special reference to Toyota Motor

Corporation. Penelitian ini secara spesifik menyatakan bahwa pada saat ini

beberapa perusahaan internasional telah mengeluarkan kebijakan untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan dalam hal dampak negatif atau bahaya lingkungan. Dalam aspek ini, *Corporate Environmental Responsibility* merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosial suatu perusahaan dan mencakup komitmen akan kesadaran lingkungan, keterlibatan pemangku kepentingan, pengukuran, pelaporan dan audit, transparansi, komitmen terhadap perbaikan secara *sustain*. Di beberapa negara maju, badan perlindungan lingkungan telah menghasilkan peraturan ketat yang berkaitan dengan akuntansi dan pengungkapan isu lingkungan dan pengukuran biaya degradasi lingkungan. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan prakarsa yang dilakukan oleh Toyota Motor Limited karena keberhasilan perusahaan tersebut untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih yang memiliki tujuan membangun masyarakat rendah karbon, membangun masyarakat berbasis daur ulang, memberikan perlindungan lingkungan dan membangun masyarakat secara harmonis dan alami.

Kesepuluh, Penelitian yang ditulis oleh Saroj Kumar Datta (2011). *Pro-environmental Concern Influencing Green Buying: A Study on Indian Consumers*.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah pro-lingkungan terhadap konsumen, pengetahuan tentang masalah lingkungan, kesadaran akan produk ramah lingkungan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan tentang perilaku "*peduli hijau*" dalam konteks India. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang sangat tinggi dengan isu lingkungan.

Penelitian ini menyelidiki apakah kekhawatiran pro-lingkungan di kalangan konsumen di India meramalkan perilaku peduli hijau mereka. Data untuk

penelitian ini dikumpulkan dari sampel berpendidikan tinggi sebanyak 200 responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Kuesioner berisi pertanyaan untuk mengukur kepedulian konsumen terhadap konsumen umum, kesadaran akan produk ramah lingkungan, kepercayaan terhadap kinerja produk ramah lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap konsumen yang pro-lingkungan secara signifikan mempengaruhi perilaku mereka. Kesimpulannya adalah masalah lingkungan dapat muncul sebagai salah satu penggerak kuat yang mempengaruhi perilaku. Kesadaran diantara konsumen bahwa pilihan pembelian mereka bisa membuat perbedaan terhadap lingkungan harus dipromosikan untuk mempercepat konsumsi produk ramah lingkungan.

Kesebelas, Warju, Slamet Prawiro Harto, Soenarto, Martin D. Hartmann (2013). *Evaluating the implementation of Green School (Adiwiyata) Program: Evidence In Indonesia*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa isu lingkungan saat ini adalah topik yang muncul, aktual, dan penting. Degradasi lingkungan telah menjadi salah satu bukti bahwa aktivitas manusia memiliki dampak langsung terhadap pelestarian lingkungan, kerusakan lingkungan, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, untuk menopang kondisi lingkungan, semua aktivitas manusia harus sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Setiap negara memiliki definisi sendiri tentang sekolah hijau; tidak ada standar definisi terhadap *green school program*. Terdapat beberapa istilah seperti yakni hijau, sehat, berkelanjutan,. Istilah Adiwiyata di Indonesia berasal dari dua kata dari bahasa Sanskerta, Adi dan Wiyata. Adi berarti besar, sedangkan wiyata berarti tempat

dimana seseorang mendapat pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan sosial. Kombinasi dua kata adiwiyata memiliki arti: sebuah hak dan tempat yang ideal yang bisa didapat melalui semua sains, norma, dan etika dan bisa menjadi dasar terciptanya kesejahteraan manusia dan menuju cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan taraf pada sektor pendidikan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan melakukan penerapan terhadap skema *green school* (Adiwiyata) dalam penyesuaian ke dalam program pendidikan formal. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Adiwiyata pada beberapa sekolah yang terletak di beberapa provinsi di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa: *pertama*, hasil evaluasi konteks aspek kesadaran dan harapan masyarakat; relevansi program; peraturan dan kebijakan pemerintah dikategorikan sangat baik; *Kedua*, hasil evaluasi terhadap kepala sekolah, guru, staf administrasi, perwira perorangan, dan komite sekolah; karakteristik siswa; kurikulum; dan karakteristik infrastruktur dan fasilitas ramah lingkungan semuanya tergolong baik. *Ketiga*, hasil proses evaluasi diperoleh dari persiapan, proses pembelajaran, dan kolaborasi dengan sekolah lain tergolong baik. *Keempat*, hasil evaluasi prestasi dan kompetensi siswa, dan respon masyarakat dan kepuasan yang tergolong baik. Oleh karena itu, program adiwiyata dapat dilanjutkan sebagai upaya untuk mempromosikan paradigma pembangunan berkelanjutan.

Keduabelas, Penelitian yang ditulis oleh Maryono (2015). *The Implementation of the Environmental Education at "Adiwiyata" Schools in Pacitan Regency (An Analysis of the Implementation of Grindle Model Policy)*.

Penelitian tersebut menyatakan bahwa maraknya kerusakan alam dan lingkungan memicu kegelisahan masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu aspek penting bagi kehidupan; hal tersebut menjadi salah satu obyek penting dalam mengembangkan lingkungan hidup melalui pendidikan lingkungan. "Adiwiyata" adalah program Kementerian Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam komunitas sekolah terhadap konsep perlindungan lingkungan. Penelitian kualitatif deskriptif ini difokuskan pada penerapan kebijakan Pendidikan Lingkungan Sekolah Adiwiyata di Pacitan, Jawa Timur dengan mengamati beberapa fenomena atau fakta sosial yang terjadi sebagai pedoman yang tepat dalam wawancara lapangan yang berkaitan dengan Teori *Grindle*, yang mencakup tingkat perubahan yang diinginkan dan pelaksanaan program.

Studi ini berlangsung di Sekolah Adiwiyata di Pacitan sebagai penyelenggara Pendidikan Lingkungan di antaranya adalah SMPN 1 Pacitan, SMPN 1 Arjosari, SMPN 4 Pacitan, SD Alam Pacitan, dan SMAN Punung. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Informan penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan petugas administrasi. Teknik pemilihan informan adalah teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian (*display*) data,

interpretasi data, penjumlahan data, dan verifikasi, peningkatan validitas hasil, dan kemudian narasikan data hasil.

Temuan penelitian, *pertama* adalah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan, serta keprihatinan lingkungan peserta didik dan masyarakat, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang dikemukakan secara eksplisit termasuk konsep lingkungan.

Pendidikan sebagai kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari.

Ada empat sekolah yang telah menerapkan pendekatan komprehensif. Disini, penerapan nilai PLH sebagai subjek independen. Hal ini terkandung dalam

kurikulum sekolah, sebagai konten lokal. Dimulai dengan memprioritaskan nilai inti sekolah. Ke lima sekolah tersebut yang menerapkan "*Adiwiyata*" berusaha untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang cakap dalam memfasilitasi siswa untuk merawat lingkungan melalui kebijakan kemitraan dengan

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian Kesehatan. *Kedua*, pelaksana program Pendidikan Lingkungan

Hidup (PLH) di kelima sekolah tersebut merupakan unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, staf administrasi, dan komite sekolah. Implementasi

kebijakan didasarkan pada prinsip partisipatif dan berkelanjutan. Pimpinan

Sekolah harus bertanggung jawab atas implementasi kebijakan PLH. Semua

elemen mendukung dan bertanggung jawab atas implementasi kebijakan PLH,

salah satunya melalui kepemimpinan guru. Hasil penelitian ini merekomendasikan

agar penerapan kebijakan penting harus dilaksanakan oleh Pendidikan

Lingkungan yang terintegrasi dengan pendidikan karakter yang diposisikan

sebagai mata pelajaran tersendiri atau pendekatan yang komprehensif untuk mencapai tujuan yang efektif. Peran kepala sekolah dan guru sangat strategis untuk mengoptimalkan sikap teladan berdasarkan konstruktivisme dan model pembelajaran kontekstual. Pola kemitraan perlu ditingkatkan dengan beberapa institusi pendidikan seperti universitas untuk evaluasi penelitian program khusus kebijakan PLH, sehingga dapat dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Pemberdayaan komite sekolah perlu disinergikan melalui pendidikan *parenting*.

Ketigabelas, Penelitian yang ditulis oleh Lita Dwipasari (2014). *Waste Management Model-Based Design Character in Junior High School as a Tool of the Economic Empowerment*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang luas yang terdiri dari 17.500 pulau dengan jumlah populasi yang mencapai 250 Juta orang yang keberadaannya terletak di beberapa pulau-pulau yang tersebar di berbagai kota dan desa. Dalam konteks ini, kegiatan pengelolaan sampah tidaklah mudah. Sistem pengelolaan sampah membutuhkan kreativitas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, jika diperhatikan lebih spesifik maka sektor pengelolaan sampah di Indonesia merupakan salah satu bentuk mikrokosmos limbah dunia, dimana masalah pengelolaan limbah di berbagai daerah di Indonesia memiliki banyak tantangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Pemerintah Indonesia menekankan pengelolaan limbah dengan paradigma baru, yaitu prinsip 3R (*Reduce, Refuse, and Reuse*) dengan kolaborasi di antara pemerintah, badan usaha, swasta dan

UKM. Selanjutnya, peraturan mengenai Bank sampah dikembangkan untuk mengubah cara sampah masyarakat, mendidik dan mengenalkan kepada masyarakat, memilih dan menghargai perkembangan ekonomi sosial. Bank akan membeli limbah anorganik (kertas, plastik, kaleng) untuk kemudian didaur ulang menjadi bahan baku pabrik yang dibutuhkan. Bank sampah di Indonesia Pada Bulan Februari 2012 mencapai 471 unit dan meningkat menjadi 886 unit pada Bulan Mei 2012. Bentuk kontribusi sampah tersebut adalah meningkatkan jumlah lapangan kerja (*job creation*) serta pendapatan masyarakat. Malang adalah salah satu kota di provinsi Jawa Timur di Indonesia yang memiliki salah satu bank sampah percontohan di Indonesia yakni Bank Sampah Malang (BSM). Bank Sampah di Malang telah berhasil membangun sebuah bank sampah yang dikelola oleh suatu kelompok sekolah. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh kelompok sasaran di sekolah, bank sampah akan memerlukan instruksi untuk mengatasi kendala yang dialami. Untuk menghasilkan instruksi atau model yang bagus, penelitian ini ditargetkan pada kelompok SMP. Sehingga model ini bisa digunakan oleh Bank Sampah lain di Indonesia. Model ini akan menjadi petunjuk bagaimana kegiatan pengelolaan sampah dilakukan di SMP. Sekolah merupakan tempat yang strategis untuk menanamkan budaya baru bagi generasi muda. Budaya bersih, budaya peduli lingkungan dan kepedulian budaya bangsa dapat ditanamkan melalui pembelajaran di sekolah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang akan membuat para siswa (kaum muda) memiliki budaya belajar dan saling membantu dalam memperbaiki ekonomi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan model pengelolaan limbah untuk

Sekolah Menengah Pertama. Model ini diambil dari sekolah yang telah berhasil melakukan kegiatan pengelolaan. Di Malang, hanya terdapat satu sekolah menengah yang sedang melakukan, sementara sekolah lain mengalami banyak kesulitan di lapangan. Model yang dihasilkan akan diimplementasikan dan diuji di sekolah bermasalah. Dan hasilnya akan diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif perubahan fisik terlihat di sekolah, sekolah dan perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi ke pihak terkait. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan uji statistik Wilcoxon dengan SPSS.

Ke empat belas, penelitian yang berjudul "*Pendidikan Berperspektif Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Environmental Perspective Education Towards Sustainable Development*" yang ditulis oleh Yuli Priyanto, M.Sasmito Djati, Soemarno, Zaenal Fanani pada Tahun 2013. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepedulian lingkungan dengan model pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Subyek penelitian adalah 88 orang siswa. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner kepedulian lingkungan dan tes pemahaman paradigma pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada korelasi positif signifikan antara sikap peduli lingkungan, perilaku peduli lingkungan dengan pengetahuan paradigma pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepedulian lingkungan memiliki kesamaan dengan paradigma pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pendidikan untuk pembangunan

berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui pendidikan yang berperspektif lingkungan. Saran yang diajukan kepada para Kepala sekolah adalah penerapan pendidikan peduli lingkungan sebagai best practices di SMK Negeri. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten disarankan untuk mengkaji lebih mendalam tentang fokus pencapaian tujuan pengelolaan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan.

Ke lima belas, tulisan yang berjudul *Implementasi Kebijakan Adiwiyata dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang*.

Penelitian yang ditulis oleh Ellen Landriany pada Tahun 2014. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan, mendeskripsikan faktor pendukung, mendeskripsikan faktor penghambat, dan memberikan deskripsi dalam mengatasi hambatan program adiwiyata pada Sekolah Menengah Atas Negeri 8 dan 10 di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan hidup di sekolah sudah dituangkan dalam surat keputusan dan terintegrasi dalam masing-masing mata pelajaran. Kemudian mensosialisasikan beberapa kegiatan utama dengan pendekatan pada siswa guna mendapatkan dukungan yang sempurna sehingga menciptakan kesepakatan yang mutlak bahwa sekolah tersebut benar-benar sekolah berwawasan lingkungan. Selanjutnya masih dijumpai berbagai situasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan adiwiyata, seperti satuan tugas yang tidak tepat waktu serta ada sekelompok siswa yang masih belum sadar dalam memahami konsep sekolah berwawasan lingkungan hidup, masalah pendanaan, dan dukungan masyarakat serta instansi lain yang masih rendah.

Ke enam belas, Penelitian yang ditulis oleh Andy Haryono, Soemarno, M. Sasmito Djati, Amin Setyoleksono pada Tahun 2014 dengan judul *Learning Attitude and Awareness againts Student in Cultured Environmental Success in Probolingo*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran aktif diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan masalah lingkungan, karena dapat secara tidak langsung mengatasi masalah sosial dan lingkungan serta dampak lingkungan termasuk konsekuensi lingkungan dari perilaku manusia.

Keberhasilan siswa di lingkungan yang berbudaya di sekolah dipengaruhi oleh sikap dan kesadaran siswa terhadap masalah lingkungan baik pendidikan lingkungan di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan teknik analisis data menggunakan Generate Structural Component Analysis (GSCA). Hasilnya menunjukkan; 1) pendidikan lingkungan di sekolah berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan siswa, 2) pendidikan lingkungan di sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap dan kesadaran siswa, 3) pendidikan lingkungan di rumah berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan siswa, 4) pendidikan lingkungan di rumah tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap dan kesadaran siswa, 5) pendidikan lingkungan di masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan siswa, 6) pendidikan lingkungan di masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap dan kesadaran siswa, 7) pengetahuan siswa pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan kesadaran siswa, dan 8) sikap dan kesadaran siswa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan siswa berbudaya lingkungan.

Ke enam belas penelitian tersebut memiliki manfaat yang sangat besar sebagai referensi terhadap peneliti dalam menganalisis proses pengembangan kebijakan adiwiyata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pasangkayu. Beberapa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam beberapa pendekatan yang digunakan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan hasil *review* beberapa jurnal internasional tersebut, maka dilakukan tabulasi data terkait dengan struktur mekanisme dan usulan dalam penelitian disertasi ini yang disesuaikan dengan rujukan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini.



Tabel 2.1 Tabulasi Penyesuaian Usulan Disertasi dan Rangkuman *Review* Junal

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Rencana Disertasi	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1	Abdul Ghafoor Awan	Relationship Between Environment and Sustainable Economic Development: A Theoretical Approach to Environmental Problems	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Dampak Lingkungan 3. Kerusakan Lingkungan 4. Kebijakan Pemerintah 	Kebijakan Pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi melalui isu lingkungan	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi melalui isu lingkungan.
2	Usama Nassar	Principle of Green Urbanism: The Absent Value in Cairo, Egypt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku (Swasta dan Pemerintah) 2. Usaha 3. Kebijakan Desain Urban 	Kebijakan Pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi melalui isu lingkungan	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis Kebijakan Pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi melalui isu lingkungan, tetapi fokus variabel kepada aktor pemerintah dan non-pemerintah.
3	Umran Sahin	The Classroom Teachers's Skills to Organize Contruktivist Learning Environment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses belajar 2. Pra-akumulasi pengetahuan 3. Tingkat belajar yang memuaskan 4. Belajar adalah proses sosial 5. Belajar 	Pendidikan sebagai landasan dalam Adiwiyata	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan terhadap sektor pendidikan sebagai landasan dalam Adiwiyata.



			membutuhkan konsep tambahan		
4	Shkurkin, D., Novikov, V., Kobersy, I., Kobersy, I., Borisova, A	Investigation of the scope of intellectual services in the aspect of virtualization and information economy of modern Russia	Kluster Ekonomi 1. Regional 2. Rantai produksi 3. Industri 4. <i>Self-organization</i> sistem ekonomi	Inovasi dalam organisasi pemerintah untuk melakukan pengembangan kebijakan Adiwiyata	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap dampak inovasi dalam organisasi pemerintah untuk melakukan pengelolaan kebijakan Adiwiyata melalui penguatan kebijakan yang sesuai dalam aturan hukum tata negara yang berlaku.
5	Anastasios V. Katos	The Impact of Information and Communication Technologies on National Competitiveness: A Test of a Mediating Model in the European Union Countries Context	1. Daya saing nasional global 2. Teknologi informasi dan komunikasi 3. Lingkungan ekonomi	Identifikasi kemajuan daerah	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap identifikasi kemajuan daerah.
6	Xavier Font, John Tribe	Promoting Green Tourism: the Future of Environmental Awards	1. Fokus 2. Kriteria 3. Sistem sertifikasi 4. Hasil 5. Evaluasi	Penilaian yang menjadi fokus tujuan	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis penilaian yang menjadi fokus tujuan.
7	A. D.	Economic, Social, and	1. Urban Planing	Penilaian yang	Terdapat persamaan dengan

	Basiago	Environmental Sustainability in Development Theory and Urban Planning Practice	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan <i>Massive</i> 3. Model Alternatif 	menjadi fokus tujuan	penelitian ini yaitu melakukan analisis penilaian yang menjadi fokus tujuan
8	Shah Md. Atiqul Haq	Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keuntungan Ekologi 2. <i>Property Value</i> 3. <i>Human Health</i> 4. <i>Education Programme</i> 	Inovasi dalam organisasi pemerintah untuk melakukan pengembangan kebijakan Adiwiyata	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap dampak inovasi dalam organisasi pemerintah untuk melakukan pengelolaan kebijakan Adiwiyata
9	B. Lavanya Dr. M.Anbalagan	Corporate Environmental Responsibility with special reference to Toyota Motor Corporation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Design Experimental 2. Education Standards 3. Public Policy 	Inovasi dalam organisasi pemerintah untuk melakukan pengembangan kebijakan Adiwiyata	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap dampak inovasi dalam organisasi pemerintah untuk melakukan pengelolaan kebijakan Adiwiyata
10	Saroj Kumar Datta	Pro-environmental Concern Influencing Green Buying: A Study on Indian Consumers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Lingkungan 2. Pendidikan 3. Kesejahteraan Masyarakat 	Inovasi dalam organisasi pemerintah untuk melakukan pengembangan kebijakan Adiwiyata	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap dampak inovasi dalam organisasi pemerintah untuk melakukan pengelolaan kebijakan Adiwiyata
11	Warju, Slamet Prawiro Harto, Soenarto,	Evaluating the implementation of Green School (<i>Adiwiyata</i>) Pogram: Evidence In Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adiwiyata Program 2. Evaluation 3. Sustainable Development 	Program Adiwiyata Sebagai Program Utama Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Lingkungan	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis program Adiwiyata Sebagai Program Utama Peningkatan Kualitas Pendidikan

	Martin D. Hartmann			Secara Berkelanjutan	dan Lingkungan Secara Berkelanjutan
12	Maryono	The Implementation of the Environmental Education at “Adiwiyata” Schools in Pacitan Regency (An Analysis of the Implementation of Grindle Model Policy)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Policy Implementation 2. Education 3. Environment 	Sektor Pendidikan sebagai langkah untuk meningkatkan peningkatan kualitas lingkungan	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis Sektor Pendidikan sebagai langkah untuk meningkatkan peningkatan kualitas lingkungan
13	Lita Dwipasari	Waste Management Model-Based Design Character in Junior High School as a Tool of the Economic Empowerment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Waste 2. Junior High School 3. Economic Empowerment 	Kebijakan Pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi melalui isu lingkungan	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan analisis Kebijakan Pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi melalui isu lingkungan
14	Yuli Priyanto, M. Sasmito Djati, Soemarno, Zaenal Fanani	Pendidikan Berperspektif Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan <i>Environmental Perspective Education Towards Sustainable Development</i>	Kepedulian Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui pendidikan yang berspektif lingkungan	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan terhadap sektor pendidikan sebagai landasan dalam Adiwiyata.
15	Ellen Landriany	Implementasi Kebijakan Adiwiyata dalam Upaya	Pendidikan Lingkungan, Adiwiyata	Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan terhadap sektor pendidikan



		Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang		adhiwiyata yaitu siswa yang belum sadar memahami konsep wawasan lingkungan hidup, masalah pendanaan, dan dukungan masyarakat yang kurang	sebagai landasan dalam Adhiwiyata.
16	Andy Haryono, Soemarno, M. Sasmito Djati, Amin Setyoleksono	Learning Attitude and Awareness Against Students in Cultured Environmental Success in Probolinggo	Learning, Attitude, Awareness, Cultural Environment	Pembelajaran aktif diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan masalah lingkungan, karena dapat secara tidak langsung mengatasi masalah sosial dan lingkungan serta dampak lingkungan termasuk konsekuensi lingkungan dari perilaku manusia	Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan terhadap sektor pendidikan sebagai landasan dalam Adhiwiyata.

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1. Definisi Adiwiyata

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program adiyata menyatakan bahwa penghargaan adiwiyata adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup. Adiwiyata adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata adalah salah satu program kerja berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan lingkungan hidup.

Laju pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia merupakan fenomena yang sulit dibendung. Sebagai konsekuensi, kebutuhan masyarakat yang kian meningkat, berdampak pada perilaku eksploitatif terhadap Sumber Daya Alam (SDA). Tentu saja kecenderungan ini berakibat lanjut pada menurunnya tingkat kuantitas maupun kualitas SDA secara cepat. Oleh karenanya kualitas manusia menjadi isu sentral dan memiliki peran penting dalam upaya penyelamatan SDA. Pengetahuan tentang lingkungan hidup yang memadai sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat, untuk turut melaksanakan upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini menjadi sangat krusial untuk segera dilakukan secara bersama.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) pada tanggal 19 Februari 2004 bersama-sama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri telah menetapkan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Kebijakan PLH ini merupakan kebijakan dasar sebagai arahan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan dan pengembangan PLH di Indonesia. Pendidikan Lingkungan Hidup diyakini sebagai solusi yang efektif dan 30 efisien dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pendidikan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan di Indonesia selama ini masih belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan yang menguntungkan atau berpihak pada lingkungan hidup dan masyarakat.

Dalam implementasinya, baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal, kebijakan diarahkan agar semua pihak dapat melakukan: pengembangan kelembagaan PLH; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengembangan sarana dan prasarana; peningkatan dan efisiensi penggunaan anggaran; pengembangan materi PLH; peningkatan komunikasi dan informasi; pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan; dan pengembangan metode PLH. Kedelapan aspek kebijakan tersebut perlu ditumbuhkembangkan sehingga dapat menjadi alat penggerak yang efisien dan efektif bagi kemajuan PLH di Indonesia.

Tindak lanjut yang diharapkan adalah bahwa seluruh instansi terkait, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat dapat

bersinergi melaksanakan kegiatan PLH. Sampai saat ini, PLH di Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholders*) melaksanakan kegiatan PLH secara parsial dan mengukur kinerja keberhasilan berdasarkan perspektif masing-masing.

Menyikapi masalah tersebut dan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lingkungan hidup kepada peserta didik dan masyarakat, maka pada tanggal 3 Juni 2005 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Menteri 31 Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional. Realisasi dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 21 Februari 2006 telah dicanangkan Program Adiwiyata, yaitu Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Program Adiwiyata dicanangkan untuk mendorong dan membentuk sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat turut melaksanakan upaya-upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pada tahap awal 2006, Program Adiwiyata dilaksanakan di wilayah Pulau Jawa dengan melibatkan seluruh unsur terkait seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan. Namun dengan berjalannya waktu, diluar dugaan, program yang tidak menawarkan insentif materi ini, menunjukkan peningkatan antusiasme sekolah untuk bergabung. Pada Tahun 2009 ini, lebih dari 300 sekolah yang meliputi 29 provinsi telah berpartisipasi dalam program Adiwiyata. Pada tahun 2009 ini Penghargaan Adiwiyata Mandiri telah diberikan oleh Presiden RI

kepada 10 (sepuluh) sekolah dan Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada 100 (seratus) sekolah oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pada tahun-tahun mendatang program ini akan terus dikembangkan lebih luas lagi. Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan semua pihak terkait sangat berkepentingan dengan program ini. Harapan kami, kegiatan Adiwiyata ini dapat menjadi alat pemacu semua pihak, terutama bagi semua pemerintah daerah dalam pelaksanaan PLH. Sehingga semakin banyak sekolah yang peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, maka semakin banyak pula anak didik di kemudian 32 hari yang bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian cita-cita pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Pada dasarnya peluang mengikuti program Adiwiyata terbuka bagi seluruh sekolah di tanah air Indonesia. Mengingat keterbatasan yang ada dan kepentingan dari semua pihak terkait, maka dalam proses seleksi dan penilaian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dibantu oleh berbagai pihak, antara lain: Pemerintah Daerah setempat (dalam hal ini dikoordinir oleh BPLHD/Bapedalda Propinsi), bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi dan pihak swasta lainnya.

Tim Penilai Adiwiyata terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yaitu: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, LSM yang bergerak di bidang lingkungan, Jaringan Pendidikan Lingkungan, Perguruan Tinggi, Swasta, dan lain-lain. Sedangkan Dewan Pengesahan Adiwiyata terdiri dari Pakar Lingkungan, Pakar Pendidikan Lingkungan, wakil dari Perguruan Tinggi dan lain sebagainya.

2.2.2. Kebijakan Pengembangan Kebijakan adiwiyata

Menurut Tirtarahardja (2010) secara formal pendidikan lingkungan hidup menjadi salah satu alternatif yang rasional untuk memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum. Pendidikan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga menjadi sarana yang sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut Nurjhani dan Widodo (2009) pendidikan lingkungan dibutuhkan dan harus diberikan kepada anak sejak dini agar mereka mengerti dan tidak merusak lingkungan. Hal ini dipengaruhi beberapa aspek antara lain:

1. Aspek kognitif, pendidikan lingkungan hidup mempunyai fungsi untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan lingkungan, juga mampu meningkatkan daya ingat, penerapan, analisis, dan evaluasi;
2. Aspek afektif, pendidikan lingkungan hidup berfungsi meningkatkan penerimaan, penilaian, pengorganisasian dan karakteristik kepribadian dalam menata kehidupan dalam keselarasan dengan alam;
3. Aspek psikomotorik, pendidikan lingkungan hidup berperan dalam meniru, memanipulasi dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya dalam upaya meningkatkan budaya mencintai lingkungan;
4. Aspek minat, pendidikan lingkungan hidup berfungsi meningkatkan minat dalam diri anak.

Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia telah diupayakan oleh berbagai pihak sejak awal tahun 1970-an. Selama ini pelaksanaan Pendidikan

Lingkungan Hidup dilakukan oleh masing-masing pelaku pendidikan lingkungan hidup secara terpisah. Dewasa ini disadari bahwa berbagai upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam pendidikan lingkungan hidup perlu dicermati oleh seluruh pemangku kepentingan agar efektivitas pengembangan pendidikan lingkungan hidup menjadi lebih terencana, konsisten dan terstruktur. Di mana, terdapat komponen pengembangan program adiwiyata terdiri dari empat komponen yang termuat di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata yaitu aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan, aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif, aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Olehnya itu, dikembangkan menjadi model pengembangan adiwiyata yang berdasarkan pada empat pengembangan (Shamadi, 2012), yaitu:

- 1) pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan; 2) pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup; 3) pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan 4) pengembangan pengelolaan sarana sekolah yang ramah lingkungan. Model matematis yang dibuat dapat dilihat dibawah ini.

$$ADYT = \alpha + \beta_1 KSPBL + \beta_2 KBLH + \beta_3 KLBP + \beta_4 PPSSRL + e$$

Selain itu juga, terdapat tiga prinsip pada program adiwiyata yaitu: 1) edukatif berupa pemberian pendidikan tentang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2) partisipatif di mana setiap warga sekolah terlibat dalam seluruh kegiatan adiwiyata mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing; 3) berkelanjutan di mana seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana, terus-menerus dan komprehensif. Tiga prinsi adiwiyata tersebut juga didukung dengan ketersediaan kriteria program adiwiyata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Kriteria Program Adiwiyata

No.	Komponen	Variabel
1	Kebijakan sekolah berwawasan lingkungan hidup	A. Kurikulum memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup B. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2	Pelaksanaan kurikulum sekolah berbasis lingkungan hidup	A. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan B. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3	Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif bidang lingkungan hidup	A. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah B. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, swasta, media, dan sekolah lain)
4	Pengelolaan sarana pendukung proses pembelajaran ramah lingkungan hidup	A. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan B. Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah

2.2.3. Dukungan Terhadap Kebijakan Adiwiyata

Dalam rangka pelestarian lingkungan, keterlibatan semua komponen masyarakat mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan

berbudaya lingkungan, warga sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai aktivitas pembelajaran lingkungan hidup. Selain itu sekolah juga diharapkan melibatkan masyarakat disekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat baik bagi warga sekolah, masyarakat maupun lingkungannya.

Mensosialisasikan beberapa kegiatan utama dengan pendekatan pada siswa sangat penting di lakukan guna mendapatkan dukungan yang sempurna sehingga menciptakan kesepakatan yang mutlak bahwa sekolah tersebut benar-benar sekolah berwawasan lingkungan bukan hanya tertera dalam sampul dokumen.

Majalah dinding merupakan salah satu media informasi kreatif yang ada di lingkungan sekolah. Majalah dinding merupakan program OSIS yang sangat diminati oleh para siswa. Majalah dinding atau yang sering disebut Mading ini biasanya memuat informasi-informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk para siswa dan warga sekolah lainnya. Madingnya berisi informasi dengan tema pengelolaan lingkungan. Selain disajikan dengan unik dan menarik, gaya bahasa dalam majalah dinding biasanya menggunakan gaya bahasa remaja, hal inilah yang menjadikan para siswa dan siswi gemar membacanya.

Mading ini tentunya akan bermanfaat sebagai wadah pengembangan kreativitas siswa-siswi. Karena dalam hal ini siswa-siswi dituntut untuk menggunakan kreativitas mereka agar bisa membuat dan menghasilkan majalah dinding yang menarik untuk para pembacanya. Selain itu, bagi siswa-siswi yang merasa mempunyai suatu karya yang bagus ataupun yang dianggap pantas, karya-karya tersebut misalnya puisi, cerpen, cerita lucu, wacana harian atau apapun itu, mereka bisa menggunakan majalah dinding sebagai pameran sederhana. Bagi

mereka para pembaca, dengan membaca ataupun sekedar melihat-lihat karya-karya yang ada tentunya akan menambah informasi yang mereka miliki.

Selain digunakan sebagai media Informasi, majalah dinding juga bisa bermanfaat sebagai ajang kompetensi intelektual. Apabila kita telusuri lebih lanjut majalah dinding bisa mengasah daya kreativitas siswa-siswi baik intra sekolah maupun antar sekolah. Intra sekolah misalnya saja seperti dalam proses pembuatan majalah dinding, siswa-siswi akan mencetuskan ide kreatif mereka.

Secara sekilas mungkin belum terlihat nilai-nilai kompetisi, namun sebenarnya sampai tahap ini kompetisi sudah sedikit ada. Karena dalam majalah dinding hanya akan menerbitkan karya-karya terbaik dari hasil pengembangan siswa-siswi. Kemudian contoh untuk kompetisi majalah dinding antar sekolah adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan yang dapat dijadikan sebagai media kompetisi intelektual.

2.2.4. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Adiwiyata

Upaya yang dilakukan, melakukan kegiatan utama pada program Adiwiyata dengan mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Di samping itu, program ini juga mengembangkan norma dasar diantaranya kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup. Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar dapat menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid, dan karyawan sekolah) sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan. Dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup selama ini,

berdasarkan hasil beberapa penelitian terkait dengan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan adiwiyata, adalah sebagai berikut (Landriany, 2014):

1. Perputaran petugas satuan tugas yang tidak tepat waktu membuat sedikit masalah dalam pemantauan pelaksanaan lingkungan hidup di sekolah;
2. Sekelompok siswa yang masih belum sadar dalam memahami konsep sekolah berwawasan lingkungan hidup;
3. Beberapa tempat pembuangan sampah masih didanai dari Pemerintah Kota atau Provinsi;
4. Dukungan masyarakat dan instansi lain yang masih rendah.

Pada dasarnya, Landriany (2014) menyatakan bahwa program Adiwiyata tidak ditujukan sebagai suatu kompetisi atau lomba. Penghargaan Adiwiyata diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah yang mampu melaksanakan upaya peningkatan pendidikan lingkungan hidup secara benar, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penghargaan diberikan pada tahapan pemberdayaan (selama kurun waktu kurang dari 3 tahun) dan tahap kemandirian (selama kurun waktu lebih dari 3 tahun). Pelaksanaan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, warga sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai aktivitas pembelajaran lingkungan hidup. Selain itu sekolah juga diharapkan melibatkan masyarakat disekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat baik bagi warga sekolah, masyarakat maupun lingkungannya.

2.2.5. Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Adiwiyata

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang dinilai telah berhasil dalam melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup. Calon sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang dinilai telah berhasil dalam pengembangan lingkungan hidup.

Capaian akhir program Adiwiyata adalah diharapkan terbentuk sekolah berwawasan lingkungan. Sekolah berwawasan lingkungan hidup adalah sekolah yang menerapkan nilai-nilai cinta dan peduli lingkungan pada sekolahnya.

Pengajaran yang berbasisi lingkungan dan kesadaran warga sekolah akan pentingnya lingkungan merupakan bagian terpenting dari sekolah berwawasan lingkungan hidup. Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut, maka berikut beberapa strategi yang dapat dilaksanakan (Landriany, 2014):

1. Kebijakan dari kepala sekolah untuk menerbitkan surat keputusan kepada guru, karyawan tentang uraian tugas serta tanggung jawab yang diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan tugas, hal tersebut dapat dipakai sebagai komunikasi untuk menentukan yang harus dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif juga memotivasi untuk mau melaksanakan perintah, sedangkan untuk siswa yang tergabung dalam kepengurusan lingkungan hidup juga akan diberikan surat keputusan agar sebelum terjadi pergantian pengurus siswa tetap memiliki tanggung jawab menangani masalah lingkungan. Penanganan lingkungan hidup tersebut dibawah koordinasi dari Waka Kesiswaan dibawah koordinator pembina sebid. Kejelasan dari kepengurusan tersebut akan dapat meminimalisir kevakuman dari satgas;

2. Pembentukan Komisi disiplin, dengan pembentukan komisi disiplin dibawah tanggung jawab tim tatib guru, terbentuknya struktur organisasi tersebut mendukung kepentingan strategi untuk meningkatkan kinerja, mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif dan dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan;
3. Membangun komitmen dan membangun komunikasi antar siswa, membangun sebuah perbaikan ataupun perubahan kearah keberhasilan akan menghantarkan pribadi pada keteguhan hati, kepercayaan pada diri sendiri dan imbas dari sebuah keistiqomahan adalah kesuksesan;
4. Keteladanan dari kepemimpinan, memiliki keyakinan yang harus diperjuangkan menjadi teladan adalah mempraktikkan yang dipidatokan, melaksanakan komitmen, memenuhi janji bertindak sesuai ucapan dan melakukan yang dikatakan;
5. Kontrol, yang dilakukan oleh atasan memberi perhatian, pengarahan, petunjuk serta memperbaiki kesalahan sehingga akan menentukan perilaku dalam bekerja seperti perilaku disiplin;
6. Penghematan sumber daya, Untuk penghematan sumber daya alam (air, listrik, dan ATK) mempunyai kebijakan yang tertuang dalam KTSP yaitu kebijakan tidak hanya untuk menghemat sumber daya alam, namun juga untuk membiasakan seluruh warganya agar memiliki budaya hemat sumber daya alam dan sekaligus sebagai *agen of change* bagi masyarakat luas.

Ada tiga pendekatan yang dilakukan untuk mewujudkan budaya hemat, yaitu: 1) pendekatan kurikulum; 2) pendekatan sistem; 3) pendekatan fisik.

Kurikulum disusun sedemikian rupa dengan mengintegrasikan "budaya hemat" sumber daya alam ke dalam beberapa mata pelajaran yang relevan. Pendekatan sistem dilakukan untuk mengefektifkan pengawasan dengan membangun sistem rayon yang didukung dengan sistem komputerisasi.

Pendekatan fisik dilakukan untuk membantu merealisasikan penghematan air, listrik, dan alat tulis kantor terutama kertas (Landriany, 2014). Pendekatan fisik yang telah dilakukan untuk penghematan air, listrik, dan kertas: 1) Pemasangan rambu-rambu hemat air dan listrik di tempat-tempat strategis; 2) Pemanfaatan air hujan dan air bekas wudhu; 3). Penggunaan alat pemadam lampu secara otomatis; 4) Pemanfaatan lampu hemat energi; 5) Penggunaan monitor LCD; 6) Pemanfaatan *Net Computing* pada beberapa laboratorium komputer; 7) Pendaaurulan kertas; 8) Pemanfaatan kertas daur ulang dan kertas bekas; 9) pemanfaatan *software paperless exam* untuk ulangan siswa.

Pada saat ini, fokus terhadap sektor lingkungan telah meningkat secara cepat karena para ahli atau penggiat lingkungan menganggap bahwa tren perkembangan zaman (globalisasi) akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan. Perkembangan industri salah satunya akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan ekosistem terhadap makhluk hidup akibat eksploitasi lahan yang digunakan sebagai bahan baku industri tertentu. Para ahli di bidang lingkungan bersepakat bahwa diperlukan adanya upaya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut dengan menyuarakan

semangat pro-peningkatan kualitas kehidupan melalui kebijakan *green eco-tourism*.

Kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu upaya yang sesuai untuk diterapkan, terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan yang akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut dikembangkan oleh para ahli yang fokus terhadap masalah tersebut dengan membentuk beberapa organisasi yang memiliki peran dalam mengeluarkan beberapa bentuk dan jenis piagam penghargaan (*awards*) khususnya dalam bidang lingkungan. Font dan and Tribe (2001)

menyatakan bahwa pada dasarnya bentuk penghargaan (*awards*) khususnya dalam bidang lingkungan secara otomatis akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dalam sektor pariwisata. Pada saat ini, terdapat berbagai macam jenis bentuk penghargaan yang berkembang secara khusus kepada suatu daerah (wilayah), organisasi (swasta atau pemerintah), dan perseorangan.

Penghargaan tersebut dikembangkan sebagai dasar yang ditetapkan dan ditujukan sebagai landasan kepada masing-masing pihak dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta agar dapat memberikan kontribusi yang positif untuk mendukung peningkatan kapasitas lingkungan yang lebih baik. Beberapa model alternatif terkait dengan perencanaan pembangunan perkotaan di beberapa negara dan kota tersebut memiliki keunggulan masing-masing dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan perkotaan yang selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Perumusan perencanaan kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap

kerusakan lingkungan karena pada dasarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercapai selaras dengan pembangunan perkotaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelestarian lingkungan (Basiago, 1999).

Isu lingkungan sangat rumit karena memiliki keterkaitan yang sangat kompleks di antara pertumbuhan ekonomi dan dampak terhadap lingkungan.

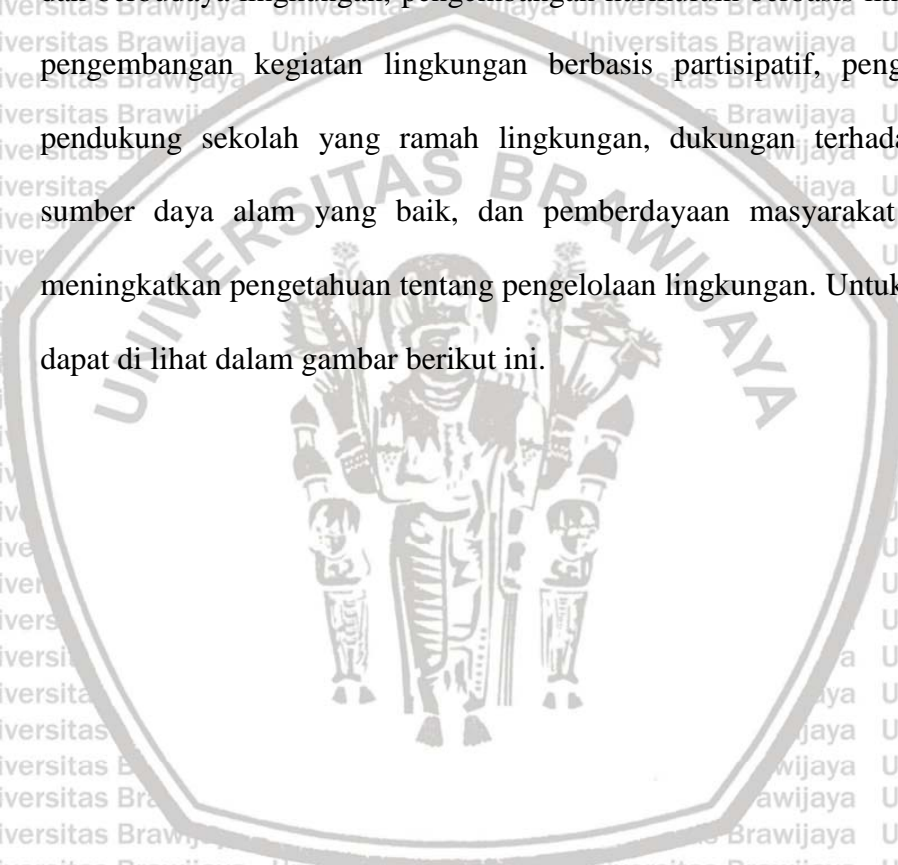
Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi memiliki arti yaitu pemanfaatan sumberdaya yang lebih tinggi tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang luas terhadap generasi selanjutnya. Awan (2013) menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang baik dalam proses pembangunan disuatu negara akan memberikan dampak yang baik khususnya terkait dengan upaya untuk melestarikan lingkungan, sehingga upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diterapkan tidak semena-mena dalam melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumberdaya yang dimiliki.

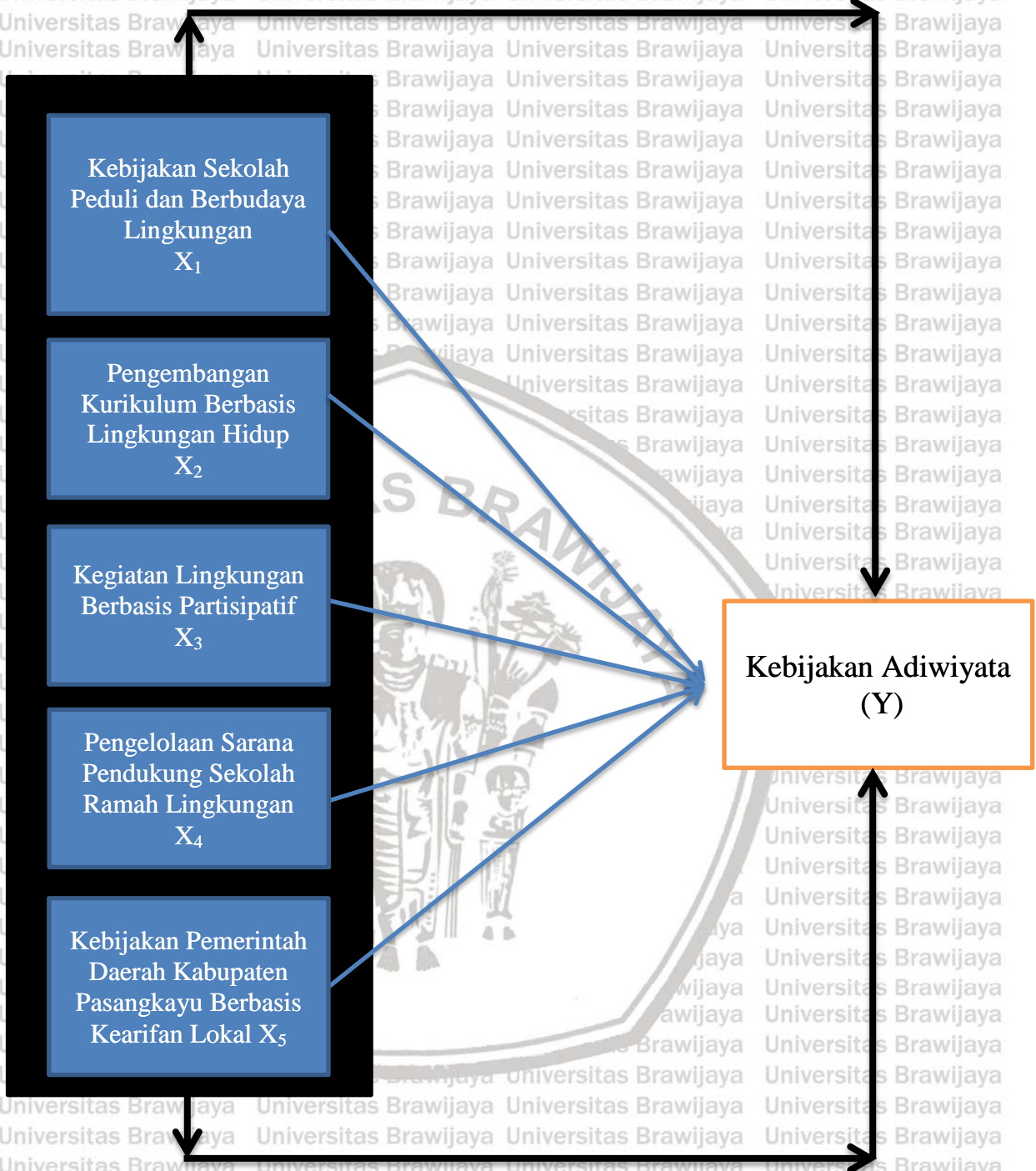
2.3. Kerangka Konseptual

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu adalah Kebijakan Pemerintah Kab. Pasangkayu mendukung pelestarian lingkungan, Visi, Misi, dan Tujuan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pasangkayu mendukung pengembangan pengelolaan lingkungan yang baik, Kebijakan setiap Organisasi Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yaitu melalui program Adiwiyata sebagai salah satu langkah melakukan peningkatan pelestarian lingkungan melalui sektor pendidikan karena pendidikan adalah salah satu variabel

paling penting dalam membentuk perilaku peduli lingkungan, semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin peduli pada permasalahan lingkungan.

Kebijakan adiwiyata adalah program yang komprehensif melibatkan semua *stakeholders* baik di sekolah dan masyarakat untuk membantu meningkatkan kepedulian lingkungan yang memuat kebijakan sekolah mendukung kepedulian dan berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup, pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, pengelolaan sarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan, dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang baik, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, dapat di lihat dalam gambar berikut ini.





Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian seperti yang tertuang pada latar belakang, maka dibangunlah hipotesis deskriptif penelitian yaitu Kebijakan Adiwiyata dipengaruhi oleh: 1) Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan; 2) Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup; 3) Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif; 4) Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan; 5) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu berbasis kearifan lokal

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian seperti yang tertuang pada latar belakang, maka dibangunlah hipotesis statistik penelitian sebagai berikut.

$$1) H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5$$

$$2) H_1 : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5$$

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixed Methods Analysis* (Metode Analisis Kombinasi) yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam satu penelitian (Creswell, 1994). *Mix Methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus baik kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih *valid*, reliabel, dan objektif. Metode analisis kombinasi penelitian ini menggunakan *Sequential Explanatory* yang menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa model penelitian *Sequential Explanatory Design* dicirikan dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama, selanjutnya menganalisis data secara keseluruhan untuk kemudian diambil kesimpulan dari analisis data tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa tahap, yaitu: 1) tahap deskripsi atau orientasi, dalam tahapan ini peneliti mendeskripsikan hasil observasi yang dilanjutkan dengan pendataan terkait dengan informasi yang diperoleh; 2) tahap reduksi, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu; 3) tahap seleksi, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian

melanjutkan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasil dalam proses tahapan tersebut, akan dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh untuk menjadi suatu pengetahuan, konsep, atau teori baru. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif untuk mendeskripsikan korelasi di antara beberapa variabel terkait yaitu Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup, Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif, Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan, dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu terhadap Pengembangan Kebijakan adiwiyata.

3.2 Konsep dan Variabel Penelitian

Sistematika analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teori dan konsep untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Untuk membatasi dan memudahkan penyamaan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran terhadap istilah yang digunakan, maka diperlukan adanya definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan adiwiyata adalah program yang komprehensif melibatkan semua *stakeholders* baik di sekolah dan masyarakat untuk membantu meningkatkan kepedulian lingkungan yang memuat kebijakan sekolah mendukung kepedulian dan berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup, pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, pengelolaan sarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan, dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang baik,

dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan;

2) Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan adalah kebijakan sekolah yang memuat tentang kepedulian dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, kebijakan sekolah dalam pengembangan kurikulum pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, dan kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan rutin tahunan bertema lingkungan hidup;

3) Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup adalah penambahan dan pengembangan materi pendidikan lingkungan hidup berdasarkan isu lokal lingkungan hidup yang ada di wilayah sekitar, upaya penambahan dan pengembangan materi pendidikan lingkungan hidup terkait dengan isu lingkungan hidup global, serta kegiatan kurikuler sekolah yang menghasilkan karya/aksi nyata dalam hal mengimplementasikan hasil pembelajaran yang bertema lingkungan hidup;

4) Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif adalah kegiatan dalam ekstrakurikuler atau kokurikuler yang mendukung pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan hidup peserta didik, kegiatan lingkungan yang diprakarsai oleh sekolah dan melibatkan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah, kegiatan kemitraan yang dilakukan sekolah dengan pihak luar (institusi terkait, pihak swasta atau LSM) dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup;

5) Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan

adalah pemanfaatan sarana pendukung sekolah sebagai media pembelajaran lingkungan hidup, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan, upaya pengelolaan sampah untuk menunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah;

6) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu adalah Kebijakan

Pemerintah Kab. Pasangkayu mendukung pelestarian lingkungan, Visi, Misi, dan Tujuan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pasangkayu mendukung pengembangan pengelolaan lingkungan yang baik, Kebijakan setiap Organisasi Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

3.3 Populasi dan Sampel

Responden dalam penelitian ini adalah Sekretaris dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala dan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu, serta Guru maupun Kepala Sekolah di beberapa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pasangkayu, sehingga secara keseluruhan responden pada penelitian ini berjumlah 90 orang. Kuesioner yang disebarakan berjumlah 90 eksemplar yang diantar langsung pada masing-masing kantor OPD. Kuesioner mulai tersebar sejak Bulan April 2019 sampai dengan Juli 2019. Jumlah kuesioner yang telah terisi dan telah kembali untuk diolah sebanyak 90 eksemplar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan, yaitu: 1) Angket tertutup yang sudah disediakan jawabannya, maka responden tinggal memilih jawabannya. Angket penelitian merupakan Angket tertutup, langsung dan menggunakan modifikasi skala *likert* sebagai dasar yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Alternatif jawaban dalam angket ini ditetapkan skor yang diberikan untuk masing-masing pilihan dengan menggunakan modifikasi skala likert atau alternatif netral dihilangkan dengan maksud agar responden memberikan jawaban secara mantap; 2) studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan sebelum turun ke lokasi penelitian dengan cara menelusuri dan membaca referensi yang erat kaitnya dengan kebutuhan penelitian, termasuk dalam mencari teori-teori yang terjadi dilapangan; 3) studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan penelusuran data sekunder, yaitu mencari data yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan; 4) Wawancara atau *interview*, akan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan dua tahap yaitu wawancara pendahuluan untuk menciptakan keakraban antara peneliti dan informan dan wawancara mendalam dengan menggunakan buku catatan, alat pemotret, dan *tape recorder* untuk merekam berbagai data dan informasi sepanjang tidak mengganggu dalam wawancara.

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.5.1 Uji Validitas

Sebuah instrumen dikatakan valid, jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat, Ghozali (2007: 45). Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Kesahihan sangat berkaitan dengan ketepatan hasil pengukuran alat ukur. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk memperoleh alat ukur yang sah yaitu dengan menentukan *construct* item-item berdasarkan konsep operasional variabel beserta indikatornya. Langkah berikutnya dengan analisis uji coba item dengan menguji korelasi antara skor tiap item dengan skor total item. Uji validitas dilakukan dengan analisis item. Setiap nilai yang diperoleh untuk masing-masing item dikorelasikan dengan nilai total seluruh item variabel. Uji korelasi yang digunakan adalah korelasi *product moment* dengan syarat minimum suatu item dianggap valid adalah nilai $r \geq 0,30$, Sugiyono (2013 :178). Uji validitas variabel-variabel tersebut dilakukan dengan melihat *pearson corelation* dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS versi 22.00.

3.5.2 Uji Reabilitas

Reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner tersebut konsisten apabila digunakan untuk mengukur gejala yang sama di lain tempat. Perlu diketahui bahwa yang diuji reliabilitas hanyalah nomor soal yang sah saja. Metode yang biasa digunakan untuk uji kehandalan adalah teknik ukur ulan dan teknik sekali

ukur. Teknik sekali ukur terdiri atas teknik genap gasal, belah tengah, belah acak, *kuder richardson*, teknik *hojd* dan *alpha cronbach*.

Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, Nunally dalam Ghozali (2007:42). Uji validitas variabel-variabel tersebut dilakukan dengan melihat *cronbach alpha* dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS versi 22.00.

3.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengembangan kebijakan adiwiyata berbasis kearifan lokal oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Penelitian tersebut secara umum akan melakukan analisis terhadap kebijakan peningkatan kualitas lingkungan melalui program pendidikan lingkungan dalam kebijakan adiwiyata. Secara spesifik penelitian ini akan menganalisis permasalahan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengembangkan model kebijakan adiwiyata yang diimplementasikan baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Wilayah Kabupaten Pasangkayu.

3.7 Jadwal Penelitian

Adapun waktu penelitian telah dilaksanakan dari Bulan September hingga Desember Juli 2018, dengan matriks penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Rincian Tahap Pekerjaan	Bulan / Tahun															
		September 2018				Oktober 2018				November 2018				Desember 2018			
		Minggu Ke															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	■															
2	Perencanaan		■	■													
3	Pelaksanaan Siklus I				■	■	■	■									
4	Pelaksanaan Siklus II							■	■	■	■	■					
5	Pelaksanaan Siklus III											■	■	■	■		
6	Pengolahan Data													■	■	■	
7	Penyusunan Laporan																■

3.8 Teknik Analisis Data

Penggunaan analisis SWOT dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor internal program pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu sehingga diketahui apa saja faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Disamping menganalisis faktor internal juga dilakukan analisis faktor-faktor eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan dari hasil analisis SWOT, diperoleh alternatif- alternatif kebijakan terpilih dalam mengambil keputusan strategis.

Dalam melakukan analisis SWOT, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai melakukan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal serta analisis data.

Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Kegiatan pertama yang dilakukan dalam analisis SWOT adalah identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang merupakan tahapan penting karena merupakan dasar untuk kegiatan analisis selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan faktor-faktor internal dan eksternal, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur kepustakaan, dokumen-dokumen, serta wawancara langsung dengan berbagai pihak (narasumber) yang diyakini mengetahui (*expert*) permasalahan yang sedang diteliti. Pada tahap ini peneliti menggunakan dua model, yaitu matrik faktor strategi eksternal dan matrik faktor strategi internal. Berdasarkan hasil penilaian faktor-faktor internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, kesempatan dan peluang dari *stakeholder*. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*). Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*), yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan antara kondisi internal yaitu kekuatan dan kelemahan dengan kondisi eksternal yaitu peluang dan ancaman yang ada, kemudian diimplementasikan dalam matriks SWOT, untuk mendapatkan beberapa strategi terbaik (*the best strategy*).



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Sulawesi. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah diperjuangkan sejak tahun 1960. Pada masa itu pulau Sulawesi terdapat 3 (tiga) Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara. Namun, pada tahun 1963 Pemekaran Provinsi di pulau Sulawesi oleh pemerintah pusat adalah pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara. Usulan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak disetujui Pemerintah Pusat.

Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kembali menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca gerakan reformasi. Pembentukan Provinsi Baru di Indonesia seperti Terbentuknya Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Gorontalo menjadi semangat gerakan perjuangan pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui upaya massif rakyat Mandar dengan didukung oleh Anggota DPR RI melalui usulan Hak Inisiatif Anggota DPR RI tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Tanggal 5 Oktober 2004 Provinsi Sulawesi Barat Resmi terbentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 dan Ibukotanya adalah Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km². Suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%).

Pada masa penjajahan, wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah bagian dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama *Afdeling Mandar* yang meliputi empat onder afdeling, yaitu:

1. Onder Afdeling Majene beribukota Majene;
2. Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju;
3. Onder Afdeling Polewali beribukota Polewali;
4. Onder Afdeling Mamasa beribukota Mamasa.

Onder Afdeling Majene, Mamuju dan Polewali yang terletak di sepanjang garis pantai barat pulau Sulawesi mencakup 7 wilayah kerajaan (Kesatuan Hukum Adat) yang dikenal dengan nama *Pitu Baqbana Binanga* (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai) yang meliputi:

1. Balanipa di Onder Afdeling Polewali(dipimpin oleh Ambo Caca Daeng Magasing);
2. Binuang di Onder Afdeling Polewali;
3. Sendana di Onder Afdeling Majene;
4. Banggae/Majene di Onder Afdeling Majene;
5. Pamboang di Onder Afdeling Majene;
6. Mamuju di Onder Afdeling Mamuju;
7. Tappalang di Onder Afdeling Mamuju.

4.2. Gambaran Umum Kabupaten Pasangkayu

Aspek geografis dalam ilmu sejarah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada suatu tempat tertentu, bahkan menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pola hidup suatu masyarakat. Kondisi geografis suatu wilayah sangat menentukan kehidupan masyarakat setempat seperti halnya kehidupan masyarakat transmigran Bali di Kelurahan Martayaja Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu. Keadaan

geografis pula menentukan pola interaksi masyarakat dan bahkan kegiatan-kegiatan ekonomi suatu wilayah juga dipengaruhi oleh keadaan geografis dari wilayah tersebut. Dasar Pembentukan UU No. 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Pasangkayu terletak pada koordinat antara 3o 39' sampai 4o 16' Lintang Selatan dan 119o 53' sampai 120 o27' Bujur Timur. Luas 3.043,75 Km² .1 Kabupaten Pasangkayu beribukotakan Pasangkayu.

Kabupaten Pasangkayu dengan Ibukota Pasangkayu termasuk kabupaten termuda dan terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pasangkayu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju terletak 719 kilometer dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang sekarang sudah menjadi Provinsi Sulawesi Barat yang dimekarkan pada tahun 2004. Adapun dari Palu Ibukota Sulawesi Tengah dengan jarak 130 Km, waktu tempuh sekitar 3 jam. Dengan waktu tempuh yang lebih dekat itu membuat sebagian masyarakat apabila ingin ibukota provinsi memilih ke Palu terlebih dahulu kemudian naik pesawat ke Makassar. Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu 3.043,75 Km² . Kabupaten Pasangkayu merupakan gabungan dari Kecamatan Pasangkayu bersama Kecamatan Sarudu, Baras dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001.

Jarak Pasangkayu yang juga ibukota kabupaten dengan mantan induk sekitar 276 Kilometer. Jarak yang tidak jauh itu menghabiskan waktu tempuh 8-9 jam. Kondisi jalan dengan sekitar 30 persen berlubang ini mengakibatkan banyak waktu terbuang. Sebagian besar permukaan jalan terdiri dari kerikil bercampur

tanah. Permukaan yang beraspal yang beraspal kasar, terkelupas disana-sini.

Kondisi ini berbeda 180 derajat dengan jalan beraspal mulus yang menghubungkan Makassar, ibukota provinsi dengan Mamuju. Meski jaraknya lebih jauh, 443 Kilometer, waktu tempuh nyaris sama 8 jam. Tidak mengherankan 20 bila perjalanan Makassar Mamuju lebih bisa dinikmati dengan perjalanan dari Mamuju ke Pasangkayu.

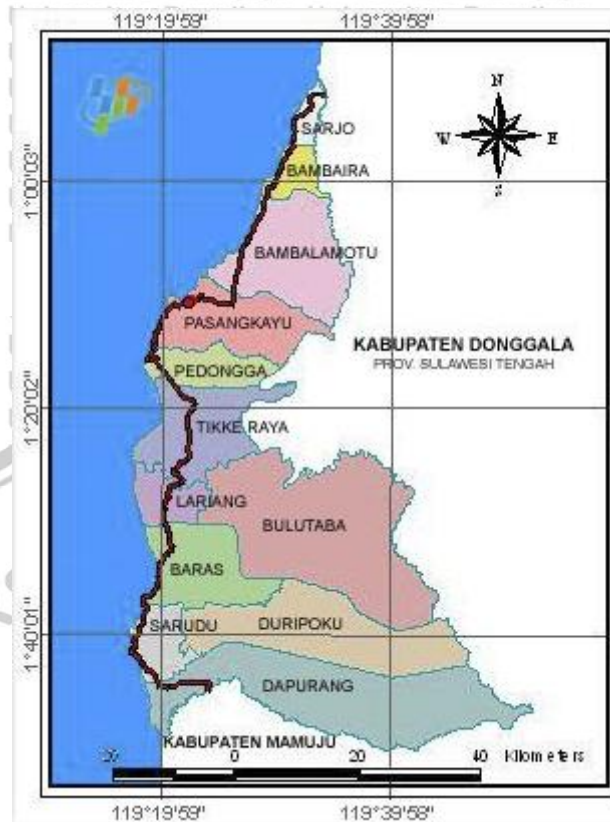
Kabupaten Pasangkayu adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasangkayu. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terletak 719 km ke sebelah utara dari Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001, Sekarang jumlah Kecamatan bertambah menjadi 12, yaitu dengan memekarkan kecamatan induk masing-masing 2 kecamatan, Kecamatan Pasangkayu dimekarkan menjadi Kecamatan Pedongga dan Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Sarudu ditambah Kecamatan Dapurang dan Duripoku, Kecamatan Baras bertambah dengan Kecamatan Bulu Taba dan Kecamatan Lariang, Kecamatan Bambalamotu ditambah dengan Kecamatan Bambaيرا dan Kecamatan Sarjo.

Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu 3.043,75 Km². Secara geografis, Kabupaten Pasangkayu terletak pada titik koordinat antara 3°39' sampai 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' sampai 120°27' Bujur Timur dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala,

Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kabupaten Pasangkayu dengan ibu kota Pasangkayu, termasuk kabupaten termuda dan terletak di bagian Utara Sulawesi Barat. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Kabupaten ini merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu bersama kecamatan Sarudu, Baras, dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001.

4.2.1. Letak Geografis Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten Pasangkayu terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Barat atau pada bagian barat dari Pulau Sulawesi Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasangkayu. Kabupaten Pasangkayu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terletak 719 km dari Makassar. Secara geografis terletak pada posisi $0^{\circ} 40' 10'' - 10^{\circ} 50' 12''$ Lintang Selatan, $119^{\circ} 25' 26'' - 119^{\circ} 50' 20''$ Bujur Timur dari Jakarta, ($0^{\circ} 0' 0''$ Jakarta = $160^{\circ} 48' 28''$ Bujur Timur *Green Wich*). Kabupaten Pasangkayu dibatasi oleh Utara adalah Kabupaten Donggala; Timur adalah Kabupaten Luwu Utara; Selatan adalah Kabupaten Mamuju; Barat adalah Selat Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Pasangkayu
 Sumber: Bappeda Kab. Pasangkayu (2018)

Kabupaten Pasangkayu dengan luas wilayah 304.375 Ha yang secara administrasi pemerintahan pada tahun 2007 terbagi atas 11 kecamatan, terdiri dari 63 desa. Kecamatan Baras merupakan kecamatan terluas yaitu 53.631 Ha atau 17,62% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Pasangkayu, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pedongga yaitu 3.011 Ha (0,69%). Jarak antara kecamatan dengan ibukota kabupaten yang paling jauh adalah Kecamatan Duripoku dengan ibukota Tammarunang yang berjarak sekitar 101 km dari Pasangkayu, sedangkan kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Pedongga yang beribukota di Malei yang berjarak sekitar 15 km dari Pasangkayu.

4.3. Penduduk Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten ini berpenduduk 100.227 jiwa dimana 53.153 adalah laki-laki dan sisanya 47.074 jiwa adalah wanita. Populasi tersebut tersebar di 4 kecamatan dengan total luas wilayah 304.375 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu pada pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut adalah 110 446 jiwa, 130 991 jiwa dan 143 163 jiwa (Pasangkayu dalam Angka, 2014). Jumlah penduduk mengalami peningkatan sejalan dengan waktu. Secara keseluruhan, jumlah penduduk paling besar berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebesar 12.315 jiwa. Jenis kelamin dari penduduk Kabupaten Pasangkayu lebih besar laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin masing-masing kecamatan yang mempunyai nilai lebih dari 100. Pada Tahun 2013 penduduk Kabupaten Pasangkayu tertinggi berada di Kecamatan Pasangkayu yaitu sebesar 18.394 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Pedongga yaitu 6 580 jiwa. Namun demikian, kecamatan kepadatan penduduk sebesar 25,27 jiwa per km². Sementara kepadatan penduduk Kecamatan Pasangkayu sendiri sebesar 82,56 jiwa per km² dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Sarjo dengan kepadatan penduduk sebesar 25,27 jiwa per km². Sementara kepadatan penduduk Kecamatan Pasangkayu sendiri sebesar 82,56 jiwa per km².

4.4. Visi dan Misi Kabupaten Pasangkayu

4.4.1. Visi

Mencermati arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahap ke-3, masalah pokok dan tantangan pembangunan yang akan

dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu periode tahun 2016 - 2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman”

Visi ini menekankan pada tiga hal mendasar, yaitu kesejahteraan, kemajuan dan kemartabatan. Kesejahteraan dipandang dari perspektif masyarakat/komunitas, dan Kemajuan dilihat dari perspektif daerah/wilayah, sedangkan kemartabatan dilihat dari perpektif penyelenggaraan pemerintahan. Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan membaiknya taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan, yang dilihat dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan serta mental spiritual. Kemajuan daerah dicirikan oleh meningkatnya kinerja pembangunan infrastruktur daerah. Adapun kemartabatan penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Sedangkan keberagaman, ditempatkan sebagai substansi penting bagi pencapaian ketiga dimensi pembangunan tersebut. Keberagaman merupakan potensi sekaligus landasanyang mewarnai seluruh elemen kunci Visi. Kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, dan kemartabatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diraih melalui pemerataan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh kelompok dan golongan tanpa diskriminasi/inklusifitas.

4.4.2. Misi

Upaya perwujudan visi pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu 2021 dijabarkan dalam 3 misi pembangunan yang disebut sebagai Tri-Smart sebagai berikut:

1. **Misi Kesejahteraan.** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan akses penduduk terhadap berbagai layanan publik, serta pembangunan mental spiritual.
2. **Misi Kemajuan.** Mewujudkan kemajuan daerah dengan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi sumberdaya lokal dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan daerah.
3. **Misi Kemartabatan.** Mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif, dan inklusif serta melayani dengan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan dimaksud juga harus terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*).

Tabel 4.1 Matriks Sinkronisasi antara Visi dan Misi

No.	RUMUSAN MISI	POKOK – POKOK VISI
1	Misi Kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan akses penduduk terhadap berbagai layanan publik, serta pembangunan mental spiritual.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2	Misi Kemajuan. Mewujudkan kemajuan daerah dengan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi sumberdaya lokal dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam pembangunan daerah.	Mewujudkan kemajuan daerah
3	Misi Kemartabatan. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif, dan inklusif serta melayani dengan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). Pemerintahan dimaksud juga harus terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (<i>clean government</i>).	Mewujudkan kemartabatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

4.4.3. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan Visi dan Misi pembangunan 2021 serta isu-isu strategis daerah Pasangkayu, maka tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terwujudnya kemajuan daerah yang berdaya saing, dan bermartabatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dan bersih.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, maka sasaran utama sekaligus indikator dan target kinerja utama yang akan dicapai dikelompokkan kedalam tujuh substansi penting, yaitu :

Pertama, meningkatnya daya saing dan daya tarik wilayah. Target utama kami adalah meningkatnya nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), berkembangnya kegiatan agribisnis dan agro-industri, bertambahnya jumlah UMKM, koperasi, dan lembaga keuangan, serta meningkatnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB Pasangkayu.

Kedua, membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015 adalah 64,69 persen dan ditargetkan dalam lima tahun ke depan, meningkat sebesar 2 persen menjadi diatas 66 persen pada tahun 2021.

Ketiga, meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika pendapatan per kapita dijadikan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan, maka tampak jelas bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Pasangkayu berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Barat. Angka pendapatan per kapita Tahun 2015 Kabupaten Pasangkayu sebesar Rp 48,61 juta, sehingga

peningkatan pendapatan per kapita ditargetkan dua kali lipat pada tahun 2021.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, diupayakan pertumbuhan ekonomi rata-rata tumbuh di kisaran diatas 10 % per tahun, atau berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi rata-rata dikisaran 3%. Kedua aspek ini juga sekaligus menjadi target kinerja utama pemerintahan kami pada tahun 2021.

Keempat, menurunnya persentase penduduk miskin. Upaya menurunkan secara bertahap persentase penduduk miskin hingga tahun 2021 hanya tersisa di bawah 4 persen. Target utama ini akan dapat diwujudkan jika target pertumbuhan ekonomi, target pendapatan per kapita, dan target tingkat pengangguran dapat dicapai.

Kelima, optimalnya pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selama lima tahun ke depan, upaya memastikan bahwa semua anak usia sekolah, pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA benar-benar duduk di bangku sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2021 masing-masing telah mencapai 99 persen dan 90 persen. Selain itu, target cakupan keseluruhan pelayanan kesehatan masyarakat terus dilanjutkan, sehingga angka harapan hidup masyarakat dapat mencapai 66 tahun.

Keenam, berkembangnya infrastruktur dasar. Membaiknya kualitas jalan, meningkatnya mobilitas orang dan barang, serta meningkatnya akses penduduk terhadap air bersih dan energi listrik menjadi sasaran utama dalam lima tahun ke

depan, hingga 60 persen dari total panjang jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap (baik dan sedang).

Ketujuh, membaiknya tata-kelola pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah menargetkan pada semua perangkat daerah (SKPD) sudah melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada publik. Masyarakat semakin terlibat, berpartisipasi, dan memiliki akses yang semakin baik terhadap perumusan dan implementasi kebijakan publik. Kasus dan praktek KKN akan berkurang secara signifikan. Semua dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Pelayanan publik dasar sudah mampu menjangkau seluruh masyarakat tanpa kecuali.

4.5. Daftar Sekolah Adiwiyata

Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat. Di Kabupaten Pasangkayu terdapat 135 sekolah dasar dan 48 sekolah menengah pertama di mana setiap sekolah tersebut hanya terdapat beberapa sekolah yang terkategori masuk ke dalam sekolah adiwiyata kabupaten, provinsi, dan nasional. Belum ada sekolah baik SD maupun SMP yang berhasil mencapai adiwiyata mandiri di Kabupaten Pasangkayu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Daftar Sekolah Dasar Kategori Adiwiyata

No.	Nama Satuan Pendidikan Dasar	Status	Kecamatan	Jumlah Siswa	Adiwiyata	Keterangan
1	2	5	6	11		
SEKOLAH DASAR						
1	SD INPRES AKO	Negeri	KEC. PASANGKAYU	361	Calon Adiwiyata	2017
2	SD INPRES TANJUNG BABIA	Negeri	KEC. PASANGKAYU	158	Calon Adiwiyata	2016
3	SDN PASANGKAYU	Negeri	KEC. PASANGKAYU	1012	Nasional	2015
4	SDN SALUNGGADUE	Negeri	KEC. PASANGKAYU	171	Calon Adiwiyata	2016
5	SD PT. PASANGKAYU	Swasta	KEC. PASANGKAYU	535	Nasional	2014
6	SD NEGERI 02 PASANGKAYU	Negeri	KEC. PASANGKAYU	260	Kabupaten	2016
7	SD INPRES SARUDU I	Negeri	KEC. SARUDU	213	Calon Adiwiyata	2017
8	SDN NUNU	Negeri	KEC. SARUDU	368	Calon Adiwiyata	2018
9	SDN BAMBALAMOTU	Negeri	KEC. BAMBALAMUTU	372	Calon Adiwiyata	2016
10	SDN SIPAKAINGA	Negeri	KEC. DURIPOKU	37	Calon Adiwiyata	2017
11	SD INPRES LELEJAE	Negeri	KEC. BULU TABA	122	Calon Adiwiyata	2018
12	SDN BIAI	Negeri	KEC. BULU TABA	123	Calon Adiwiyata	2017
13	SD INPRES PIRSUS TIKKE	Negeri	KEC. TIKKE RAYA	349	Calon Adiwiyata	2016
14	SDN MAKMUR JAYA	Negeri	KEC. TIKKE RAYA	159	Calon Adiwiyata	2017
15	SD INPRES BATUOGE	Negeri	KEC. PEDONGGA	216	Calon Adiwiyata	2017
16	SD INPRES KALUKU NANGKA	Negeri	KEC. BAMBALAMUTU	145	Calon Adiwiyata	2018
17	SDN BALABONDA	Negeri	KEC. SARJO	176	Calon Adiwiyata	2017
18	SDN LETAWA	Negeri	KEC. SARJO	209	Kabupaten	2016
19	SDN UJUNG SOLI	Negeri	KEC. SARJO	167	Calon Adiwiyata	2017
20	SDN MAPONU BARU	Negeri	KEC. SARJO	110	Calon Adiwiyata	2018

Berdasarkan tabel tersebut ditemukan bahwa terdapat 16 sekolah dasar yang telah memasuki kategori sekolah calon adiwiyata baik dari Tahun 2016, 2017, hingga 2018. Demikian halnya dengan sekolah dasar di Kabupaten Pasangkayu yang masuk ke dalam kategori sekolah adiwiyata kabupaten terdapat dua sekolah yaitu SDN Letawa dengan SDN 02 Pasangkayu. Sedangkan, sekolah yang masuk ke dalam kategori sekolah adiwiyata nasional yaitu SDN Pasangkayu dan SD PT. Pasangkayu. Selain itu juga terdapat beberapa sekolah menengah pertama di Kabupaten Pasangkayu yang berhasil mendapat kategori sekolah adiwiyata. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Daftar Sekolah Menengah Pertama Kategori Adiwiyata

No.	Nama Satuan Pendidikan	Status	Kecamatan	Siswa	Adiwiyata	Keterangan
1	SMP NEGERI 1 PASANGKAYU	Negeri	Kec. Pasangkayu	511	Calon Adiwiyata	2016
2	SMP PT. PASANGKAYU	Swasta	Kec. Pasangkayu	360	Nasional	2015
5	SMP NEGERI 04 PASANGKAYU	Negeri	Kec. Pasangkayu	201	Kabupaten	2017
8	SMP NEGERI 01 SARUDU	Negeri	Kec. Sarudu	267	Calon Adiwiyata	2016
13	SMPN 20 DODA	Negeri	Kec. Sarudu	119	Calon Adiwiyata	2017
18	SMP NEGERI 01 BAMBALAMOTU	Negeri	Kec. Bambalamutu	397	Calon Adiwiyata	2016
19	SMP NEGERI 02 BAMBALAMOTU	Negeri	Kec. Bambalamutu	219	Calon Adiwiyata	2016
33	SMPN 24 SAPTANAJAYA	Negeri	Kec. Duripoku	87	Calon Adiwiyata	2017
34	SMP NEGERI 01 BULUTABA	Negeri	Kec. Bulu Taba	340	Calon Adiwiyata	2015
40	SMP ASTRA MAKMUR JAYA	Swasta	Kec. Tikke Raya	472	Nasional	2014
43	SMP NEGERI 01 PEDONGGA	Negeri	Kec. Pedongga	258	Kabupaten	2015

Berdasarkan tabel tersebut ditemukan bahwa terdapat 7 sekolah yang telah memasuki kategori sekolah calon adiwiyata baik dari Tahun 2016 dan 2017.

Demikian halnya dengan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pasangkayu yang masuk ke dalam kategori sekolah adiwiyata kabupaten terdapat dua sekolah yaitu SMP Negeri 04 Pasangkayu dengan SMP 01 Pedongga. Sedangkan, sekolah yang masuk ke dalam kategori sekolah adiwiyata nasional yaitu SMP PT. Pasangkayu pada Tahun 2015 dan SMP Astra Makmur Jaya pada Tahun 2014.

Selain itu juga terdapat beberapa sekolah menengah pertama di Kabupaten Pasangkayu yang berhasil mendapat kategori sekolah adiwiyata. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagi kuesioner, ditambah data-data pendukung lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah memenuhi kriteria sampel dalam Bab III. Hasil pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua, yaitu deskripsi kuesioner dan deskripsi responden. Adapun deskripsi kuesioner dan deskripsi responden akan diuraikan sebagai berikut:

5.1.1. Deskripsi Kuesioner

Responden dalam penelitian ini adalah Sekretaris dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala dan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu, serta Guru maupun Kepala Sekolah di beberapa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pasangkayu, sehingga secara keseluruhan responden pada penelitian ini berjumlah 90 orang. Kuesioner yang disebarakan berjumlah 90 eksemplar yang diantar langsung pada masing-masing kantor OPD. Kuesioner mulai tersebar sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018. Jumlah kuesioner yang telah terisi dan telah kembali untuk diolah sebanyak 90 eksemplar. Berdasarkan sebaran kuesioner yang telah disebarakan maka deskripsi kuesioner sebagai berikut.

Tabel 5.1 Deskripsi Kuesioner

Kuesioner yang disebar	Kuesioner yang tidak kembali		Kuesioner yang kembali		Kuesioner yang gugur		Kuesioner yang dapat diolah
90	0	0,00 %	0	0,00 %	-	-	90

Sumber: Data diolah peneliti Tahun 2018

5.1.2. Demografi Responden

Demografi responden diperoleh melalui data pribadi responden pada kuesioner. Adapun pengelompokkan data responden terdiri dari jabatan, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, usia, dan masa kerja. Tabel 5.2 akan mendeskripsikan mengenai karakteristik responden dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 5.2 Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)
Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	64
2. Perempuan	26
Lama Menjabat	
1. <=1 tahun	25
2. <=2 tahun	22
3. <=3 tahun	18
4. >3tahun	25
Tingkat Pendidikan	
1. S3 & Dokter	0
2. S2	26
3. S1	35
4. SMA/D3	29

Sumber: Data diolah peneliti Tahun 2018

Berdasarkan jenis kelamin mayoritas responden ialah perempuan sebanyak 26 orang dan laki-laki sebanyak 64 orang. Berdasarkan lama menjabat (jabatan saat mengisi kuesioner) mayoritas responden memiliki pengalaman kerja selama

≤ 3 tahun, sebanyak 22 responden memiliki pengalaman kerja selama ≤ 2 tahun, sebanyak 25 responden yang berpengalaman selama > 3 tahun dan terakhir responden yang berpengalaman kerja selama ≤ 1 tahun sebanyak 25 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 35 orang, S2 sebanyak 26, S3 sebanyak 0 orang dan minoritas responden berpendidikan D3 dan SMA sebanyak 29 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka berpeluang untuk menduduki jabatan struktural maupun fungsional dan semakin lama seseorang menduduki suatu jabatan maka semakin banyak pula pengalaman serta informasi yang dibutuhkan terkait penelitian ini.

5.1.3. Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk mengungkapkan hasil tabulasi jawaban responden yang berjumlah 90 responden dengan setiap item pernyataan berdasarkan indikator-indikator yang telah diuraikan pada bab metode penelitian. Variabel Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1) terdiri dari 8 item pernyataan, Variabel Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2) terdiri dari 6 item pernyataan, Variabel Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X_3) terdiri dari 4 item pernyataan, Variabel Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X_4) terdiri dari 6 item pertanyaan, Variabel Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu berbasis kearifan lokal (X_5) terdiri dari 6 pertanyaan dan Variabel Kebijakan adiwiyata (Y) terdiri dari 8 pertanyaan. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan uraian secara deskriptif setiap variabel penelitian.

5.1.3.1. Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X₁)

Hasil tabulasi yang diperoleh dari setiap responden dengan 8 item pernyataan tentang Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan untuk menentukan nilai dari setiap skor jawaban responden melalui tabulasi frekuensi, dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Tabulasi Frekuensi Responden (X₁)

No Item	Skor Frekuensi Jawaban Responden																Total Skor
	SS	%	Skor	S	%	Skor	RR	%	Skor	TS	%	Skor	STS	%	Skor	N	
	5			4			3			2			1				
1	22	24,44	110,00	60	66,67	240,00	8	8,89	24,00	2	2,22	4,00	1,00	0,26	1,00	90,00	379,00
2	26	28,89	130,00	52	57,78	208,00	13	14,44	39,00	3	3,33	6,00	0,00	0,00	0,00	90,00	383,00
3	20	22,22	100,00	62	68,89	248,00	8	8,89	24,00	3	3,33	6,00	0,00	0,00	0,00	90,00	378,00
4	21	23,33	105,00	61	67,78	244,00	9	10,00	27,00	2	2,22	4,00	0,00	0,00	0,00	90,00	380,00
5	25	27,78	125,00	53	58,89	212,00	12	13,33	36,00	4	4,44	8,00	0,00	0,00	0,00	90,00	381,00
6	20	22,22	100,00	62	68,89	248,00	8	8,89	24,00	1	1,11	2,00	2,00	0,53	2,00	90,00	376,00
7	21	23,33	105,00	53	58,89	212,00	12	13,33	36,00	8	8,89	16,00	0,00	0,00	0,00	90,00	369,00
8	18	20,00	90,00	55	61,11	220,00	14	15,56	42,00	8	8,89	16,00	0,00	0,00	0,00	90,00	368,00
Total	134,00	148,89	670,00	350,00	388,89	1400,00	58,00	64,44	174,00	15,00	16,67	30,00	3,00	0,79	3,00	540,00	2277,00

Tabel 5.3 menggambarkan pengukuran Variabel Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang berasal dari responden. Skor tertinggi adalah pernyataan nomor 2 yang merupakan salah satu pernyataan indikator 1 dari beberapa indikator. Pernyataan tersebut adalah “kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan rutin” dengan total skor 383. Rinciannya yaitu 26 responden atau 28,89 % menjawab sangat setuju, 52 responden atau 57,78 % menjawab setuju, 13 responden atau 14,44 % menjawab ragu-ragu, 3 responden atau 3,33 % menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hasil dari jawaban pada pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa di keseluruhan sekolah telah melaksanakan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan

terkait dengan kegiatan yang berbasis pengelolaan lingkungan misalnya kebersihan lingkungan rutin yang dijalankan baik oleh siswa, guru, maupun masyarakat sekitar.

Pernyataan nomor 8 yang merupakan pernyataan indikator dari beberapa indikator berbunyi “kebijakan sekolah untuk merencanakan kegiatan dan mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pengembangan yang terkait dengan pendidikan” merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 368. Rinciannya yaitu 18 responden atau 20,00 % menjawab sangat setuju, 55 responden atau 61,11 % menjawab setuju, 14 responden atau 15,56 % menjawab ragu-ragu, 8 responden atau 8,89 % menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa sekolah belum menerapkan kebijakan seperti program kegiatan yang memberikan alokasi anggaran yang cukup terhadap kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Hasil olahan data tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan sekolah di Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan terkait dengan kegiatan yang berbasis pengelolaan lingkungan misalnya kebersihan lingkungan rutin yang dijalankan baik oleh siswa, guru, maupun masyarakat sekitar. Namun, belum menerapkan kebijakan seperti program kegiatan yang memberikan alokasi anggaran yang cukup terhadap kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

5.1.3.2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X₂)

Hasil tabulasi yang diperoleh dari setiap responden dengan 8 item pernyataan tentang Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan untuk menentukan nilai dari setiap skor jawaban responden melalui tabulasi frekuensi, dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4 Tabulasi Frekuensi Responden (X₂)

No Item	Skor Frekuensi Jawaban Responden															Total Skor	
	SS	%	Skor	S	%	Skor	RR	%	Skor	TS	%	Skor	STS	%	Skor		N
	5			4			3			2			1				
1	26	28,89	130	52	57,78	208	13	14,44	39	3	3,33	6	0	0	0	90	383
2	21	23,33	105	53	58,89	212	12	13,33	36	8	8,89	16	0	0	0	90	369
3	20	22,22	100	62	68,89	248	8	8,89	24	3	3,33	6	0	0	0	90	378
4	21	23,33	105	61	67,78	244	9	10	27	2	2,22	4	0	0	0	90	380
5	25	27,78	125	53	58,89	212	12	13,33	36	4	4,44	8	0	0	0	90	381
18	18	20	90	55	61,11	220	14	15,56	42	8	8,89	16	0	0	0	90	368
Total	131	145,55	655	336	373,34	1344	68	75,55	204	28	31,1	56	0	0	0	540	2259

Tabel 5.4 menggambarkan pengukuran Variabel Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup yang berasal dari responden. Skor tertinggi adalah pernyataan nomor 1 yang merupakan salah satu pernyataan dari beberapa indikator. Pernyataan tersebut adalah “pengembangan kurikulum pembelajaran pendidikan lingkungan hidup sudah dilaksanakan dengan baik dan benar” dengan total skor 383. Rinciannya yaitu 26 responden atau 28,89 % menjawab sangat setuju, 52 responden atau 57,78 % menjawab setuju, 13 responden atau 14,44 % menjawab ragu-ragu, 3 responden atau 3,33 % menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa beberapa sekolah di Kabupaten Pasangkayu telah melakukan pengembangan kurikulum pembelajaran pendidikan

lingkungan hidup sudah dilaksanakan dengan baik dan benar.

Pernyataan nomor 6 yang merupakan pernyataan indikator dari beberapa indikator berbunyi “terdapat kegiatan kurikuler sekolah yang menghasilkan karya/aksi nyata dalam hal mengimplementasikan hasil pembelajaran yang bertema lingkungan hidup dalam 3 tahun terakhir” merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 368. Rinciannya yaitu 18 responden atau 20,00 % menjawab sangat setuju, 55 responden atau 61,11 % menjawab setuju, 14 responden atau 15,56 % menjawab ragu-ragu, 8 responden atau 8,89 % menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa beberapa sekolah di Kabupaten Pasangkayu belum secara maksimal menerapkan kebijakan maupun program sekolah yang dapat menghasilkan karya/aksi nyata dalam hal mengimplementasikan hasil pembelajaran yang bertema lingkungan hidup dalam 3 tahun terakhir.

Hasil olahan data tersebut berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan bahwa beberapa sekolah di Kabupaten Pasangkayu telah melakukan pengembangan kurikulum pembelajaran pendidikan lingkungan hidup sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Namun, belum secara maksimal menerapkan kebijakan maupun program sekolah yang dapat menghasilkan karya/aksi nyata dalam hal mengimplementasikan hasil pembelajaran yang bertema lingkungan hidup dalam 3 tahun terakhir.

5.1.3.3. Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X₃)

Hasil tabulasi yang diperoleh dari setiap responden dengan 4 item pernyataan tentang Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif untuk menentukan nilai dari setiap skor jawaban responden melalui tabulasi frekuensi, dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5 Tabulasi Frekuensi Responden (X₃)

No Item	Skor Frekuensi Jawaban Responden																Total Skor
	SS	%	Skor	S	%	Skor	RR	%	Skor	TS	%	Skor	STS	%	Skor	N	
	5			4			3			2			1				
1	23	25,56	115,00	41	45,56	164,00	18	20,00	54,00	11	12,22	22,00	1	1,11	1,00	90,00	356,00
2	17	18,89	85,00	52	57,78	208,00	15	16,67	45,00	10	11,11	20,00	0	0,00	0,00	90,00	358,00
3	26	28,89	130,00	43	47,78	172,00	12	13,33	36,00	11	12,22	22,00	2	2,22	2,00	90,00	362,00
4	24	26,67	120,00	48	53,33	192,00	11	12,22	33,00	11	12,22	22,00	0	0,00	0,00	90,00	367,00
Total	90,00	100,00	450,00	184,00	204,44	736,00	56,00	62,22	168,00	43,00	47,78	86,00	3,00	3,33	3,00	360,00	1443,00

Tabel 5.5 menggambarkan pengukuran Variabel Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif yang berasal dari responden. Skor tertinggi adalah pernyataan nomor 4. Pernyataan tersebut adalah “kegiatan kemitraan yang dilakukan sekolah dengan pihak luar (institusi terkait, pihak swasta atau LSM) dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup” dengan total skor 367. Rinciannya yaitu 24 responden atau 26,67 % menjawab sangat setuju, 48 responden atau 53,33 % menjawab setuju, 11 responden atau 12,22 % menjawab ragu-ragu, 11 responden atau 12,22 % menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa beberapa sekolah telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak tertentu baik pihak pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk mengembangkan konsep pembelajaran yang berbasis pendidikan lingkungan hidup.

Pernyataan nomor 1 yang merupakan pernyataan indikator dari beberapa indikator berbunyi “kegiatan lingkungan yang diprakarsai oleh sekolah dan melibatkan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah” merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 356. Rinciannya yaitu 23 responden atau 25,56 % menjawab sangat setuju, 41 responden atau 45,56 % menjawab setuju, 18 responden atau 20,00 % menjawab ragu-ragu, 11 responden atau 12,22 % menjawab tidak setuju dan 1 responden atau 1,11 % yang menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa sekolah di Kabupaten Pasangkayu belum secara maksimal memiliki program kegiatan baik dalam bentuk ekstrakurikuler maupun kokurikuler yang mendukung pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan hidup peserta didik.

Hasil olahan data tersebut yang termuat dalam Tabel 5.5 menunjukkan bahwa beberapa sekolah telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak tertentu baik pihak pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk mengembangkan konsep pembelajaran yang berbasis pendidikan lingkungan hidup. Namun, sekolah di Kabupaten Pasangkayu belum secara maksimal memiliki program kegiatan baik dalam bentuk ekstrakurikuler maupun kokurikuler yang mendukung pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan hidup peserta didik.

5.1.3.4. Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah Ramah Lingkungan (X₄)

Hasil tabulasi yang diperoleh dari setiap responden dengan 6 item pernyataan tentang Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah

Lingkungan untuk menentukan nilai dari setiap skor jawaban responden melalui tabulasi frekuensi, dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut ini.

Tabel 5.6 Tabulasi Frekuensi Responden (X₄)

No Item	Skor Frekuensi Jawaban Responden																Total Skor
	SS	%	Skor	S	%	Skor	RR	%	Skor	TS	%	Skor	STS	%	Skor	N	
	5			4			3			2			1				
1	37	41,11	185,00	44	48,89	176,00	9	10,00	27,00	5	5,56	10,00	0	0,00	0,00	90,00	398,00
2	34	37,78	170,00	44	48,89	176,00	12	13,33	36,00	5	5,56	10,00	0	0,00	0,00	90,00	392,00
3	37	41,11	185,00	45	50,00	180,00	8	8,89	24,00	5	5,56	10,00	0	0,00	0,00	90,00	399,00
4	43	47,78	215,00	38	42,22	152,00	9	10,00	27,00	5	5,56	10,00	0	0,00	0,00	90,00	404,00
5	18	20,00	90,00	55	61,11	220,00	14	15,56	42,00	8	8,89	16,00	0	0,00	0,00	90,00	368,00
6	17	18,89	85,00	52	57,78	208,00	15	16,67	45,00	10	11,11	20,00	0	0,00	0,00	90,00	358,00
Total	151,00	167,78	755,00	171,00	190,00	684,00	38,00	42,22	114,00	20,00	22,22	40,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1593,00

Tabel 5.6 menggambarkan pengukuran Variabel Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan yang berasal dari responden. Skor tertinggi adalah pernyataan nomor 4. Pernyataan tersebut adalah “ada upaya efisiensi penggunaan penghematan air, listik, alat tulis kantor, plastik dan bahan lainnya” dengan total skor 404. Rinciannya yaitu 43 responden atau 47,78 % menjawab sangat setuju, 38 responden atau 42,22 % menjawab setuju, 9 responden atau 10,00 % menjawab ragu-ragu, 5 responden atau 5,56 % menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa beberapa sekolah yang berada di Kabupaten Pasangkayu telah memiliki kebijakan yang mendukung terlaksananya upaya efisiensi dalam penggunaan penghematan air, listik, alat tulis kantor, plastik dan bahan lainnya.

Pernyataan nomor 6 yang merupakan pernyataan indikator dari beberapa indikator berbunyi “ada upaya pengelolaan sampah untuk menunjang kebersihan

dan kesehatan lingkungan sekolah” merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 358. Rinciannya yaitu 17 responden atau 18,89 % menjawab sangat setuju, 52 responden atau 57,78 % menjawab setuju, 15 responden atau 16,67 % menjawab ragu-ragu, 10 responden atau 11,11 % menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa belum adanya upaya maksimal dalam rangka pengelolaan sampah untuk menunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah.

Hasil olahan data tersebut yang temuat dalam Tabel 5.6 menunjukkan bahwa beberapa sekolah yang berada di Kabupaten Pasangkayu telah memiliki kebijakan yang mendukung terlaksananya upaya efisiensi dalam penggunaan penghematan air, listik, alat tulis kantor, plastik dan bahan lainnya. Namun, belum adanya upaya maksimal dalam rangka pengelolaan sampah untuk menunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah.

5.1.3.5. Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X₅)

Hasil tabulasi yang diperoleh dari setiap responden dengan 6 item pernyataan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu untuk menentukan nilai dari setiap skor jawaban responden melalui tabulasi frekuensi, dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut ini.

Tabel 5.7 Tabulasi Frekuensi Responden (X_s)

No Item	Skor Frekuensi Jawaban Responden																Total Skor
	SS	%	Skor	S	%	Skor	RR	%	Skor	TS	%	Skor	STS	%	Skor	N	
	5			4			3			2			1				
1	17	18,89	85,00	43	47,78	172,00	21	23,33	63,00	6	6,67	12,00	6	6,67	0,00	90,00	332,00
2	14	15,56	70,00	45	50,00	180,00	27	30,00	81,00	8	8,89	16,00	0	0,00	0,00	90,00	347,00
3	38	42,22	190,00	40	44,44	160,00	12	13,33	36,00	5	5,56	10,00	0	0,00	0,00	90,00	396,00
4	17	18,89	85,00	46	51,11	184,00	21	23,33	63,00	6	6,67	12,00	3	3,33	0,00	90,00	344,00
5	15	16,67	75,00	44	48,89	176,00	22	24,44	66,00	8	8,89	16,00	5	5,56	0,00	90,00	333,00
6	38	42,22	190,00	34	37,78	136,00	12	13,33	36,00	5	5,56	10,00	6	6,67	0,00	90,00	372,00
Total	86,00	95,56	430,00	174,00	193,33	696,00	81,00	90,00	243,00	25,00	27,78	50,00	9,00	10,00	0,00	360,00	1419,00

Tabel 5.7 menggambarkan pengukuran Variabel Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu yang berasal dari responden. Skor tertinggi adalah pernyataan nomor 3. Pernyataan tersebut adalah “Kebijakan setiap Organisasi Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian lingkungan” dengan total skor 396. Rinciannya yaitu 38 responden atau 42,22 % menjawab sangat setuju, 40 responden atau 44,44 % menjawab setuju, 12 responden atau 13,33 % menjawab ragu-ragu, 5 responden atau 5,56 % menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat Kebijakan pada setia Organisasi Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang berbasis kearifan lokal.

Pernyataan nomor 1 yang merupakan pernyataan indikator dari beberapa indikator berbunyi “Kebijakan Pemerintah Kab. Pasangkayu mendukung pelestarian lingkungan yang berbasis kearifan lokal” merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 332. Rinciannya yaitu 17 responden atau 18,89 % menjawab sangat setuju, 43 responden atau 47,78 % menjawab setuju, 21

responden atau 23,33 % menjawab ragu-ragu, 6 responden atau 6,67 % menjawab tidak setuju dan 6 responden atau 6,67 % menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa belum maksimalnya upaya dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan.

Hasil olahan data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memiliki kebijakan yang terakomodir pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pelestarian lingkungan yang berbasis kearifan lokal. Namun, belum maksimalnya upaya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

5.1.3.6. Kebijakan adiwiyata (Y)

Hasil tabulasi yang diperoleh dari setiap responden dengan 8 item pernyataan tentang Kebijakan adiwiyata untuk menentukan nilai dari setiap skor jawaban responden melalui tabulasi frekuensi, dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut ini.

Tabel 5.8 Tabulasi Frekuensi Responden (Y)

No Item	Skor Frekuensi Jawaban Responden																Total Skor
	SS	%	Skor	S	%	Skor	RR	%	Skor	TS	%	Skor	STS	%	Skor	N	
	5			4			3			2			1				
1	23	25,56	115,00	41	45,56	164,00	18	20,00	54,00	11	12,22	22,00	1	1,11	0,00	90,00	355,00
2	17	18,89	85,00	52	57,78	208,00	15	16,67	45,00	10	11,11	20,00	0	0,00	0,00	90,00	358,00
3	22	24,44	110,00	62	68,89	248,00	6	6,67	18,00	4	4,44	8,00	0	0,00	0,00	90,00	384,00
4	20	22,22	100,00	62	68,89	248,00	8	8,89	24,00	3	3,33	6,00	0	0,00	0,00	90,00	378,00
5	25	27,78	125,00	53	58,89	212,00	12	13,33	36,00	4	4,44	8,00	0	0,00	0,00	90,00	381,00
6	18	20,00	90,00	55	61,11	220,00	14	15,56	42,00	8	8,89	16,00	0	0,00	0,00	90,00	368,00
7	17	18,89	85,00	52	57,78	208,00	15	16,67	45,00	10	11,11	20,00	0	0,00	0,00	90,00	358,00
8	22	24,44	110,00	58	64,44	232,00	6	6,67	18,00	8	8,89	16,00	0	0,00	0,00	90,00	376,00
Total	82,00	91,11	410,00	217,00	241,11	868,00	47,00	52,22	141,00	28,00	31,11	56,00	1,00	1,11	0,00	360,00	1475,00

Tabel 5.8 menggambarkan pengukuran Variabel Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu yang berasal dari responden. Skor tertinggi adalah pernyataan nomor 3. Pernyataan tersebut adalah “Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif” dengan total skor 384. Rinciannya yaitu 22 responden atau 24,44 % menjawab sangat setuju, 62 responden atau 68,89 % menjawab setuju, 6 responden atau 6,67 % menjawab ragu-ragu, 4 responden atau 4,44 % menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan adiwiyata di dukung oleh Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif.

Pernyataan nomor 1 yang merupakan pernyataan indikator dari beberapa indikator berbunyi “Kebijakan Sekolah mendukung kepedulian dan berbudaya Lingkungan” merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 355. Rinciannya yaitu 23 responden atau 25,56 % menjawab sangat setuju, 41 responden atau 45,56 % menjawab setuju, 18 responden atau 20,00 % menjawab ragu-ragu, 11 responden atau 12,22 % menjawab tidak setuju dan 1 responden atau 1,11 % menjawab sangat tidak setuju. Skor tersebut memberikan gambaran bahwa Kebijakan Pemerintah Kab. Pasangkayu mendukung Kebijakan Sekolah dalam kepedulian dan berbudaya Lingkungan agar dapat memperoleh gelar adiwiyata.

5.2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen penelitian terdiri dari uji kesasihan (uji validitas) dan uji keandalan (uji reliabilitas).

5.2.1. Hasil Uji Validitas

Uji kesahihan atau validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur itu dapat mengukur apa yang akan diukur. Uji kesahihan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah daftar pertanyaan yang disiapkan telah dapat mengukur variabel yang ingin diukur. Uji kesahihan dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan (item) dengan skor totalnya.

Validitas dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai *pearson corelation* dari dua puluh item pertanyaan yang diajukan dengan nilai *r-kritis* sesuai dengan kriteria yaitu sebesar 0,3.

5.2.1.1. Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X₁)

Kompetensi merupakan variabel independen pertama yang diteliti dan diwakili dengan 8 item pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini.

Tabel 5.9 Hasil Pengujian Validitas (X₁)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-kritis	Status
1	0,797	0,3	Valid
2	0,722	0,3	Valid
3	0,797	0,3	Valid
4	0,797	0,3	Valid
5	0,722	0,3	Valid
6	0,797	0,3	Valid
7	0,722	0,3	Valid
8	0,445	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2018 (Lampiran III)

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat dinyatakan bahwa semua instrument layak (sahih) diikutsertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis, mengacu pada pendapat Sugiyono (2010).

5.2.1.2. Variabel Pengembangan Kurikulum Lingkungan Hidup (X₂)

Kompensasi merupakan variabel independen kedua yang diteliti dan diwakili dengan 6 item pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut ini.

Tabel 5.10 Hasil Pengujian Validitas (X₂)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-kritis	Status
1	0,739	0,3	Valid
2	0,799	0,3	Valid
3	0,739	0,3	Valid
4	0,799	0,3	Valid
5	0,739	0,3	Valid
6	0,799	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2018 (Lampiran III)

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat dinyatakan bahwa semua instrument layak (sahih) diikutsertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis, mengacu pada pendapat Sugiyono (2010).

5.2.1.3. Variabel Pengembangan Kegiatan Lingkungan Partisipatif (X₃)

Kompensasi merupakan variabel independen ketiga yang diteliti dan diwakili dengan 4 item pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini.

Tabel 5.11 Hasil Pengujian Validitas (X_3)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-kritis	Status
1	0,802	0,3	Valid
2	0,731	0,3	Valid
3	0,84	0,3	Valid
4	0,814	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2018 (Lampiran III)

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat dinyatakan bahwa semua instrument layak (sahih) diikutsertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis, mengacu pada pendapat Sugiyono (2010).

5.2.1.4. Variabel Pengelolaan Sarana Sekolah Ramah Lingkungan (X_4)

Kompensasi merupakan variabel independen keempat yang diteliti dan diwakili dengan 6 item pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut ini

Tabel 5.12 Hasil Pengujian Validitas (X_4)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-kritis	Status
1	0,743	0,3	Valid
2	0,797	0,3	Valid
3	0,724	0,3	Valid
4	0,734	0,3	Valid
5	0,396	0,3	Valid
6	0,343	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2018 (Lampiran III)

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat dinyatakan bahwa semua instrument layak (sahih) diikutsertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis, mengacu pada pendapat Sugiyono (2010).

5.2.1.5. Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X₅)

Kompensasi merupakan variabel independen kelima yang diteliti dan diwakili dengan 6 item pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut ini.

Tabel 5.13 Hasil Pengujian Validitas (X₅)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-kritis	Status
1	0,826	0,3	Valid
2	0,843	0,3	Valid
3	0,551	0,3	Valid
4	0,826	0,3	Valid
5	0,843	0,3	Valid
6	0,551	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2018 (Lampiran III)

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat dinyatakan bahwa semua instrument layak (sahih) diikutsertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis, mengacu pada pendapat Sugiyono (2010).

5.2.1.6. Kebijakan adiwiyata (Y)

Kinerja Pegawai merupakan variabel dependen yang diteliti dan diwakili dengan 8 item pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini.

Tabel 5.14 Hasil Pengujian Validitas (Y)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-kritis	Status
1	0,614	0,3	Valid
2	0,783	0,3	Valid
3	0,522	0,3	Valid
4	0,479	0,3	Valid
5	0,478	0,3	Valid
6	0,571	0,3	Valid
7	0,783	0,3	Valid
8	0,522	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2018 (Lampiran III)

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat dinyatakan bahwa semua instrument layak (sahih) diikutsertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis, mengacu pada pendapat Sugiyono (2010).

5.2.2. Hasil Uji Reliabilitas

Setelah seluruh instrument dalam penelitian ini dinyatakan valid, maka selanjutnya perlu diadakan pengujian reliabilitas untuk menguji keandalan instrument penelitian. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan melihat nilai *cronbach Alpha*, dengan bantuan computer program *SPSS for windows versi 21.0*. Hasil pengujian reliabilitas dilakukan terhadap item-item pernyataan dari setiap variabel penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

5.2.2.1. Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X₁)

Hasil perhitungan korelasi skor total nilai koefisien dengan melihat koefisien *cronbach alpha* pada item pernyataan mengenai Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X₁), r_i sebesar 0,861 (lampiran IV) sehingga diperoleh reliabilitas instrument pernyataan mengenai Kebijakan Sekolah Peduli

dan Berbudaya Lingkungan sebesar 0,861. Mengacu pada interpretasi tingkat reliabilitas berdasarkan nilai reliabilitas atas koefisien menurut pendapat Sugiono, maka dapat dikatakan bahwa instrument Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1) adalah reliabel.

5.2.2.2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2)

Hasil perhitungan korelasi skor total nilai koefisien dengan melihat koefisien *cronbach alpha* pada item pernyataan mengenai Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2), r_1 sebesar 0,862 (lampiran IV) sehingga diperoleh reliabilitas instrument pernyataan mengenai Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup sebesar 0,862. Mengacu pada interpretasi tingkat reliabilitas berdasarkan nilai reliabilitas atas koefisien menurut pendapat Sugiono, maka dapat dikatakan bahwa instrument Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2) adalah reliabel.

5.2.2.3. Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X_3)

Hasil perhitungan korelasi skor total nilai koefisien dengan melihat koefisien *cronbach alpha* pada item pernyataan mengenai Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X_3), r_1 sebesar 0,808 (lampiran IV) sehingga diperoleh reliabilitas instrument pernyataan mengenai Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif sebesar 0,808. Mengacu pada interpretasi tingkat reliabilitas berdasarkan nilai reliabilitas atas koefisien menurut pendapat Sugiono, maka dapat dikatakan bahwa instrument Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X_3) adalah reliabel.

5.2.2.4. Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah Ramah Lingkungan (X_4)

Hasil perhitungan korelasi skor total nilai koefisien dengan melihat koefisien *cronbach alpha* pada item pernyataan mengenai Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X_4), r_i sebesar 0,663 (lampiran IV) sehingga diperoleh reliabilitas instrument pernyataan mengenai Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan sebesar 0,663. Mengacu pada interpretasi tingkat reliabilitas berdasarkan nilai reliabilitas atas koefisien menurut pendapat Sugiono, maka dapat dikatakan bahwa instrument Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X_4) adalah reliabel.

5.2.2.5. Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5)

Hasil perhitungan korelasi skor total nilai koefisien dengan melihat koefisien *cronbach alpha* pada item pernyataan mengenai Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5), r_i sebesar 0,841 (lampiran IV) sehingga diperoleh reliabilitas instrument pernyataan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu sebesar 0,841. Mengacu pada interpretasi tingkat reliabilitas berdasarkan nilai reliabilitas atas koefisien menurut pendapat Sugiono, maka dapat dikatakan bahwa instrumen Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5) adalah reliabel.

5.2.2.6. Kebijakan adiwiyata (Y)

Hasil perhitungan korelasi skor total nilai koefisien dengan melihat koefisien *cronbach alpha* pada item pernyataan mengenai Kebijakan adiwiyata

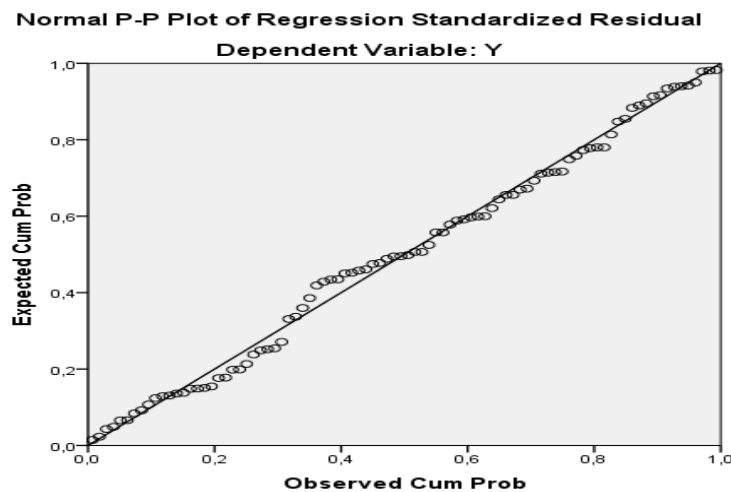
(Y), r_i sebesar 0,774 (lampiran IV) sehingga diperoleh reliabilitas instrument pernyataan mengenai Kebijakan adiwiyata sebesar 0,774. Mengacu pada interpretasi tingkat reliabilitas berdasarkan nilai reliabilitas atas koefisien menurut pendapat Sugiono, maka dapat dikatakan bahwa instrument Kebijakan adiwiyata (Y) adalah reliabel.

5.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

5.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksud untuk mengetahui apakah sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Hasil analisis uji normalitas ditunjukkan dalam grafik berikut ini:

Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas



Dari grafik tersebut ditunjukkan bahwa nilai-nilai sebaran data penelitian terletak di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat

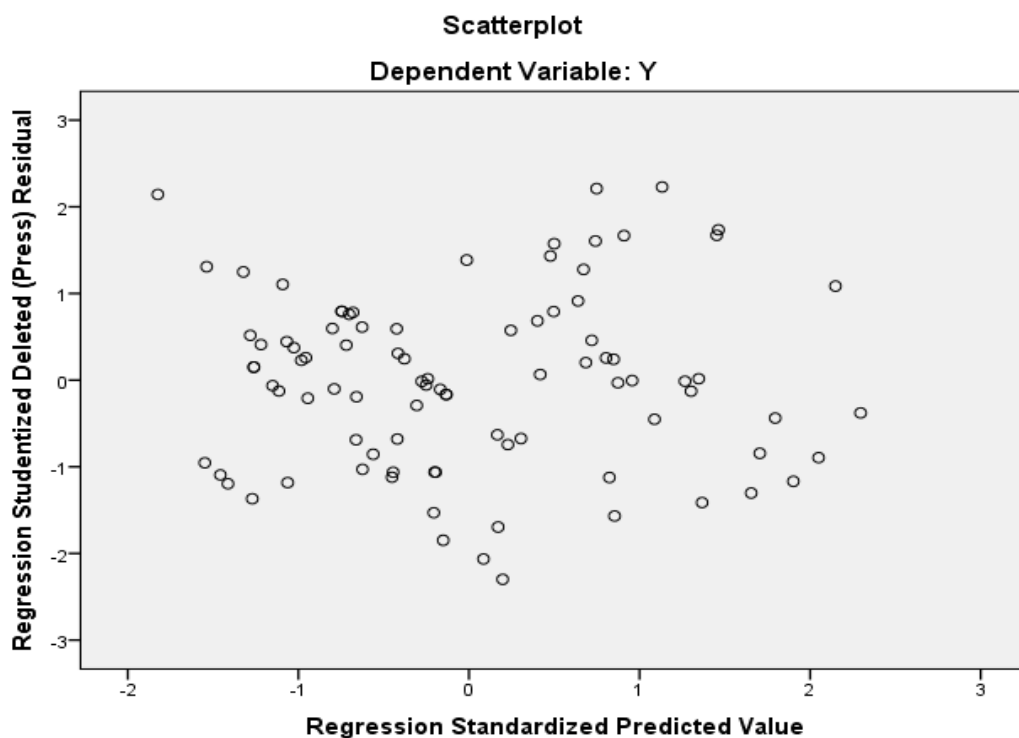
dikatakan bahwa persyaratan normalitas dapat dipenuhi sehingga dapat digunakan untuk metode analisis selanjutnya.

5.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang teratur pada grafik *Scatterplot*.

Hasil analisis uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam grafik berikut:

Gambar 5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas



Dari grafik *Scatterplot* ditunjukkan bahwa nilai-nilai sebaran data penelitian tersebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas,

tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

5.3.3. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui antar variabel bebas tidak memiliki hubungan linier atau tidak berkolerasi satu sama lain dalam model regresi, maka dilakukan suatu pendeteksian dengan menguji gejala multikolinearitas. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factor* (VIF) sebagai indikator ada atau tidaknya multikolinearitas diantara variabel bebas. Berdasarkan hasil output dengan bantuan computer program *SPSS for windows versi 22.0* (lampiran IV), dapat dilihat hasil uji multikolinearitas untuk masing-masing variabel independen pada tabel 5.15 berikut:

Tabel 5.15 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t		Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,573	1,714		1,501	,137	-,836	5,981					
	X1	,357	,072	,418	4,941	,000	,214	,501	,747	,475	,271	,420	2,380
	X2	,225	,091	,216	2,474	,015	,044	,407	,713	,261	,136	,392	2,550
	X3	,536	,136	,273	3,936	,000	,265	,806	,429	,395	,216	,626	1,599
	X4	-,103	,091	-,078	-1,128	,262	-,285	,079	,204	-,122	-,062	,625	1,601
	X5	,304	,067	,286	4,511	,000	,170	,438	,631	,442	,247	,744	1,343

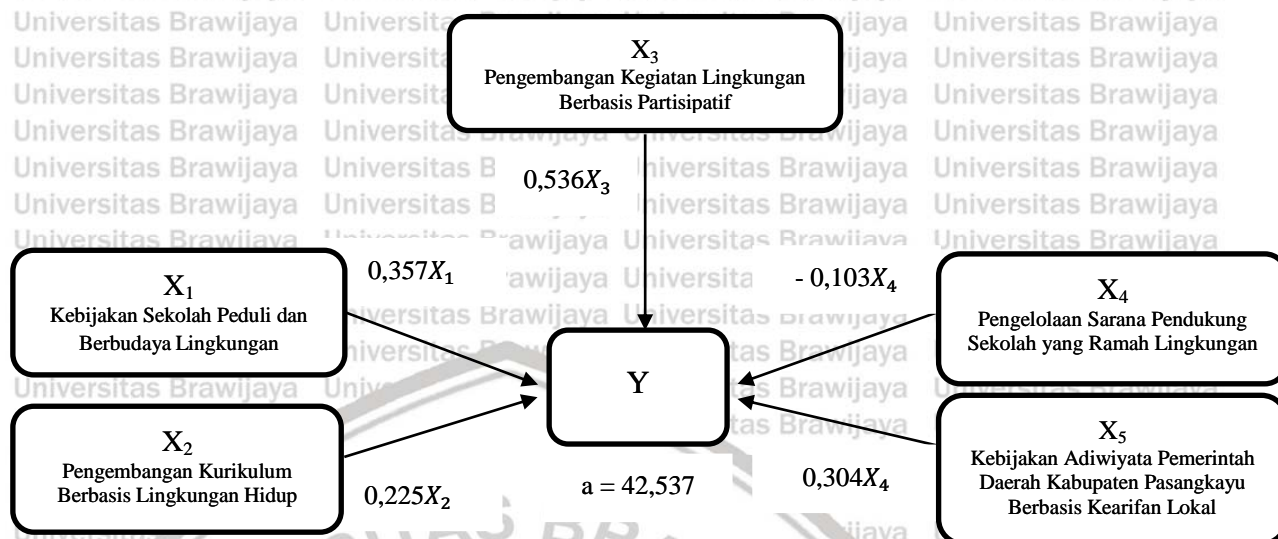
a. Dependent Variable: Y

Dari nilai tabel di atas dapat dilihat tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95 %. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 maka dapat dikatakan

Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X_4), Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5) memberikan kontribusi sebesar 73,3 % terhadap variabel terikat kinerja pegawai, sedangkan sisanya 26,7 % merupakan variabel lain yang tidak disertakan dalam perhitungan model ini.

Adapun nilai koefisien korelasi (*multiple R*) adalah sebesar 0,865. Nilai tersebut menunjukkan korelasi variabel independen variabel Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1), Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2), Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X_3), Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X_4), Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5) terhadap variabel dependen (Y) adalah sebesar 86,5%. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel variabel Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1), Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2), Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X_3), Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X_4), Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5) terhadap Kebijakan adiwiyata (Y). Untuk lebih jelasnya berikut diagram jalur persamaan regresi yang dibentuk berdasarkan hasil olah data.

Gambar 5.3 Diagram Jalur



Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 5.6 tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$Y = 42,573 + 0,357X_1 + 0,225X_2 + 0,536X_3 - 0,103X_4 + 0,304X_5$$

Persamaan Regresi Linear Berganda di atas menunjukkan bahwa kompetensi dan kompensasi memiliki arah pengaruh positif terhadap variabel dependen terhadap kinerja pegawai. Hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai Konstanta sebesar 2,573 dan bertanda positif. Nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel bebas, yaitu variabel Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1), Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2), Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X_3), Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X_4), Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5), sebesar 2,573 tetap atau tidak

mengalami perubahan (bernilai nol), maka Kebijakan adiwiyata yang dihasilkan akan bernilai 2,573. Dengan penjabaran matematisnya sebagai berikut :

$$\text{Kebijakan adiwiyata} = 2,573 + 0,357 (0) + 0,225 (0) + 0,536 (0) - 0,103 (0) + 0,304 (0) = 2,573.$$

b. Koefisien regresi (b_1) 0,357 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan atau peningkatan Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1) sebesar satu satuan, maka diikuti pula dengan naik atau meningkatnya Kebijakan adiwiyata sebesar 0,357 dan begitu pula seterusnya. Dengan asumsi sub variabel bebas yang lain tetap ($X_2=0$) atau *Ceteris Paribus*. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1) memiliki pengaruh yang kuat dalam Kebijakan adiwiyata. Dengan penjabaran matematisnya sebagai berikut :

$$\text{Kebijakan adiwiyata} = 2,573 (0) + 0,357 + 0,225 (0) + 0,536 (0) - 0,103 (0) + 0,304 (0) = 0,357$$

c. Koefisien regresi (b_2) 0,225 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan atau Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2) sebesar satu satuan, maka diikuti pula dengan naik atau meningkatnya Kebijakan adiwiyata sebesar 0,225 dan begitu pula seterusnya. Dengan asumsi sub variabel bebas yang lain tetap ($X_1=0$) atau *Ceteris Paribus*. Hal ini menunjukkan bahwa Pengembangan Kurikulum

Berbasis Lingkungan Hidup memiliki pengaruh yang kuat dalam Kebijakan adiwiyata. Dengan penjabaran matematisnya sebagai berikut :

$$\text{Kebijakan adiwiyata} = 2,573 (0) + 0,357 (0) + 0,225 (0) + 0,536 (0) - 0,103 (0) + 0,304 (0) = 0,225$$

d. Koefisien regresi (b_3) 0,536 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan atau Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis

Partisipatif (X_3) sebesar satu satuan, maka diikuti pula dengan naik atau meningkatnya Kebijakan adiwiyata sebesar 0,536 dan begitu pula seterusnya. Dengan asumsi sub variabel bebas yang lain tetap ($X_1=0$) atau

Ceteris Paribus. Hal ini menunjukkan bahwa Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif memiliki pengaruh yang kuat dalam Kebijakan adiwiyata. Dengan penjabaran matematisnya sebagai berikut :

$$\text{Kebijakan adiwiyata} = 2,573 (0) + 0,357 (0) + 0,225 (0) + 0,536 (0) - 0,103 (0) + 0,304 (0) = 0,536$$

e. Koefisien regresi (b_4) 0,103 dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan atau Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang

Ramah Lingkungan (X_4) sebesar satu satuan, maka diikuti pula dengan naik atau menurunnya Kebijakan adiwiyata sebesar 0,103 dan begitu pula seterusnya. Dengan asumsi sub variabel bebas yang lain tetap ($X_1=0$) atau

Ceteris Paribus. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan memiliki pengaruh dalam Kebijakan adiwiyata. Dengan penjabaran matematisnya sebagai berikut :

$$\text{Kebijakan adiwiyata} = 2,573 (0) + 0,357 (0) + 0,225 (0) + 0,536 (0) - 0,103 (0) + 0,304 (0) = -0,103$$

f. Koefisien regresi (b_5) 0,304 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan atau Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5) sebesar satu satuan, maka diikuti pula dengan naik atau meningkatnya Kebijakan adiwiyata sebesar 0,304 dan begitu pula seterusnya. Dengan asumsi sub variabel bebas yang lain tetap ($X_1 = 0$) atau *Ceteris Paribus*. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu memiliki pengaruh yang kuat dalam Kebijakan adiwiyata. Dengan penjabaran matematisnya sebagai berikut :

$$\text{Kebijakan adiwiyata} = 2,573 (0) + 0,357 (0) + 0,225 (0) + 0,536 (0) - 0,103 (0) + 0,304 = 0,225$$

Variabel-variabel yang telah dijelaskan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam implementasinya untuk bisa mendorong munculnya sekolah Adiwiyata adalah dengan pendekatan *top down*. Pendekatan *top down* adalah proses manajemen yang didorong oleh atasan atau yang jabatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh atasan akan berpengaruh terhadap variabel-variabel lain yang ada di bawahnya. Kebijakan dari Pemerintah Daerah adalah kebijakan utama yang harus diperhatikan, karena dengan adanya kebijakan yang spesifik lingkungan maka akan banyak turunan peraturan-peraturan tersebut, salah satu contohnya adalah pada Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan memiliki keterkaitan dengan keberhasilan dari Sekolah Adiwiyata. Tentu saja, kebijakan sekolah ini harus tertuang di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, sehingga setiap elemen di sekolah harus bisa mengikuti kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan-kebijakan ini dapat dituangkan

ke dalam kurikulum yang berbasis lingkungan di dalam sekolah. Hal ini dikarenakan dukungan dari seluruh komponen sekolah adalah hal yang sangat dibutuhkan. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah memunculkan kesadaran warga sekolah untuk bisa lebih menjaga lingkungan sekitarnya, dari yang paling kecil yaitu sekolah dan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di rumah (Isnaeni, 2013).

Dengan adanya Kebijakan dari kepala sekolah, maka pengembangan kurikulum yang berbasis lingkungan hidup akan lebih mudah. Beberapa kurikulum yang berbasis lingkungan hidup antara lain 1) pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran; 2) penggalian dan pengembangan materi serta persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar; 3) pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya, dan 4) pengembangan kegiatan kurikuler untuk peningkatan dan kesadaran peserta didik tentang lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2010). Kegiatan-kegiatan lingkungan yang berbasis partisipatif harus disesuaikan dengan kebijakan dan kurikulum yang ada, bahkan harus sesuai dengan visi dan misi sekolah yang berwawasan lingkungan. Beberapa bentuk kegiatan lingkungan yang berbasis partisipatif adalah melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan untuk semua elemen di sekolah, memanfaatkan lahan kosong untuk membuat biopori, RTH, atau sumur resapan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengembangkan kegiatan ekstra yang berhubungan dengan lingkungan, dan menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi lingkungan atau

kelompok masyarakat yang memiliki konsentrasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan sarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan juga merupakan hal penting untuk membuat sekolah menjadi Sekolah Adiwiyata.

Namun, dalam penelitian ini pengelolaan sarana pendukung sekolah ramah lingkungan bernilai negatif dapat dikarenakan kurangnya perhatian pada sarana dan prasana yang ada sehingga kesadaran dari warga sekolah untuk menjaga sarana tersebut semakin berkurang. Seharusnya, sekolah mampu membuat peraturan yang mewajibkan setiap kelas untuk bisa menjaga fasilitas lingkungan di kelasnya dan memanfaatkannya semaksimal mungkin, contohnya adalah dengan membuat kompos dari sisa-sisa makanan siswa dan mulai membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik, selain itu penggunaan listrik juga harus dikurangi dengan membuat suasana kelas senyaman mungkin, sehingga siswa merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar.

Dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa terdapat mekanisme dalam pengembangan model kebijakan adiwiyata di beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Beberapa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam beberapa pendekatan yang digunakan di mana penelitian ini akan menganalisis mengenai dampak pengelolaan lingkungan yang baik dan berstandar terhadap keberlangsungan pelestarian lingkungan dalam mewujudkan pencapaian program adiwiyata. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa program adiwiyata adalah langkah untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan, serta keprihatinan lingkungan peserta didik dan

masyarakat, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang dikemukakan secara eksplisit termasuk konsep lingkungan di mana semua elemen mendukung dan bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup agar penerapan kebijakan harus terintegrasi dengan pendidikan karakter yang diposisikan sebagai mata pelajaran tersendiri atau pendekatan yang komprehensif untuk mencapai tujuan yang efektif (Landriany, 2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu memiliki pengaruh yang signifikan dalam rangka pengembangan kebijakan adiwiyata. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya sinergi berupa peran penting dari berbagai pihak untuk mencapai hal tersebut seperti halnya koordinasi di antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah agar dapat menjalin kerjasama yang baik demi mencapai tujuan pengembangan kebijakan adiwiyata yang baik yang didukung dalam semangat serta cita Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan lingkungan yang dapat mendukung kebijakan adiwata yang berbasis partisipatif *multistakeholder*.

5.5. Hasil Pengujian Hipotesis

5.5.1. Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji ANOVA atau F test pada Tabel 5.14 diperoleh hasil F_{hitung} sebesar $49,819 > F_{tabel}$ sebesar 2,32 dengan tingkat probabilitas (signifikan) 0,000 adalah :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada tingkat kepercayaan 95 % atau $\alpha = 0,05$ maka terbukti secara simultan bahwa Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1), Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup

(X₂), Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X₃), Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X₄), Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X₅), berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata.

b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada tingkat kepercayaan 95 % atau $\alpha = 0,05$ maka terbukti secara simultan bahwa Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X₁), Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X₂), Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X₃), Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X₄), Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X₅), tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata.

Oleh karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi (0.000) lebih kecil dari tingkat ketidakpercayaan (nilai alpha 0,05) maka secara simultan Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X₁), Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X₂), Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X₃), Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X₄), Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X₅) berpengaruh secara signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata (Y).

5.5.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel independen (Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1), Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2), Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X_3), Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X_4), Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5) benar-benar memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (Y). Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika terpisah, masing-masing variabel independen masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji t maka terlihat bahwa :

1. Untuk variabel Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,941 > t_{tabel} sebesar 1.66256 (lampiran V) dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Dengan demikian nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (X_1) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata
2. Untuk variabel Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,474 > t_{tabel} sebesar 1.66256 (lampiran V) dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% yaitu $0,015 < 0,05$. Dengan demikian nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup (X_2) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata

3. Untuk variabel Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X_3) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,936 > t_{tabel}$ sebesar 1.66256 (lampiran V) dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Dengan demikian nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif (X_3) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata
4. Untuk variabel Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X_4) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-1,128 < t_{tabel}$ sebesar 1.66256 (lampiran V) dan tingkat signifikansinya lebih besar dari taraf ketidakpercayaan 5% yaitu $0,262 > 0,05$. Dengan demikian nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan (X_4) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata
5. Untuk Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $4,511 > t_{tabel}$ sebesar 1.66256 (lampiran V) dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Dengan demikian nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata.

5.6. Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal

Program Adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma-norma dalam kehidupan yang antara lain meliputi: kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan,

kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Peraturan yang melandasi kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan meliputi Memorandum bersama antara Meneg dengan Mendiknas Nomor 0142/U/1996 dan Nomor Kep 89/MenLH/5/1996, Kesepakatan Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Departemen Pendidikan Nasional KEP 7/MenLH/06/2005 dan Nomor 05/VI/KB/2005, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pada tingkat nasional kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Selanjutnya, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan sebuah kebijakan No 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, dan mengalami perubahan (Revisi) oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Dari semua kebijakan yang tersedia tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menjalankan kebijakan berupa: 1) pengelolaan persampahan; 2) unit kesehatan sekolah; 3) pembangunan taman dan ruang terbuka hijau; 4) penyediaan sarana dan prasarana pendukung; 5) pembentukan kurikulum di setiap sekolah yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan; 6) pelestarian kearifan lokal yang erat dengan lingkungan hidup; 7) adanya kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan.

Adiwiyata mempunyai pengertian sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika

yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Indikator dan kriteria program Adiwiyata adalah sebagai berikut: a) Pengembangan Aspek Kebijakan Sekolah yang Berwawasan Lingkungan; b) Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan; c) Pengembangan Kegiatan BerbasisPartisipatif; d) Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Sekolah yang Ramah Lingkungan. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mekanisme kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk mengupayakan dalam meningkatkan pelestarian lingkungan di Kabupaten Pasangkayu dapat di lihat dalam hasil wawancara berikut ini.

Hasil yang didapat peneliti dalam wawancara dengan beberapa informan yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu, Arhamuddin, SE., MAP., menyatakan bahwa:

“Upaya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mendapatkan penghargaan adipura sudah lumayan banyak mulai dari anggaran

untuk pengelolaan persampahan dalam kota dan dengan pembangunan di beberapa titik dalam kota di samping itu pula dalam kebijakan kebersihan (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2018).”

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu, Ramlah, S.ST., menyatakan bahwa:

“Menata Kota Pasangkayu, berupaya membersihkan Kota Pasangkayu dari sampah, menyediakan tempat sampah yang terpisah, melakukan penanaman pohon peneduh di sepanjang jalan (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2018).”

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu, Basri, S.Pd., menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan yaitu melakukan pembinaan secara konsisten ke sekolah-sekolah adiwiyata (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2018).”

Hasil wawancara dengan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Musbar Hasibe, S.Pd., M.Si., menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah melakukan upaya sebagai berikut; 1) menyiapkan infrastruktur terkait penilaian adipura; 2) meningkatkan sanitasi lingkungan; 3) melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah adiwiyata; 4) meningkatkan manajemen lingkungan; 5) melakukan pembersihan total di wilayah Kabupaten Pasangkayu; 6) melakukan pembangunan RITI (Ruang Terbuka Hijau) (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2018).”

Untuk meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Pasangkayu, maka Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberikan *support* terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat terwujud dengan beberapa hal sebagai berikut ini, yaitu: 1) menyiapkan infrastruktur; 2) meningkatkan sanitasi lingkungan; 3) melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah adiwiyata; 4) meningkatkan manajemen lingkungan; 5)

melakukan pembersihan total di wilayah Kabupaten Pasangkayu; 6) melakukan pembangunan RITI (Ruang Terbuka Hijau).

Kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan menggunakan pola atau strategi untuk mengembangkan kebijakan adiwiyata yang terintegrasi dengan pengembangan kearifan lokal dalam sekolah adiwiyata dilakukan melalui pembelajaran seperti budaya kerja *malaqbi* yang tercermin dari sikap dan tindakan seperti: 1) *malaqbi pau* yaitu tutur kata yang sopan dan santun sebagai seorang siswa; 2) *malaqbi gauq* yaitu tingkah laku yang baik sebagai seorang siswa di sekolah; dan 3) *malaqbi kedzo* yaitu perilaku baik yang sejalan dengan tingginya kepedulian terhadap kelestarian di lingkungan sekitar. Di mana implementasi dari budaya kerja *malaqbi* tersebut di setiap sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Kabupaten Pasangkayu dimulai dengan memuat unsur kearifan lokal tersebut dalam penyusunan silabus dan pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran yang terkait serta dalam kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bagi setiap siswa tentang pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam maupun di luar kelas yang mana kegiatan tersebut dapat memberikan peningkatan pemahaman kepada setiap siswa dalam mendalami upaya pelestarian lingkungan yang sejalan dengan kearifan lokal.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sepatutnya dapat menyiapkan seluruh elemen pendukung untuk saling bekerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pengendalian dan pengelolaan kebersihan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang dikonsentrasikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya, dapat melakukan kerjasama dengan beberapa dinas lainnya yang juga terkait dalam upaya mencapai tujuan agar terciptanya kondisi perkotaan yang teduh dan ramah lingkungan, dapat dicapai Pemerintah Kabupaten Pasangkayu bersama jajarannya dengan melakukan strategi fungsional manajemen yaitu suatu strategi yang menjalankan fungsi manajemen berupa perencanaan, pengawasan, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi kerja, dan integritas serta pelaksanaan kerja.

Selain itu juga, dapat dilakukan proses pengembangan dan pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati. Strategi penataan kondisi fisik lingkungan perkotaan berkaitan erat dengan kawasan RTH, karena kondisi kota yang sehat hanya akan terjadi apabila sirkulasi udaranya baik, tidak tercemar, dan berpolusi, sehingga pemerintah perlu mengembangkan dan mengelola kawasan RTH untuk menjaga keteduhan kawasan perkotaan. Kemudian, dapat dilaksanakan pengarahannya oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu kepada seluruh *stakeholder* untuk membantu dan menyiapkan pengembangan RTH agar mencapai target yang diharapkan. Pada saat ini, Kabupaten Pasangkayu telah memiliki kawasan ruang terbuka hijau yang di kelola dengan baik oleh pemerintah maupun swasta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap pengembangan dan pengelolaan kawasan Ruang

Terbuka Hijau yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Dinas Lingkungan Hidup cukup baik dalam tolak ukur pencapaian yang diharapkan, namun ini akan lebih ditingkatkan dan diperbanyak lagi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa dalam perencanaan tata ruang wilayah kota harus ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), jenis dan persentase keberadaan RTH ini penyebarannya, terdiri dari RTH publik dan RTH privat.

Disebutkan dalam Undang-Undang ini bahwa, proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang

Selain berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan yang padat aktifitas, taman kota dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi didalam lingkungan perkotaan yang kini mengarah pada individualitas. Menumbuhkan rasa toleransi tidak hanya terhadap sesama manusia, melainkan terhadap makhluk hidup lainnya. Taman yang baik merupakan cerminan kota dengan manusia (masyarakat) yang baik. Manusia (masyarakat) merupakan aspek penting dalam sebuah kota, sehingga kualitas masyarakat akan mempengaruhi kualitas sebuah kota. Taman kota merupakan tempat yang luas dan besar guna mengurangi suasana kepadatan kota, dan untuk menghasilkan kesegaran udara kota (paru-paru kota) serta memberi suasana yang sejuk bagi penduduk kota. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu diupayakan dapat menghadirkan taman kota yang bersih

dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk masyarakat beraktivitas. Dengan keberadaan taman kota memberi dorongan untuk rekreasi di ruang terbuka dengan segala musim bagi penduduk dan pendatang lainnya di Kabupaten Pasangkayu.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Musbar Hasibe, S.Pd., M.Si., juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu juga sebaiknya dapat memperhatikan pembangunan dari segi infrastruktur baik infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Infrastruktur fisik meliputi, penyediaan air bersih, jaringan jalan, pengelolaan persampahan, sistem drainase, jaringan listrik dan telekomunikasi, sanitasi, serta sistem pembuangan air limbah. Sedangkan infrastruktur sosial meliputi, fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan, pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan lapangan terbuka. Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengidentifikasi permukiman kumuh di perkotaan. Elemen dasar lingkungan perumahan menurut Direktur Jenderal Cipta Karya, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam infrastruktur fisik, antara lain: 1) Jaringan jalan 2) Sistem drainase 3) Jaringan air bersih 4) Pengelolaan sampah 5) Pengolahan air limbah.

Sepatutnya, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dapat mewujudkan suasana pemukiman yang layak untuk dihuni oleh masyarakat, bekerjasama dengan pihak swasta pemerintah melakukan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Pasangkayu.

Tujuan adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk

menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan utama diarahkan pada terwujudnya kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah. Disamping pengembangan normanorma dasar yang antara lain: kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Serta penerapan prinsip dasar yaitu: partisipatif, dimana komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran; serta berkelanjutan, dimana seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komperensif.

Menurut pendapat Tachjan (dalam Kertya Witaradya, 2010) garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: 1) perumusan kebijakan; 2) implementasi kebijakan serta 3) pengawasan dan penilaian pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai. Kebijakan pengembangan sekolah adiwiyata diimplementasikan di tingkat penyenggara pendidikan maupun pelaksana di tingkat sekolah. Di tingkat sekolah dalam penelitian yang dilakukan di Malang menunjukkan. Bahwa implementasi Kebijakan Adiwiyata dilaksanakan

berdasar Memorandum bersama antara Meneg dengan Mendiknas No 0142/U/1996 dan No. Kep 89/MenLH/5/1996, Kesepakatan Bersama KemenLH dengan Depdiknas KEP 7/MenLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005, UU No 20 Tahun 2003, UU RI No. 32 Tahun 2009 pada tingkat nasional kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Surat Keputusan Walikota Malang No. 188.45/14/35.73.112/2003 serta Surat Keputusan Kepala Diknas Kota Malang No. 800/1604/35.73.307. tentang penetapan nama sekolah imbas yang mendapat pembinaan oleh sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Kebijakan sekolah dalam kurikulum pembelajaran tertuangkan dalam surat keputusan dan surat edaran yang disampaikan baik kepada guru, tenaga administrasi, wali siswa, siswa, serta komite sekolah. Selanjutnya integrasi kebijakan PLH masuk ke masing-masing mata pelajaran dan yang mendukung kebijakan semua warga sekolah. Visi dan misi harus diproyeksikan ke arah peduli lingkungan dalam rangka mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Struktur kurikulum sudah memuat pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Landriany, 2014).

Masalah pendanaan dan koordinasi merupakan beberapa diantara faktor penghambat pengembangan sekolah adiwiyata. Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian di Malang (Landriany, 2014) dan di Semarang (Sudarwati, 2012).

Menurut Landriany (2014) situasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan adiwiyata, seperti satuan tugas yang tidak tepat waktu serta ada sekelompok siswa

yang masih belum sadar dalam memahami konsep sekolah berwawasan lingkungan hidup, masalah pendanaan, dan dukungan masyarakat serta instansi lain yang masih rendah. Sekolah sudah melakukan langkah-langkah strategi guna mengatasi hambatan. Adapun menurut Sudarwati (2012) implementasi kebijakan sekolah peduli dan berbudaya melalui program Adiwiyata tidak berjalan sesuai dengan standar program Adiwiyata disebabkan rendahnya kegiatan komunikasi dalam bentuk koordinasi di dalam manajemen sekolah yang meliputi koordinasi antara kepala sekolah dan para penanggung jawab program, koordinasi antara penanggung jawab program dan Tim Pengembang Sekolah, dan koordinasi Tim Pengembang Sekolah dengan para pendidik atau guru. Rendahnya koordinasi mengakibatkan persepsi yang salah tentang program Adiwiyata. Sumberdaya manusia yang menguasai program Adiwiyata perlu ditingkatkan. Disposisi untuk mendukung program Adiwiyata masih rendah. Sumber dana untuk melaksanakan program tidak cukup tersedia meskipun manajemen sekolah sudah melakukan kerjasama untuk menggali dana dari masyarakat.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa kebijakan sekolah untuk merencanakan kegiatan dan mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pengembangan yang terkait dengan Pendidikan, kegiatan kurikuler sekolah yang menghasilkan karya/aksi nyata dalam hal mengimplementasikan hasil pembelajaran yang bertema lingkungan hidup dalam 3 tahun terakhir dan upaya pengelolaan sampah untuk menunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah masih dinilai lemah oleh responden. Hal ini menunjukkan implementasi kebijakan adiwiyata masih belum menjadi suatu kebutuhan sehingga inovasi

pengembangan kegiatan masih kurang serta tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kegiatan nyata yang diimplemetasikan secara riil di sekolah. Dalam penelitian terdahulu di Surabaya menunjukkan bahwa terdapat beberapa program yang dapat diterapkan yaitu komposter; takakura; pembibitan dan program 4R. Program tersebut diterapkan berdasarkan komponen antara lain kebijakan berwawasan lingkungan; pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan; kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Penerapan program tersebut terdapat faktor pendukung internal yakni SDM yang mumpuni dan adanya visi, misi, fungsi serta pengelolaan anggaran yang baik. Tetapi tenaga pendidik yang kurang kompak dan faktor penghambat eksternal adalah adanya renovasi gedung yang membuat ketidakberhasilan dalam mencapai penghargaan Adiwiyata (Rahmah, 2014).

Hal lain yang tidak kalah pentingnya pembentukan kader-kader peduli adiwiyata, misalnya pembentukan Remaja Cinta Lingkungan sebagai *Green Club* yang bertindak sebagai pelopor kebersihan dapat membantu para guru dan siswa mengingatkan setiap warga yang lupa akan peraturan, serta secara berkesinambungan seluruh warga sekolah sudah memiliki kesadaran mencintai lingkungan hidup di wilayah sekolah (Isnaeni, 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian di Salatiga yang menunjukkan Kegiatan partisipatif yang dilakukan antara lain: a) petugas piket membersihkan ruangan sebelum KBM dimulai dan dan setelah jam pelajaran usai; b) guru tidak merokok di lingkungan sekolah terutama saat mengajar di dalam kelas; c) guru menyisipkan materi PLH pada saat

KBM; d) melaksanakan Jumat bersih dengan pembagian kapling yang telah disediakan oleh tim PLH; e) perawat tanaman yang berada di Green House mulai dari pembibitan, penanaman, pemupukan, pengenalan hama, sampai pada penyiraman dan pengenalan karakter tanaman; f) mengikuti even yang bertema *green*; g) pemanfaatan kertas bekas untuk berbagai jenis kerajinan tangan; dan h) pemanfaatan botol aqua bekas, yang menunjukkan adanya dampak positif dari pengelolaan sekolah Adiwiyata (Wahyudi, 2012).

Hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu masih kurang menyentuh aspek pengembangan ke sekolah. Hal ini terlihat dari implementasi kebijakan yang masih berskala makro misalnya 1) menyiapkan infrastruktur; 2) meningkatkan sanitasi lingkungan; 3) melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah adiwiyata; 4) meningkatkan manajemen lingkungan; 5) melakukan pembersihan total di wilayah Kabupaten Pasangkayu; 6) melakukan pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Adapun dalam hal pembinaan ke sekolah-sekolah adiwiyata masih belum berjalan efektif, hal ini karena belum adanya kebijakan khusus, misalnya Keputusan Bupati tentang Penetapan PLH sebagai Kurikulum Muatan Lokal, penetapan nama sekolah imbas yang mendapat pembinaan oleh sekolah Adiwiyata tingkat nasional, maupun kebijakan yang lainnya.

5.6.1 Analisis SWOT dalam Strategi Pengembangan Kebijakan Adiwiyata Kabupaten Pasangkayu

Dalam penentuan strategi dan kebijakan ada beberapa tahapan analisis SWOT yang akan digunakan. Tahapan pertama dalam analisis SWOT yakni melakukan perumusan faktor-faktor yang ada didalam maupun diluar (internal dan

eksternal). Dalam perumusan Faktor-faktor yang menjadi objek dalam analisis SWOT adalah pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu. Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menentukan strategi melalui serangkaian wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Tahapan pertama yakni melakukan perumusan faktor-faktor yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Dengan perumusan dari hasil wawancara memperoleh faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

Adapun faktor kekuatan yang ditemukan dalam rangka pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu, yaitu sebagai berikut: 1) adanya kearifan lokal yang berada di masyarakat untuk mendukung terlaksananya pengelolaan lingkungan; 2) tersedianya kebijakan pengelolaan lingkungan berupa pengelolaan sampah; 3) terdapat beberapa sekolah yang telah mendapatkan penghargaan adiwiyata baik di tingkat kabupaten dan nasional.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Adapun faktor kelemahan yang ditemukan dalam rangka pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu, yaitu sebagai berikut: 1) belum tersedianya anggaran untuk mendukung terlaksananya program adiwiyata; 2) kurangnya jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata; 3) minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung terlaksananya pengelolaan lingkungan.

c. Peluang (*Opportunity*)

Adapun faktor peluang yang ditemukan dalam rangka pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu, yaitu sebagai berikut: 1) kesadaran masyarakat yang tinggi; 2) adanya kerjasama di antara para *stakeholder* yang dapat ditingkatkan; 3) pemerintah memiliki kemauan yang besar dalam rangka pelestarian lingkungan.

d. Ancaman (*Threat*)

Adapun faktor kekuatan yang ditemukan dalam rangka pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu, yaitu sebagai berikut: 1) tidak terjadinya koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat yang dapat terwujud; 2) kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak sekolah; 3) tidak adanya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program adiwiyata yang berkelanjutan.

Untuk menganalisis lebih lanjut strategi dan program pengembangan adiwiyata oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan Analisis SWOT dalam rangka untuk melakukan identifikasi yang bersifat sistematis dan dapat menyelaraskan faktor-faktor dari lingkungan eksternal dan internal serta

mampu mengarahkan dan berperan sebagai katalisator dalam proses perencanaan strategis.

Tabel 5.17 Hasil analisis SWOT

<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya kearifan lokal yang berada di masyarakat untuk mendukung terlaksananya pengelolaan lingkungan; 2) tersedianya kebijakan pengelolaan lingkungan berupa pengelolaan sampah; 3) terdapat beberapa sekolah yang telah mendapatkan penghargaan adiwiyata baik di tingkat kabupaten dan nasional. 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) belum tersedianya anggaran untuk mendukung terlaksananya program adiwiyata; 2) kurangnya jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata; 3) minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung terlaksananya pengelolaan lingkungan.
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kesadaran masyarakat yang tinggi; 2) adanya kerjasama di antara para <i>stakeholder</i> yang dapat ditingkatkan; 3) pemerintah memiliki kemauan yang besar dalam rangka pelestarian lingkungan. 	<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak terjadinya koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat yang dapat terwujud; 2) kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak sekolah; 3) tidak adanya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program adiwiyata yang berkelanjutan.

Di mana unsur-unsur yang terdapat dalam analisis SWOT meliputi S (*strength*), W (*weakness*), O (*opportunity*), dan T (*threat*). Matriks ini mampu menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T, serta strategi S-T. Adapun penjabaran dari masing-masing strategi tersebut, yaitu: 1) Strategi S-O merupakan upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk mendapatkan setiap unsur peluang seoptimal mungkin; 2) Strategi W-O merupakan upaya untuk memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar mampu memanfaatkan setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin; 3) Strategi W-T merupakan upaya untuk

memperbaiki unsur kelemahan agar dapat menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin; dan 4) strategi S-T merupakan upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menjaga setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. Adapun hasil analisis SWOT terkait dengan strategi dan program pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat sebagai berikut:

1) Strategi *Strength-Opportunities*, yaitu:

a) Memaksimalkan terlaksananya pendidikan lingkungan hidup di setiap sekolah yang berbasis kearifan lokal di mana keseluruhan sekolah di Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan terkait dengan kegiatan yang berbasis pengelolaan lingkungan misalnya kebersihan lingkungan rutin yang dijalankan baik oleh siswa, guru, maupun masyarakat sekitar. Namun, belum menerapkan kebijakan seperti program kegiatan yang memberikan alokasi anggaran yang cukup terhadap kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Sehingga, diharapkan adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk dapat menyusun program pendanaan kepada masing-masing sekolah yang efektif dan berkelanjutan untuk dapat mendukung terciptanya pelaksanaan program adiwiyata.

b) Memanfaatkan pengembangan kurikulum pembelajaran lingkungan hidup di setiap sekolah yang telah tersedia dengan memaksimalkan penerapan kebijakan maupun program sekolah yang dapat menghasilkan karya/aksi nyata dalam hal mengimplementasikan hasil

pembelajaran yang bertema lingkungan hidup dalam 3 tahun terakhir.

c) Meningkatkan kerjasama di setiap sekolah dengan beberapa pihak tertentu baik pihak pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk mengembangkan konsep pembelajaran yang berbasis pendidikan lingkungan hidup yang disinergikan dengan program kegiatan baik dalam bentuk ekstrakurikuler maupun kokurikuler yang mendukung pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan hidup peserta didik.

d) Memaksimalkan kebijakan penerapan efisiensi dalam penggunaan penghematan air, listik, alat tulis kantor, plastik dan bahan lainnya yang sejalan dengan ketersediaan kebijakan pengelolaan sampah untuk menunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah.

e) Mendukung pelaksanaan kebijakan yang terakomodir pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pelestarian lingkungan yang berbasis kearifan lokal.

2) Strategi *Weakness-Opportunities*, yaitu:

a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Pasangkayu yang terkoordinasi di setiap sekolah di mana setiap siswa dapat mengembangkan kreativitasnya khususnya pada bidang pengelolaan sampah plastik dan sampah lainnya yang dapat diolah menjadi produk tertentu.

b) Memanfaatkan ketersediaan lahan di setiap sekolah untuk dijadikan sebagai tempat produktif pembelajaran terhadap lingkungan yang terkoordinasi dengan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

3) Strategi *Strength-Threats*, yaitu:

a) Mengembangkan kurikulum berbasis lingkungan, dengan menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di mana Kurikulum tersebut mengintegrasikan lingkungan pada semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan, baik dari metode, model, pendekatan sampai media pembelajaran.

b) Mengembangkan kegiatan berbasis partisipatif dalam setiap kegiatan baik kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Kegiatan di sekolah yang biasa dilakukan berupa piket kebersihan kelas, kegiatan jumat bersih, serta kegiatan rutin tiap pagi secara bergiliran.

4) Strategi *Weakness-Threats*, yaitu:

a) Mendorong perubahan perilaku siswa terhadap pemikiran, perasaan, serta adanya dorongan spriritual agar dapat meningkatkan pemahaman seseorang untuk bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Hal ini dikarenakan, perilaku peduli lingkungan adalah salah satu akhlak mulia yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di muka bumi.

Dapat diperhatikan sejatinya bahwa strategi dan program pengembangan adiwiyata di Kabupaten Pasangkayu dapat di fokuskan kepada peningkatan pendidikan lingkungan yang berbasis kearifan lokal yang didukung dengan anggaran yang efektif dan berkelanjutan serta adanya ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu juga, perlu untuk diperhatikan bahwa terdapat beberapa

komponen Adiwiyata berkaitan langsung dalam pembentukan perilaku peduli lingkungan yang dijabarkan melalui tiga aspek, yaitu tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pada teori sebelumnya dinyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku peduli lingkungan sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek. Tidak ada jaminan bahwa salah satu dari tiga aspek tersebut baik, maka perilaku peduli lingkungannya juga baik, hasil penelitian juga sudah menunjukkan hasil serupa. Oleh karena itu, peneliti setuju dengan Meyer (2015) bahwa tidak selalu tingkat pengetahuan yang tinggi akan mendorong seseorang untuk berperilaku peduli lingkungan. Sikap yang baik juga belum tentu mencerminkan tindakan atau perilaku yang baik pula. Hal ini dikembalikan lagi pada Teori Triandhy yang dikemukakan Jackson (2005) dan teori Kollmuss dan Agyeman (2002) bahwa pembentukan perilaku peduli lingkungan sangat kompleks karena melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan, di samping juga terdapat faktor penghalang seseorang untuk mengubah perilakunya. Dengan demikian, untuk mewujudkan perilaku peduli lingkungan tidak cukup hanya dengan melibatkan satu aspek pengubah saja atau pihak tertentu saja (misalnya sekolah saja) untuk melakukan perubahan tetapi dengan mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dan kerjasama antar semua pihak.

Di sisi lain, pendidikan saat ini juga belum mampu mewujudkan individu yang dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sejalan dengan teori Syarif (2009) dan Sabatin (2007) bahwa mengubah perilaku dibutuhkan adanya kaitan antara pemikiran, perasaan, serta adanya dorongan spriritual. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila belum sepenuhnya mampu mengakar ke dalam diri

individu. Kaitannya dengan mewujudkan perilaku peduli lingkungan, maka sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Mahaesa sudah menjadi alasan kuat yang mendorong seseorang untuk bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Hal ini dikarenakan, perilaku peduli lingkungan adalah salah satu akhlak mulia yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipertegas kembali tujuan dari pendidikan yang sebenarnya, termasuk pendidikan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam Program Adiwiyata. Pendidikan lingkungan hidup harus fokus untuk mengubah perilaku individu dan bukan hanya sebatas mengubah pemahaman saja karena yang lebih penting adalah membangun jiwa dan karakter individu yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sepatutnya dapat melakukan pengembangan kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan Kebijakan peduli dan berwawasan lingkungan seperti halnya, yaitu:

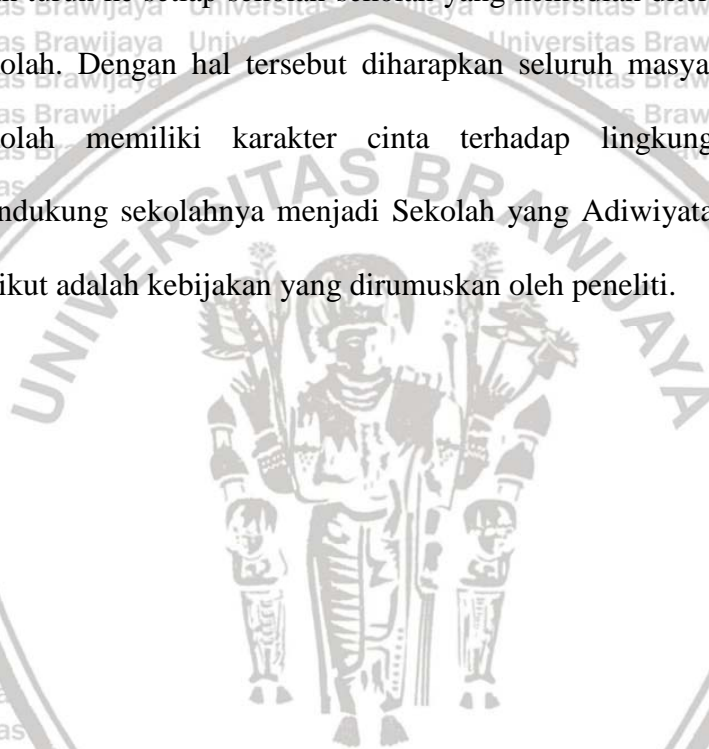
- 1) Kebijakan peduli dan berwawasan lingkungan dapat dimasukkan dalam visi, misi, dan tujuan sekolah yang diseragamkan melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga selaku yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut;
- 2) Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, dengan menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di mana Kurikulum tersebut mengintegrasikan lingkungan pada semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikaitkan dengan lingkungan, baik dari metode, model, pendekatan sampai

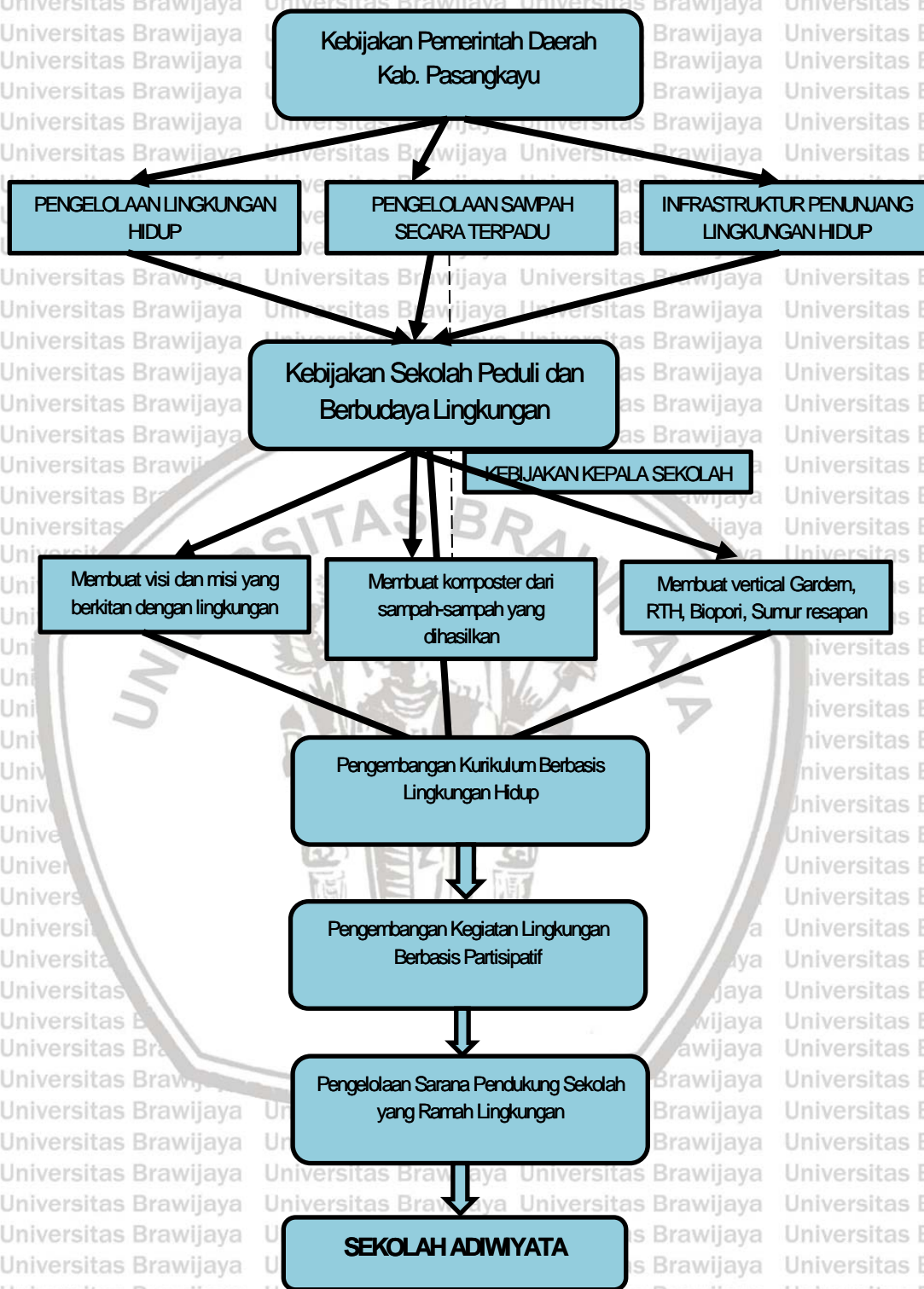
media pembelajaran. Siswa akan lebih rileks dan semangat ketika pembelajaran di luar dengan media lingkungan sekitar. Integrasi lingkungan berupa penanaman karakter peduli lingkungan pada siswa, baik berupa praktik maupun teori. Dalam hal teori siswa dibekali dan disisipi materi yang berkaitan dengan lingkungan. Siswa juga diberi tugas yang ada kaitannya dengan lingkungan;

- 3) Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif dalam setiap kegiatan. Baik kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Kegiatan di sekolah yang biasa dilakukan berupa piket kebersihan kelas, kegiatan jumat bersih, serta kegiatan rutin tiap pagi secara bergiliran. Kegiatan lain berupa keikutsertaan siswa dalam lomba lingkungan. Lomba tersebut memberi semangat pada siswa untuk selalu peduli lingkungan;
- 4) Pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah berwawasan lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup di sekolah Adiwiyata, bukan hanya berupa teori saja, akan tetapi lebih berupa praktek yang membudaya, sehingga diperlukan sarana prasarana yang mendukung terbentuknya budaya ramah lingkungan tersebut. Sarana prasarana yang diperlukan tersebut jumlahnya tidak sedikit, oleh sebab itu diperlukan tahapan dalam pencapaiannya. Hal ini disebabkan karena dana sekolah yang tidak bisa semuanya dialokasikan ke lingkungan. Dana lingkungan yang dihasilkan tersebut digunakan untuk membeli peralatan kebersihan, bibit tanaman, komposter, pembuatan taman, pembuatan biopori dan *green house*. Sebagian dana tersebut juga untuk membeli buku-buku lingkungan,

serta kegiatan lain yang berkaitan dengan lingkungan seperti workshop, pelatihan, lomba serta penataan dan perbaikan lingkungan.

Kebijakan adiwiyata yang dibuat berdasarkan pada beberapa variabel pendukung sekolah Adiwiyata yang telah dimodifikasi agar menjadi lebih spesifik. Model dimulai dari pembuatan kebijakan dari daerah yang kemudian akan turun ke setiap sekolah-sekolah yang kemudian diterapkan dalam kurikulum sekolah. Dengan hal tersebut diharapkan seluruh masyarakat khususnya warga sekolah memiliki karakter cinta terhadap lingkungan sehingga mampu mendukung sekolahnya menjadi Sekolah yang Adiwiyata. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kebijakan yang dirumuskan oleh peneliti.





Gambar 5.4 Kebijakan Adiwiyata Berbasis Kearifan Lokal

5.7. Catatan Atas Kebaruan Disertasi

Variabel Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagai variabel baru yang ditambahkan dalam model penelitian sebelumnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan secara parsial variabel Kebijakan Adiwiyata Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Berbasis Kearifan Lokal (X_5) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata. Selanjutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu memiliki pengaruh yang signifikan dalam rangka pengembangan kebijakan adiwiyata yang dapat dijalankan dengan pengembangan kearifan lokal dalam sekolah adiwiyata dilakukan melalui pembelajaran seperti budaya kerja *malaqbi* yang tercermin dari sikap dan tindakan seperti: 1) *malaqbi pau* yaitu tutur kata yang sopan dan santun sebagai seorang siswa; 2) *malaqbi gauq* yaitu tingkah laku yang baik sebagai seorang siswa di sekolah; dan 3) *malaqbi kedzo* yaitu perilaku baik yang sejalan dengan tingginya kepedulian terhadap kelestarian di lingkungan sekitar. Dimulai dengan memuat unsur kearifan lokal tersebut dalam penyusunan silabus dan pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran yang terkait serta dalam kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah dan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bagi setiap siswa tentang pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam maupun di luar kelas yang mana kegiatan tersebut dapat memberikan peningkatan pemahaman kepada setiap siswa dalam mendalami upaya pelestarian lingkungan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Strategi adiwiyata oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah dengan mengembangkan kebijakan peduli dan berwawasan lingkungan dapat dimasukkan dalam visi dan misi sekolah yang diseragamkan melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga, mengembangkan kurikulum berbasis lingkungan yang terintegrasi pada semua mata pelajaran, mengembangkan kegiatan berbasis partisipatif dalam setiap kegiatan, serta mengembangkan dan mengelola sarana pendukung sekolah berwawasan lingkungan.
2. Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup, Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif, Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kebijakan adiwiyata.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian tersebut, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu perlu dapat menyusun kebijakan adiwiyata dengan mempertimbangkan kearifan lokal daerah dalam rangka untuk melakukan sinergitas terhadap upaya peningkatan pencapaian

program adiwiyata yang akan memberikan dampak terhadap pengembangan pengelolaan lingkungan melalui sekolah adiwiyata yang terapkan ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.

2. Pelaksanaan program Adiwiyata jangan dijadikan sebagai formalitas namun diterapkan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafoor Awan. 2013. Relationship Between Environment and Sustainable Economic Development: A Theoretical Approach To Environmental Problems. *International Journal of Asian Social Science*, 2013, 3(3):741-761.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adi Gunawan, Lalu. 2009. The Political Ambiguity of Natural Resources Management: Conflicting the issues of policy, environmental, and economic condition of the Illegal Mining in Sekotong, West Lombok District. The 2nd IRSA International Institute. July 21-23, 2009. Bogor Indonesia.
- A. D. Basiago. Economic, Social, and Environmental Sustainability in Development Theory and Urban Planning Practice. *Jurnal The Environmentalist* Vol. 19, p. 145-161.
- Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.
- Al Jufri. 2013. Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Aloysius Gunadi Brata. 2009. Does Geographic Factors Determine Local Economic Development?. The 2nd IRSA International Institute. July 21-23, 2009. Bogor Indonesia. Yogyakarta: Atma Jaya University.
- Alwi, Syafaruddin. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: BPFE.
- Ambar. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anastasios V. Katos. 2015. The Impact of Information and Communication Technologies on National Competitiveness: A Test of a Mediating Model in the European Union Countries Context. *Journal of Information Technology Impact*. Vol. 9, No. 3, pp. 145-154.
- Andy Haryono, Soemarno, M. Sasmito Djati, Amin Setyoleksono. 2014. Learning Attitude and Awareness against Students in Cultured Environmental Success in Probolinggo. *Journal of Environment and Earth Science*, Volume 4, Nomor 16. Halaman 72-81

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Awan, Abdul Ghafoor. 2013. Relationship Between Environment and Sustainable Economic Development: A Theoretical Approach to Environmental Problems. *International Journal of Asian Social Science*. Vol. 3, No. 3, Hal. 741-761.

B. Lavanya, M.Anbalagan. 2012. Corporate Environmental Responsibility with special reference to Toyota Motor Corporation. *IOSR Journal of Business and Management* Volume 4, Issue 4, PP 08-15.

Basiago, A.D. 1999. Economic, Social, and Environmental Sustainability in Development Theory and Urban Planning Practice. *The Environmentalist*. Vol. 19, Hal. 145-161.

Bryson, J.M. 2005. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Cornelis. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Kencana

Daft, Richard L. 2002. *Manajemen Edisi Ke-5*. Jakarta: Erlangga.

Darmawan, E. 2009. *Ruang Publik dalam Arsitektur Kota*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Ellen Landriany. 2014. Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Vol. 2, No. 1, Januari 2014, hal. 82-88.

Fitria Indah Cahyani. 2015. Strategi Pemerintah Kota Bontang dalam Mencapai Penghargaan Adipura Tahun 2014. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, No. 2, Tahun 2015, Hal. 1197-1210.

Gilang. 2016. Pengaruh *Lingkungan* Kerja Fisik dan Nonfisik Terhadap Kinerja Karyawan Pada KPPN Bandung. *Jurnal Sositoteknologi*. Vol. 15, No 1, 2016.

Hamzah, Syukri. 2013. *Pendidikan Lingkungan*. Bandung: Rafika Aditama.

Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kodoatie, Robert J. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik praktis riset komunikasi. Jakarta: PT. Prenanda Media Obor Indonesia.

Landriany, E. 2014. Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 2, Nomor 1, Januari 2014.

Leo, Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Lita Dwipasari. 2014. Waste Management Model-Based Design Character in Junior High School as a Tool of the Economic Empowerment. IOSR Journal of Business and Management, Volume 16, Issue 10. Ver. I (Oct. 2014), PP 38-48.

Maryono. 2015. The Implementation of the Environmental Education at "Adiwiyata" Schools in Pacitan Regency (An Analysis of the Implementation of Grindle Model Policy). Journal of Education and Practice, Vol.6, No.17, 2015. 31.

Nurjhani, M dan Widodo, A. 2009. Penggunaan Multimedia Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Mahasiswa dalam Perkuliahan Konsep Dasar IPA. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP: Tidak Diterbitkan.

Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata

Saroj Kumar Datta. 2011. Pro-environmental Concern Influencing Green Buying: A Study on Indian Consumers. International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 6; June 2011.

Shah Md. Atiqul Haq. 2012. Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment. Journal of Environmental Protection, Vol. 2 No. 5, 2011, pp. 601-608.

- Shkurkin, D., Novikov, V., Kobersy, I., Kobersy, I., Borisova, A. 2015. Investigation of the scope of intellectual services in the aspect of virtualization and information economy of modern Russia. *Mediterranean Journal of Social Sciences* Vol. 6 No. 5.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*. Alfabeta. Bandung.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktik Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Tirtarahardja. 2008. *Pengantar Pendidikan Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tribun Jateng. 2016. *Adiwiyata Jadi Syarat Kabupaten/Kota Jika Ingin Dapat Adipura*. <<http://jateng.tribunnews.com/2016/04/24/adiwiyata-jadi-syarat-kabupatenkota-jika-ingin-dapat-adipura>>. [20/04/2017]
- Umran Sahin. 2013. The Classroom Teachers's Skills to Organize Contruktivist Learning Environment. *International Journal of Elementary Education* 2013; 2(2): 16-22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Usama Nassar. 2013. Principle of Green Urbanism: The Absent Value in Cairo, Egypt. *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 3, No. 4, July 2013.
- Warju, Slamet Prawiro Harto, Soenarto, Martin D. Hartmann. 2013. Evaluating the implementation of Green School (Adiwiyata) Pogram: Evidence In Indonesia. *International Journal of Environmental and Science Education* Volume 12 Issue 6.

Wirakusumah. 2010. Konsep pendidikan lingkungan di sekolah: model uji coba sekolah berwawasan lingkungan. Bandung: FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia

Xavier Font, John Tribe. 2001. Promoting Green Tourism: the Future of Environmental Awards. *International Journal of Tourism Research*. Vol. 3, Hal. 9-21, Tahun 2001.

Yahya Shamadi. 2012. Kajian Tentang Penerapan Sekolah Berwawasan Lingkungan Melalui Program Sekolah Adiwiyata Nasional Pada Sma Negeri Di Kabupaten Batu Bara. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Yuli Priyanto, M.Sasmito Djati, Soemarno, Zaenal Fanani. 2013. Pendidikan Berperspektif Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Environmental Perspective Education Towards Sustainable Development*. *Jurnal Wacana*, Volume 16, Nomor 1, Tahun 2013.

